



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**KOMUNIKASI STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM PENCEGAHAN KONFLIK LAHAN PADA NELAYAN  
DI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAKARTA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
dalam bidang Ilmu Pertahanan

**AZZAH RATUL AZIZAH  
NPM: 1 2013 0103 005**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR  
SEPTEMBER 2015**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Azzah Ratul Azizah  
NPM : 1 2013 0103 005  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : Komunikasi Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Konflik Lahan pada Nelayan di Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Syaiful Anwar

Pembimbing II : Kol. Inf. Drs. S. Albert Tumbol, MA

Penguji I : Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, drg., SP.BM(K), FICD, FICCD

Penguji II : Dr. Ichsan Malik

Penguji III : Kol. Kav. Drs. Wibisono Puspitohadi, M.Sc, M.Si( Han)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 29 September 2015



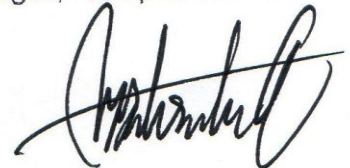
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dari undang-undang yang berlaku.

Bogor, <sup>29</sup>September 2015



Azzah Ratul Azizah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzah Ratul Azizah  
NPM : 1 2013 0103 005  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

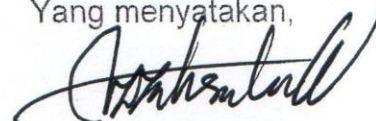
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KOMUNIKASI STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK LAHAN PADA NELAYAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAKARTA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/ Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, <sup>29</sup>September 2015  
Yang menyatakan,



Azzah Ratul Azizah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Syaiful Anwar selaku dosen pembimbing I dan juga mantan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, serta Kolonel Inf. Drs. S. Albert Tumbol, MA selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio yang selalu memotivasi dan mendorong semangat untuk terus giat belajar;
- (3) Mayjen TNI I Gede Sumertha K. Y, PSC, M.Sc selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan;
- (4) Kolonel Laut (KH) Dr. Adnan Madjid selaku Kepala Program Studi Damai dan Resolusi Konflik (DRK), serta Mayor Arm. Moch Rofiq yang telah mengelola jalannya perkuliahan di Prodi DRK;
- (5) Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, drg., SP.BM(K)., FICD, FICCD selaku penguji I, Dr. Ichsan Malik selaku penguji II dan Kolonel Kav Drs. Wibisono Puspitohadi, M.Sc, M.Si (Han) selaku penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu demi terwujudnya tesis ini;
- (6) Bappeda PSKLH dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) bidang Kelautan dan Perikanan yang telah bersedia dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berbagi informasi;
- (7) Sekretaris kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Junaedi S.Sos, M.Si beserta jajarannya Kasudin KPKP, H. Una, Ka Kesbangpol, PTSP Walikota Jakarta Utara, dan lainnya yang telah banyak memberikan informasi dan waktunya kepada peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan;

- (8) Kasicam KPKP Penjaringan, Bapak Musyawarah beserta stafnya dan Kasicam KPKP Cilincing, Bapak Nasir beserta stafnya yang telah membantu peneliti untuk memperoleh data yang diperoleh;
- (9) Para nelayan di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan yang telah bersedia untuk peneliti wawancara;
- (10) Teman-teman PCR Ch-2 yang cantik dan ganteng: Mas Lendro, Romo, Mas Erry, Mas Agus, Mas Dicky, Mas Hamrin, Mas Sandy, Mas Adrie, Mas Dahlan, Mas Adnan, Mbak Citra, Mbak Mira, Mbak Manda, Mbak Jenni, Mbak Jean, Mbak Sifra, Mbak Lia, Mbak Farida, Mbak Webby, Mbak Fani dan Mbak Dita yang selalu kompak dan saling mendoakan, dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
- (11) Para senior SPS Ch-5 yang baik hatinya, yang memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
- (12) Rekan-rekan Sekretariat Fakultas Strategi Pertahanan Pak Rahmat, Pak Mashudi Rofik, Pak Efferdian, Pak Zajuli dan Pak Ahmad G. Dohamid.
- (13) Kedua orang tua dan abang yang selalu mendoakan, menyemangati, menemani dan mendukung penuh adik untuk menyelesaikan studi dan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya dalam kajian Damai dan Resolusi Konflik.

Bogor, 29 September 2015  
Azzah Ratul Azizah

## ABSTRAK

Nama : Azzah Ratul Azizah  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : Komunikasi Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Konflik Lahan pada Nelayan di Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta

Penelitian ini menganalisis tentang komunikasi strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pencegahan konflik lahan pada nelayan di wilayah pesisir Pantai Utara Jakarta (Pantura Jakarta). Penyebab dari konflik lahan ini adalah reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi di Pantura Jakarta terdapat 17 pulau yang telah mendapat ijin membangun dari Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis langkah komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya mencegah konflik lahan di wilayah tersebut dengan nelayan yang terjadi akibat adanya reklamasi dan mengidentifikasi dampak dari komunikasi strategis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun teori yang digunakan ialah teori konflik dan komunikasi strategis, serta penjelasan mengenai nelayan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa reklamasi menyebabkan adanya endapan lumpur sehingga nelayan susah melakukan aktivitas dan hilangnya habitat alami dari ikan disekitar pesisir, maka hal ini yang menyebabkan protes dari nelayan. Adapun hasil penelitian ini, membuktikan: 1) Komunikasi strategis yang dilakukan dapat mencegah konflik sehingga tidak meningkat ke fase yang lebih tinggi; 2) Adanya dampak yang ditimbulkan dari komunikasi strategis tersebut dalam lingkungan nelayan dalam mempengaruhi tingkah lakunya.

Kata kunci: Reklamasi, Komunikasi Strategis, Nelayan, Konflik

## ABSTRACT

Name : Azzah Ratul Azizah  
Study Program : Peace and Conflict Resolution  
Title : The Strategic Communications of the DKI Jakarta  
Provincial Government in Land Conflict Prevention  
with Fishermen around Jakarta's North Coast

This study analyzes the strategic communications of the DKI Jakarta Provincial Government as a prevention mechanism for land conflict with fishermen in coastal areas of north Jakarta (Pantura Jakarta). The cause of the conflict is land reclamation. Reclamation constitutes the activities carried out by people in order to increase the benefits of land resources in terms of environmental and socio-economic aspects, usually by means of backfill or land drainage. In Pantura Jakarta, 17 islands have received permission from the provincial government to build as reclamation projects. The purpose of this study is first to analyze the strategic communications undertaken by the provincial government in an effort to prevent land conflicts with fishermen that occur in the area due to reclamation and second to identify the impact of the strategic communication. This study uses qualitative methods. Data was obtained through observation, interviews and literature review. The theories that the researcher used include the theory of conflict and strategic communications and also the explanations of fishermen themselves. The results of observations showed that, first, reclamation has made sludge in that area, so the fishermen found it difficult to carry out fishing activities and, second, the loss of natural habitat of fish around the coast has caused protests from fishermen. This research has proved that strategic communications are undertaken to prevent a conflict from rising to a higher phase, and that there are several impacts of the strategic communications on the fishermen's behavior.

Keywords: Reclamation, Strategic Communication, Fishermen, Conflict

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat teoritis .....	14
1.4.2. Manfaat praktis .....	14
1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian .....	14
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
1.5.2. Sistematika Penulisan.....	15
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>16</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	16
2.1.1. Teori Konflik .....	16
2.1.2. Komunikasi Strategis .....	20
2.1.3. Nelayan .....	31
2.1.4. Penelitian Terdahulu .....	33
2.1.4.1. Rudianto (2004) dengan Judul Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Pantai Utara Jakarta).....	34
2.1.4.2. Lestario Widodo dkk (2004) dengan Judul Kajian Aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.....	36
2.1.4.3. Lee E. Bokma (2010) dengan Judul <i>Strategic Communication for Tactical Leaders</i> .....	37
2.2. Kerangka Pemikiran .....	39
<b>3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1. Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian .....	41
3.1.1. Sumber Data .....	41
3.1.2. Subjek Penelitian.....	42
3.1.3. Objek Penelitian .....	43

3.2. Desain Penelitian .....	43
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.3.1. Studi Literatur (Kepustakaan) .....	44
3.3.2. Wawancara .....	44
3.3.3. Observasi. ....	46
3.4. Teknik Analisa Data .....	47
3.5. Prosedur Penelitian .....	47
<b>4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1. Gambaran Sebaran Data Penelitian .....	49
4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian di Wilayah Jakarta Utara.....	49
4.1.1.1. Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakarta Utara).....	50
4.1.1.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta .....	56
4.1.1.3. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas KPKP) Pemprov DKI Jakarta .....	59
4.2. Hasil Penelitian .....	62
4.2.1. Hasil Observasi Lapangan Terkait Reklamasi .....	62
4.2.2. Hasil Penelitian Tentang Komunikasi Strategis yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hingga pada Tahap Nelayan Terkait Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta.....	70
4.2.2.1. Komunikasi Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta dan Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara .....	70
4.2.2.2. Hasil Penelitian Komunikasi Strategis di Tahap Nelayan.....	78
4.2.2.3. Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Komunikasi Strategis terhadap Proyek Reklamasi Pantura Jakarta .....	82
4.3. Pembahasan .....	83
4.3.1. Komunikasi Strategis yang Dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Nelayan sebagai Upaya Pencegahan Konflik Lahan di Wilayah Pesisir Pantura Jakarta .....	84
4.3.2. Dampak Komunikasi Strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap para Nelayan .....	92
<b>5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
5.1. Simpulan .....	98
5.2. Saran .....	100
5.2.1 Saran Teoritis .....	100
5.2.2 Saran Praktis .....	101

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Segitiga Pesan.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Jakarta Utara .....	49
Gambar 4.2 Wilayah Kecamatan Penjaringan .....	53
Gambar 4.3 Wilayah Kecamatan Cilincing .....	55
Gambar 4.4 Peta Rencana Reklamasi 17 Pulau Kawasan Pantura Jakarta .....	63
Gambar 4.5 Pendangkalan di Area Kamal .....	65
Gambar 4.6 Foto Keadaan dari Pinggir Pantai di Wilayah Kamal ....	65
Gambar 4.7 Kapal Bagan Nelayan Terperangkap Sedimen .....	66
Gambar 4.8 Kapal-kapal Nelayan di Kamal .....	67
Gambar 4.9 Alat Pengeruk Sedimen .....	67
Gambar 4.10 Keadaan di Sekitar Pinggiran Pantai di Cilincing .....	68
Gambar 4.11 Area Sandar Kapal Nelayan di Kawasan Cilincing.....	69
Gambar 4.12 Tampak Kawasan Cilincing dari Google Map .....	69
Gambar 4.13 Arisan Paguyuban KCM di TPI Cilincing .....	79
Gambar 4.14 Arisan Paguyuban Jaring Kait di TPI Kamal .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
- Lampiran 2. Daftar Narasumber
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan agenda penting bagi suatu negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dudley Seer menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dapat memenuhi keperluan kehidupan setiap masyarakat, yang juga didukung dengan mengembangkan potensi diri dari masyarakat tersebut<sup>1</sup>. Pengembangan potensi tersebut, dikarenakan ketika negara aktif dalam pembangunan maka terbukalah lapangan kerja baru. Dengan demikian dalam pembangunan tidak hanya kesejahteraan saja yang akan terpenuhi, melainkan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, jika pembangunan tidak dapat menyejahterakan masyarakatnya maka akan menimbulkan masalah. Permasalahan yang timbul ketika pembangunan sedang dilakukan biasanya berupa konflik sosial. Konflik ini merupakan pertentangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam aspek kehidupan<sup>2</sup>. Timbulnya konflik tersebut, dapat dipicu oleh kebijakan pembangunan yang terkadang berpihak pada salah satu kelompok tertentu<sup>3</sup>. Padahal kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah diperuntukkan bagi kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk

---

<sup>1</sup>Dudley Seer's, *The Meaning of Development* (1969), dalam Ahmad Shukri Md Nain, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan* (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003) hlm.25.

<sup>2</sup>Sjamsudduha, *Konflik dan Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah: Sebuah Kajian Kontemplatif* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 28.

<sup>3</sup>Diklatpim I Angkatan XXVIII 2013 LAN RI, "Policy Brief: Penanganan Konflik Sosial", hlm. 3.

merencanakan pembangunan dengan membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini, di setiap daerah di Indonesia berusaha melaksanakan pembangunan dengan baik demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakatnya. Adapun contohnya ialah kota Surabaya dan kota Bandung yang seringkali memperlihatkan kesuksesannya dalam membangun kotanya melalui berita di televisi maupun surat kabar. Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia juga giat dalam pembangunan. Pemprov DKI Jakarta tiap tahunnya berusaha melakukan pembenahan infrastruktur dalam kota dan juga tata kota. Salah satunya dalam pembenahan tata kota yang saat ini sedang sibuk dilakukan ialah penambahan lahan wilayah kota Jakarta dengan reklamasi di Pantura Jakarta.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase<sup>4</sup>. Reklamasi Pantura Jakarta ini telah dimulai sejak tahun 1995 melalui Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa wilayah yang direklamasi ialah kawasan Pantura Jakarta. Kawasan tersebut ialah sebagian wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantura Jakarta yang ada dan areal reklamasi Pantura Jakarta<sup>5</sup>.

Selanjutnya dari Keputusan Presiden tersebut, kembali dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 6 Desember 2012.

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat 2 dalam Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Bekasi, Puncak, Cianjur bahwa areal reklamasi merupakan zona terbangun paling tinggi 40% dan/ atau konstruksi bangunan di atas air secara bertahap dengan memperhatikan fungsinya. Selanjutnya zona tersebut terdapat jarak titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter. Selain itu, dalam melakukan reklamasi juga harus mempertimbangkan karakteristik areal lingkungan<sup>6</sup>.

Kemudian menurut Kodoatie dan Syarief yang dimaksud dengan wilayah pesisir atau pantai adalah suatu wilayah yang berada di tepi laut sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi<sup>7</sup>. Pada wilayah ini terdiri atas daratan dan perairan. Di samping itu, Kodoatie dan Syarief juga menambahkan bahwa terdapat pula yang disebut dengan sempadan yang merupakan wilayah di sepanjang pantai yang dimanfaatkan untuk pengamanan dan pelestarian pantai<sup>8</sup>. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa wilayah pesisir meliputi ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras pengaruhi lautnya. Dalam pelaksanaannya dijelaskan juga bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/ kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/ kota<sup>9</sup>.

Peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah terkait proyek reklamasi Pantura Jakarta, jika diamati sudah memiliki rencana yang matang dan kuat. Akan tetapi, wilayah pesisir yang dibangun sebagai tempat reklamasi merupakan areal lingkungan yang kompleks di wilayah

---

<sup>6</sup> Pasal 42 ayat 2 (b) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

<sup>7</sup> Robert J. Kodoatie dan Roestam Syarief, *Tata Ruang Air* (Yogyakarta: C.V Andi OFFSET, 2010), hlm. 319.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diakses dari [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_27\\_2007.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_27_2007.pdf) pada tanggal 22 Oktober 2014.

Jakarta Utara. Menurut Dwiyanto dalam suatu wilayah yang kompleks, terdapat banyak regulasi, aktor, institusi, tradisi dan kepentingan yang berbeda-beda di dalamnya<sup>10</sup>. Dengan demikian, dalam wilayah pesisir terdapat juga berbagai kepentingan, yang diantaranya sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan masyarakat maupun tempat mencarinya nafkah kehidupan bagi nelayan. Pada area pesisir tersebut telah berkembang kehidupan nelayan dalam membangun perekonomian keluarganya dengan bekerja di sekitar pesisir untuk memperoleh sumber daya hayati yang dapat kembali dijual, terutama sebagai pangan<sup>11</sup>. Sumber daya hayati tersebut merupakan bagian dari ekosistem. Ekosistem sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:

*“... kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.”<sup>12</sup>*

Pada wilayah pesisir Pantura Jakarta yang kompleks tersebut, terdapat makhluk hidup yang saling bergantung, diantaranya ialah nelayan dan ikan. Nelayan menurut Zulkarnain ialah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi menangkap ikan, hewan air lainnya maupun tanaman air<sup>13</sup>. Sedangkan ikan merupakan hewan yang termasuk ke dalam ekosistem di sekitar pesisir, sehingga ikan juga turut menjaga keseimbangan dari ekosistem. Namun akibat dari reklamasi di Pantura Jakarta, hal ini telah mengubah habitat dari ikan dan menghilangkan kesempatan nelayan untuk mencari ikan. Hilangnya kesempatan ini karena nelayan terancam pengusuran dan hilangnya akses melaut pada

---

<sup>10</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm.5, dalam Eny Purwanti, *Dinamika Konflik Dalam Formulasi Kebijakan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 di Kabupaten Magetan*, diakses dari <http://map.pasca.uns.ac.id/?p=42> pada tanggal 14 Oktober 2014.

<sup>11</sup> Yayat Supriatna, “Reklamasi Pantura Jakarta” *Kompas*, 3 September 2002.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>13</sup> Zulkarnain, dalam mata kuliah “Dasar-dasar Perikanan Tangkap bagian Teknologi Penangkapan Ikan”, 27 September 2010.

nelayan, serta lahan tangkap ikan. Perihal ini merupakan dampak negatif dari proyek reklamasi di Pantura Jakarta.

Walaupun demikian, proyek reklamasi ini juga memiliki dampak positif bagi lingkungan Jakarta. Dampak positif ini diantaranya *pertama*, mengintegrasikan pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang selama ini tengah berjalan; *kedua*, menyediakan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kota Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan seluas 2.700 ha; *ketiga*, memberdayakan dan meningkatkan daya tarik pantai lama termasuk pelestarian unsur-unsur kota yang merupakan *urban heritage*<sup>14</sup>; dan *keempat*, menjadikan wilayah Pantura Jakarta sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir Jakarta dan sumber penyediaan air baku di kawasan tersebut. Penanggulangan banjir ini dengan membangun “*National Coastal Integrated Capital Development (NCICD/ Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara)*” yang difungsikan untuk mengatasi air rob atau air pasang laut di wilayah Utara Jakarta<sup>15</sup>.

Proyek reklamasi yang terdiri dari 17 Pulau yang akan dibangun oleh berbagai pihak pengembang, juga akan dibangun bersama NCICD yang difungsikan sebagai waduk lepas pantai untuk penyediaan sumber air baku dan dinding laut tinggi. Selanjutnya pengembangan proyek ini akan membangun kawasan Pantura Jakarta seluas 5100 ha yang dimulai pada tahun 2015 dengan pembangunan 17 pulau reklamasi yang akan terbagi dalam tiga kawasan. Pembagian ini terdiri dari, yakni *pertama* bagian barat yang merupakan pemukiman dengan intensitas sedang. Pada wilayah bagian barat ini, kegiatan rekreasi dan komersial bersifat terbatas. *Kedua*, bagian tengah adalah tempat pusat perdagangan jasa skala internasional, pusat rekreasi atau wisata dan pemukiman dengan

---

<sup>14</sup>Lestario Widodo, Mukaryanti, Herman C.B. Edyanto, Sri Handoyo, Suprpto, “Kajian aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta”, Prosiding Workshop Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: BPPT, 2004, Hlm.110.

<sup>15</sup> Lenny Tristia Tambun, “NCICD Tipe A untuk Atasi Banjir Rob di Utara Jakarta”, dalam Beritasatu.com diakses dari <http://www.beritasatu.com/aktualitas/216108-ncicd-tipe-a-untuk-atasi-banjir-rob-di-utara-jakarta.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.

intensitas tinggi. *Ketiga*, bagian timur dijadikan sebagai pusat distribusi barang, pelabuhan, industri, pergudangan, serta pemukiman dengan intensitas rendah sebagai penunjang<sup>16</sup>.

Penyelenggaraan reklamasi yang dianggap membawa dampak positif bagi Pemprov DKI, pada kenyataan dianggap sebagai hal yang negatif bagi masyarakat Pantura Jakarta yang memiliki profesi sebagai nelayan. Sejak tahun 2003, rencana reklamasi Pantura Jakarta telah membuat masyarakat khawatir akan terganggunya mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh nelayan ialah sebagian besar mereka merupakan nelayan yang mengandalkan laut dalam jarak 1 Km. Hal ini menunjukkan bahwa reklamasi pantai akan membuat nelayan pergi melaut jauh lebih dari 1 Km<sup>17</sup>.

Disamping kekhawatiran tersebut, reklamasi Pantura Jakarta telah menimbulkan konflik kepentingan sejak dikeluarkannya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa surat keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Alasan dikeluarkan keputusan ini adalah timbulnya isu pokok akibat dari Reklamasi Pantura untuk DKI Jakarta. Isu pokok tersebut yakni potensi banjir; ketersediaan bahan urukan; pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada; perubahan pemanfaatan lahan; ketersediaan air bersih; sistem pengelolaan sampah; dan pengelolaan sistem transportasi<sup>18</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 2006 sebanyak kurang lebih 500 orang nelayan melakukan demonstrasi menuntut penghentian reklamasi Pantura

---

<sup>16</sup> "Pembangunan atas Nama Bencana", dalam Organisasi Ruang Jakarta – RUJAK.ORG diakses dari <http://rujak.org/tag/nelayan/> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>17</sup> "Rencana Reklamasi Cemaskan Warga Marunda", dalam TEMPO.CO di akses dari <http://www.tempo.co/read/news/2003/11/05/05727957/rencana-reklamasi-cemaskan-warga-marunda> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>18</sup> "Pertanyaan-pertanyaan Seputar Persidangan Kasus Proyek Reklamasi Pantura Jakarta", dalam website Kementerian Lingkungan Hidup diakses dari <http://www.menlh.go.id/pertanyaan-pertanyaan-seputar-persidangan-kasus-proyek-reklamasi-pantura-jakarta/> pada tanggal 12 Oktober 2014.

Jakarta. Demonstrasi ini dikarenakan digusurnya secara paksa 93 bagan<sup>19</sup> dan jaring ternaknya yang dimiliki oleh nelayan, sehingga ratusan nelayan kehilangan mata pencaharian<sup>20</sup>. Demonstrasi ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi begitu juga ditahun berikutnya seperti tahun 2008, di mana para nelayan berdemo di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, dengan menyatakan bahwa selama lima tahun dilakukannya reklamasi menambah kesengsaraan dari nelayan. Nelayan menjelaskan bahwa sekarang ini berbagai macam limbah dan sampah memenuhi perairan Jakarta Utara, sehingga para nelayan harus melaut sekitar 5 Km ke laut bebas<sup>21</sup>. Dengan adanya proyek reklamasi, nelayan juga menjadi terbatas akses menuju laut karena adanya kavling kawasan industri yang diawasi keamanan yang berada di depan permukiman mereka<sup>22</sup>.

Pada tahun 2012 dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Rofi Munawar anggota dari Komisi IV DPR menyampaikan bahwa perilaku industri telah mematikan budidaya kerang hijau dan merusak ekosistem sekitar yang menyebabkan air berwarna merah kecoklatan. Hal ini mengakibatkan ikan, kepiting, udang dan bahkan kerang hijau mati. Sedangkan, volume sampah terapung di perairan teluk Jakarta berkisar antara 20.428m<sup>3</sup> – 28.453m<sup>3</sup>. Pada akhirnya, proyek reklamasi ini hanya memandang aspek pembangunan fisik semata<sup>23</sup>. Hal ini dikarenakan dengan menumpuknya sampah maupun sedimen akibat pengurukan, menurut Ambo menyebabkan biota laut sekelilingnya mati karena tertutup pasir reklamasi. Di samping itu, penghasilan Ambo selama 2013-2014 menjadi

<sup>19</sup> Bagan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tiang dan kayu palang pada para-para penjemur ikan.

<sup>20</sup> Inggried Dwi W (ed.), "Ratusan Nelayan Menuntut Penghentian Reklamasi Pantura Jakarta", dalam News.Liputan6.com diakses dari <http://news.liputan6.com/read/119421/ratusan-nelayan-menuntut-penghentian-reklamasi-pantura-jakarta> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>21</sup> "Pesisir Utara Jakarta: Kisah Warga Pesisir yang Kian Tersisih", Suara Pembaruan diakses dari <http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2008/12/18/files/assets/basic-html/page7.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>22</sup> Imanuel More, "Reklamasi Cemaskan Nelayan Marunda" diakses dari <http://tekno.kompas.com/read/2011/10/27/14404432/reklamasi.cemaskan.nelayan.marunda> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>23</sup> "Penataan Pantai Utara Jakarta, Nasib Nelayan Terbaikan", dalam Suara Pembaruan, 18 Desember 2008 diakses dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/31405-penataan-pantai-utara-jakarta-nasib-nelayan-terbaikan.html> pada tanggal 22 Oktober 2014.

menurun, yang biasanya mendapat 7-8 juta per bulan kini hanya 1 juta rupiah saja<sup>24</sup>.

Berdasarkan hal di atas, para nelayan merasa terabaikan apalagi jika menggunakan perahu layar dengan kapasitas kecil mengalami kesulitan untuk menempuh jarak jauh. Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan bahwa nelayan di Indonesia di dominasi oleh armada tradisional. Armada tradisional ini menurut Connie mencakup perahu tanpa motor sebesar 50%, motor tempel sebesar 26%, dan kapal motor kurang dari lima GT (*gross tonnage*) sebanyak 16%<sup>25</sup>. Pernyataan Connie tersebut memperlihatkan bahwa benar adanya jika nelayan akhirnya melakukan demonstrasi akibat mereka merasa sulit untuk memancing jarak yang jauh.

Pada 15 Oktober 2014, para nelayan kembali berdemonstrasi di Bundaran HI untuk menolak rencana pembangunan NCICD. Reklamasi 17 pulau yang termasuk didalamnya<sup>26</sup> telah memperkuat penolakan nelayan terhadap reklamasi. Penolakan ini timbul akibat adanya kekhawatiran dari nelayan sebagaimana yang dikatakan oleh Iyus nelayan Muara Angke yang ikut dalam demonstrasi tersebut bahwa adanya kekhawatiran bagi nelayan kecil akibat proyek tersebut tidak bisa melaut lagi<sup>27</sup>. Nelayan beranggapan bahwa reklamasi hingga saat ini hanya untuk melindungi pengembang perumahan mewah dan sejumlah gudang milik pengusaha di sepanjang Pantura Jakarta<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Untung Widyanto dan Hussein Abri Yusuf, "Laporan Utama: Comberan Raksasan di Utara Jakarta", Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015, hlm. 41.

<sup>25</sup> Denny Armandhanu, "Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia: Wawancara dengan Connie Rahakundini Bakrie", dalam website CNN Indonesia diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012-112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia/> pada tanggal 5 November 2014.

<sup>26</sup> "Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,6 Triliun untuk NCICD" dalam Tribun News diakses dari <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2014/10/07/pemprov-dki-anggarkan-rp-16-triliun-untuk-ncicd> pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>27</sup> "Penolakan "Giant Sea Wall" Menguat", dalam Koran Jakarta diakses dari <http://koran-jakarta.com/?22165-penolakan%20%E2%80%9Cgiant%20sea%20wall%E2%80%9D%20menguat> pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap potensi konflik yang timbul antara masyarakat nelayan di wilayah pesisir Pantura Jakarta terhadap pembangunan reklamasi yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam dua tahun terakhir ini, proyek reklamasi wilayah pesisir di Indonesia telah menimbulkan konflik lahan dengan para nelayan. Adapun contoh dari konflik lahan wilayah pesisir ini adalah reklamasi di Pantai Sario Tumpaan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada 19 Oktober 2013, beberapa nelayan terluka akibat bentrok dengan pihak keamanan PT Kembang Utara sebagai pihak pengembang proyek reklamasi yang dinilai telah menyalahi aturan perjanjian kerja sama antara pengembang dan pemerintah kota<sup>29</sup>. Selain itu, terdapat pula konflik lahan di wilayah pesisir pantai yang terjadi antar nelayan dengan petugas Satpol PP hingga terjadi aksi saling dorong saat berdemo penolakan reklamasi Pantai Banten<sup>30</sup>.

Reklamasi wilayah pesisir Pantura Jakarta memang telah lama dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Walaupun berbagai penolakan atas pembangunan reklamasi telah dilakukan, nampaknya tidak akan pernah menyurutkan niat tersebut. Selain itu, protes maupun demonstrasi yang dilakukan oleh nelayan Pantura Jakarta dinilai selalu tertib dibandingkan wilayah reklamasi lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hendra bahwa mereka dapat berdialog dengan baik kepada pihak pengembang yang melakukan reklamasi di Pantura Jakarta<sup>31</sup>. Namun demikian, hal ini tetap dapat menimbulkan konflik jika pada akhirnya ratusan nelayan Pantura Jakarta akan digusur secara besar-besaran dan tidak memiliki kejelasan akan pekerjaan barunya nanti. Pada akhirnya akan

---

<sup>29</sup> "Konflik Reklamasi Pantai Sario Tumpaan, DPRD Segera Tinjau Lapangan", dalam [ciputranews.com](http://www.ciputranews.com) diakses dari <http://www.ciputranews.com/external/www.mongabay.co.id/2013/11/05/konflik-reklamasi-pantai-sario-tumpaan-dprd-segera-tinjau-lapangan/> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>30</sup> Amba Dini Sekamingrum, "Warga Pantura Demo Tolak Reklamasi Pantai Banten", dalam [news.okezone.com](http://news.okezone.com) diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/03/05/501/587469/warga-pantura-demo-tolak-reklamasi-pantai-banten> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>31</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Hendra dan Nelayan Agus pada tanggal 10 April 2015 di Kamal, Jakarta Utara.

menimbulkan kemiskinan, serta susahya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan menimbulkan konflik sosial<sup>32</sup>.

Menurut Hesti seorang pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung, terkait proyek reklamasi perlu adanya suatu komunikasi yang baik. Ia menjelaskan karena dalam proyek reklamasi terdapat dampak negatif yang perlu dikendalikan dengan memahami manfaat reklamasi yang dibutuhkan di Jakarta. Apalagi menurut dirinya bahwa reklamasi yang dilakukan di Jakarta akan menjadi pembicaraan yang ramai di media karena hal ini menunjukkan perhatian publik terhadap proyek tersebut<sup>33</sup>.

Berdasarkan pernyataan Hesti tersebut, peneliti berasumsi bahwa pencegahan konflik lahan wilayah pesisir Pantura Jakarta dapat dilakukan melalui komunikasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat daerahnya kepada nelayan. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tentunya harus bersifat strategis. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mendekati pada analisa komunikasi strategis. Adapun pengertian dari komunikasi strategis menurut McKee bahwa komunikasi strategis merupakan usaha komunikasi yang dilakukan untuk menyadari konteks lokal dan mendukung banyaknya pendekatan komunikasi sebagai rangsangan ke arah perilaku positif dan terukur pada suatu perubahan sosial<sup>34</sup>.

Adapun pendapat lain, menurut Guerrero-Castro seorang pakar komunikasi strategis menyatakan bahwa penggunaan komunikasi strategis merupakan suatu pilihan yang tepat karena untuk memfokuskan pada suatu sasaran vital dari negara<sup>35</sup>. Peneliti melakukan penelitian

---

<sup>32</sup>Bambang Marwanta, "Dampak Bencana pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta" dalam Jurnal Alami, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2003, hlm.51.

<sup>33</sup>Septian Deny, "Masyarakat Tak Perlu Takut dengan Reklamasi", diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2213845/masyarakat-tak-perlu-takut-dengan-reklamasi> pada tanggal 15 April 2015.

<sup>34</sup>N. McKee, Motivation to act: Effective communication (2000), in N. McKee, E. Manoncourt, S. Y. Chin, & R. Carnegie (Eds.), *Involving People, Evolving Behaviour*, pp. 108-109. New York and Penang: Southbound, UNICEF; and: McKee, N., Bertrand, J. T., & Becker-Benton, A. *Strategic communication in the HIV/AIDS epidemic* (New Delhi: Sage, 2004).

<sup>35</sup>Cristian E. Guerrero-Castro, "Strategic Communication for Security and National Defense: Proposal for an Interdisciplinary Approach", *The Quarterly Journal*, Spring 2013, p.31.

dengan menggunakan komunikasi strategis ini sebagai usaha mencegah konflik lahan akibat reklamasi di Pantura Jakarta karena wilayah tersebut merupakan kawasan strategis bagi Provinsi DKI Jakarta, sekaligus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang terdapat berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang beragam termasuk obyek vital<sup>36</sup>.

Menurut peneliti bahwa komunikasi strategis yang dilakukan ini diharapkan dapat membuka wawasan dari nelayan terkait reklamasi, serta dapat menjelaskan baik dan buruknya dalam proses tersebut secara persuasif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hesti sebelumnya bahwa dalam pembangunan ini memang diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai reklamasi dengan suatu komunikasi yang intensif. Oleh sebab itu, pengetahuan yang rendah terkait reklamasi jika dibantu dengan komunikasi strategis yang efektif akan merubah tindakan penerima pesan, yakni nelayan untuk mendukung pembangunan di Pantura Jakarta.

Relevansi penelitian ini dengan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik ialah mengamati dari sisi aspek konflik yang dapat dicegah melalui komunikasi strategis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat daerahnya dapat mencegah konflik lahan di wilayah pesisir Pantura Jakarta. Mengingat wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari frekuensi kejadian konflik sosial<sup>37</sup>. Di samping itu, penelitian ini juga berkaitan dengan pertahanan nasional. Alasannya ialah dalam suatu unsur pertahanan nasional, diperlukan suatu ketahanan masyarakat yang baik dan kuat karena merupakan pertimbangan strategis yang menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing<sup>38</sup>. Selain itu,

---

<sup>36</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam bagian Menimbang a.

<sup>37</sup> Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017, hlm.79.

<sup>38</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Tahun 2008, hlm. 43.

kondisi yang aman merupakan syarat utama untuk pembangunan nasional, sehingga kedepannya pertahanan menjadi optimal.

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan pustaka penelitian terdahulu terkait konflik lahan di wilayah Pantura Jakarta dan komunikasi strategis. Adapun penelitian tersebut berjudul “*Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Pantai Utara Jakarta*”. Penelitian yang dilakukan oleh Rudianto ini terfokus pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dengan yang mampu mendapatkan sebidang lahan yang murah dan mudah mendapatkan mata pencaharian sebagai nelayan atau petani tambak. Rudianto menggunakan teori *General Algebraic Modeling System* (GAMS) untuk mengetahui hitungan nilai rente lahan. Di samping itu, ia juga menggunakan persamaan regresi dan *game theory* untuk memperoleh resolusi konflik penelitiannya. Selain penelitian Rudianto, terdapat juga hasil *workshop* yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bertemakan “Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan”. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, hal yang membedakan dengan penelitian peneliti ialah teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori komunikasi strategis sebagai usaha pencegahan konflik yang terjadi. Selain itu, perkembangan permasalahan ketika kedua penelitian tersebut dilakukan dengan kenyataan potensi konflik saat ini dinilai berbeda. Sedangkan penelitian Lee E. Bokma dengan judul “*Strategic Communication for Tactical Leaders*”, memiliki perbedaan pada fokus yang diteliti. Bokma dalam penelitiannya menganalisis peran dari pemimpin di tingkat taktis terhadap operasi militer dengan menggunakan komunikasi strategis.

### **1.1. PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis keadaan dari nelayan dengan adanya reklamasi Pantura Jakarta. Kesiapan Pemprov DKI Jakarta terhadap reklamasi melalui kebijakan yang ada

seharusnya tidak lagi membuat nelayan merasa sengsara hingga melakukan protes. Di samping itu, ketika semua faktor teknis dalam menunjang reklamasi di Pantura Jakarta sudah terselesaikan dengan baik melalui pembuatan kebijakan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku, maka perlu melakukan analisis dengan menggunakan komunikasi strategis dalam mencegah potensi konflik lahan dengan nelayan. Oleh sebab itu, rumusan masalah ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana komunikasi strategis yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada nelayan sebagai upaya pencegahan konflik lahan wilayah pesisir Pantura Jakarta?
- b. Bagaimana dampak dari komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap para nelayan?

## **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini pada umumnya adalah untuk menganalisis bagaimana membangun komunikasi strategis sebagai upaya pencegahan konflik sosial dalam masyarakat. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu analisis dan hasil penelitiannya dapat menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan berupa rekomendasi dan saran. Adapun tujuan khusus penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Menganalisis langkah komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya mencegah konflik lahan wilayah pesisir Pantura Jakarta dengan nelayan sekitar akibat reklamasi.
- b. Mengidentifikasi dampak dari komunikasi strategis yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap para nelayan sebagai bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan komunikasi.

### **1.3. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang damai dan resolusi konflik yang mengaplikasikan komunikasi strategis sebagai bagian dari cara pencegahan maupun solusi konflik yang diakibatkan oleh suatu kebijakan publik Pemerintah daerah yang diimplementasikan ditengah masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi maupun pertimbangan terhadap pelaksanaan komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik, sehingga dalam mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dapat terlaksana dengan damai.

### **1.4. RUANG LINGKUP DAN GAMBARAN DESAIN PENELITIAN**

#### **1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus terhadap pencegahan konflik yang terjadi akibat reklamasi Pantura Jakarta yang akhir-akhir ini nelayan melakukan demonstrasi penolakan atas proyek tersebut. Adapun cara pencegahan konflik yang ingin dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dari komunikasi strategis. Selain itu, peneliti juga akan mengidentifikasi dampak dari komunikasi strategis yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap nelayan yang diambil lahan kerjanya untuk proyek reklamasi Pantura Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terbukanya konflik sosial yang terjadi ketika terjadi penggusuran terhadap para nelayan.

### **1.5.2. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

**BAB 1: Pendahuluan.** Pada bab ini akan dijelaskan subbab berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran.** Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan penelitian yaitu teori mengenai komunikasi strategis yang digunakan sebagai analisis pencegahan konflik di wilayah Pantura Jakarta; teori konflik yang digunakan untuk menganalisa fase konflik yang terdapat di lingkungan nelayan di Pantura Jakarta; dan pengertian nelayan yang digunakan peneliti sebagai pendukung dari teori utama. Kemudian terdapat juga kerangka pemikiran.

**BAB 3: Metode Penelitian.** Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian berupa teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi. Kemudian terdapat juga teknik analisis data, sumber data penelitian, desain penelitian, dan prosedur penelitian.

**BAB 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengolahan data hasil penelitian dan analisisnya terhadap teori yang digunakan.

**BAB 5: Simpulan dan Saran.** Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan refleksi kritis mengenai keunggulan dan kelemahan dari penelitian ini.

## BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan beberapa teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian, yaitu teori konflik, komunikasi strategis, dan penjelasan mengenai nelayan. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu sebagai perbandingan proses penelitian peneliti dengan peneliti lainnya.

#### 2.1.1. Teori Konflik

Konflik menurut Persaud dan Turner adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih di mana satu atau semua merasakan penolakan akan hak, ataupun sumber daya maupun ketidakmampuan untuk memperoleh keadilan yang mengakibatkan timbulnya kemarahan, sakit hati, kebencian dan tindakan verbal dan kekerasan, serta reaksi yang mengakibatkan perkelahian antar sesama manusia hingga kerusakan properti<sup>39</sup>. Burton mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan yang disengaja oleh beberapa pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengalahkan atau menghapus orang-orang atau kelompok yang mungkin mendapatkan status, kekuasaan, sumber daya dan nilai data langka lainnya. Sehingga Burton mengatakan bahwa pusat konflik berada pada nilai-nilai dan kebutuhan.<sup>40</sup> Namun demikian, pendapat lain mengatakan bahwa konflik dapat memberikan suatu kesempatan seperti pertumbuhan pribadi,

---

<sup>39</sup> Ganga Persaud and Trevor Turner, "Education and Conflict Resolution for Democratization, Economic Development and Governance in Guyana", in Cedric H. Grant and R. Mark Kirton, *Governance, Conflict Analysis and Conflict Resolution* (Jamaica: Ian Randle Publishers, 2007), hlm.417.

<sup>40</sup> Thabani Ka Sigogo Sibanda, *Conflict Issues Across Disciplines, Conflict, Negotiation and Mediation: African Experiences* (UK: Xlibris Corporation, 2010), hlm.11.

pengembangan relasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang terjadi<sup>41</sup>.

Di dalam teori konflik terdapat fase yang menetapkan keberadaan dari suatu konflik yang terjadi. Ichsan Malik menjelaskan bahwa ada enam fase konflik yang menentukan detail dari eskalasi maupun de-eskalasi konflik, yaitu<sup>42</sup>:

Persengketaan atau Perdebatan (*dispute*), merupakan tahap yang paling rendah dalam suatu konflik. Pada fase ini belum terjadi kekerasan, namun telah terdapat perbedaan kepentingan dan posisi sehingga menimbulkan beberapa tuntutan.

Krisis (*crisis*), pada fase ini belum terjadi kekerasan. Akan tetapi hubungan pihak yang bertikai semakin parah dan pengambilan keputusan yang cepat pada informasi yang terbatas sering dilakukan oleh pihak tertentu.

Kekerasan terbatas (*limited violence*), fase ini sudah mulai terjadi kekerasan, seperti penindasan, perkelahian satu lawan satu, kekerasan bersenjata tak terduga terjadi.

Kekerasan Masal (*mass violence*), telah membuka intervensi internasional, karena fase ini merupakan konflik terbuka dan bisa saja terjadi pembunuhan massal terhadap warga sipil tak bersenjata.

Penurunan (*abatement*), dalam fase ini adanya upaya untuk menurunkan tingkat konflik melalui penghentian sementara kekerasan.

Penyelesaian (*settlement*), fase terakhir ini menunjukkan bahwa pihak yang bertikai telah membuat kesepakatan damai dalam waktu jangka panjang.

---

<sup>41</sup> John G. Oetzel and Stella Ting-Toomey (ed.), *The SAGE Handbook of Conflict Communication: Integrating Theory, Research, and Practice* (California: Sage Publication, Inc, 2006), hlm. xi.

<sup>42</sup> Ichsan Malik, *Training Manual: Peace Building and Conflict Prevention* (Jakarta: SERAP, 2008) hlm. 94.

Selanjutnya Malik juga mengidentifikasi sumber konflik yang ada di Indonesia. Sumber-sumber konflik tersebut terdiri dari<sup>43</sup>:

Konflik struktural, yakni ketika terjadinya perbedaan untuk mengakses dan mengontrol sumber daya alam seperti tanah, mineral maupun hutan, kelompok penguasa dan mereka yang memiliki wewenang formal untuk menetapkan peraturan umum, serta cenderung untuk memonopoli akses tanpa memperhatikan kepentingan lainnya.

Konflik kepentingan, yaitu adanya kompetisi yang terjadi antara kelompok-kelompok dengan memanipulasi keadaan. Biasanya konflik ini terjadi akibat dari masalah dasar seperti mengenai prosedur peraturan, ekonomi, atau masalah psikologi.

Konflik nilai, maksudnya ialah disebabkan oleh perbedaan sistem nilai di antara kelompok-kelompok. Nilai ini biasanya terkait dengan keyakinan seseorang yang memberikan makna dalam hidupnya.

Konflik sosial-psikologis, artinya dalam konflik ini terdapat prasangka yang dibentuk paling ekstrim sehingga menimbulkan hasutan, kebencian yang kuat terhadap orang asing.

Konflik data, merupakan konflik yang terjadi ketika ada kekurangan informasi untuk membuat keputusan informasi dengan baik, memperoleh informasi yang salah, perselisihan yang diakibatkan penggunaan informasi, salah menerjemahkan informasi, atau perbedaan metodologi dan analisis.

Berdasarkan fase yang dijelaskan oleh Malik di atas, maka penelitian ini termasuk ke dalam fase pertama, yakni *dispute*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, konflik lahan wilayah pesisir di Pantura Jakarta masih pada tahapan yang memperlihatkan adanya tuntutan dari nelayan. Sedangkan, sumber konfliknya berasal dari struktural, karena permasalahannya terdapat pada

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Ichsan Malik, hlm. 38-40.

lahan wilayah pesisir. Oleh karena itu, sebelum terjadinya konflik ke fase yang lebih tinggi maka diperlukan pencegahan konflik.

Pencegahan konflik tujuannya ialah mengacu pada berbagai kegiatan yang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik. Menurut Micahel Lund bahwa pencegahan konflik secara struktural berarti menjaga agar perselisihan tidak meningkat menjadi kekerasan yang signifikan dan mencegah adanya kekuatan bersenjata, serta berusaha memecahkan permasalahan dengan damai<sup>44</sup>. Pencegahan konflik juga dibagi ke dalam dua bagian, yakni pencegahan langsung dan struktural. Pencegahan konflik secara langsung mengarah kepada langkah yang bertujuan untuk mencegah jangka pendek, mencegah yang mungkin segera terjadi, serta mencegah eskalasi potensi konflik. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan mediator atau penarikan pasukan militer. Sedangkan pencegahan struktural berfokus terhadap langkah jangka panjang yang mengatasi penyebab dari potensi konflik, seiring dengan adanya eskalasi dan faktor pemicu. Adapun contohnya ialah bantuan pembangunan ekonomi atau peningkatan partisipasi politik<sup>45</sup>.

Teori konflik dalam penelitian ini merupakan teori pendukung untuk memperlihatkan adanya ancaman konflik di Pantura Jakarta. Namun, dalam mencegah konflik lahan wilayah pesisir di Pantura Jakarta, peneliti akan menggunakan komunikasi strategis sebagai teori utama untuk menganalisa komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penggunaan komunikasi ini karena konflik pada awal mulanya diekspresikan melalui komunikasi yang berupa pesan bersifat verbal dan nonverbal. Oleh karena itu, sarana untuk mengelola dan mengatasi konflik juga dapat melalui komunikasi<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> "Conflict Prevention", dalam website *European Peacebuilding Liaison Office* diakses dari <http://www.eplo.org/definitions.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>45</sup> Niklas L.P. Swanström and Mikael S. Weissmann, "Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration", (Sweden: Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2005), hlm. 19.

<sup>46</sup> John G. Oetzel and Stella Ting-Toomey (ed.), *The SAGE Handbook of Conflict Communication: Integrating Theory, Research, and Practice* (California: Sage Publication, Inc, 2006), hlm. xi.

### 2.1.2. Komunikasi Strategis

Komunikasi merupakan suatu proses di mana orang secara interaktif membuat, mempertahankan dan mengelola makna<sup>47</sup>. Komunikasi menurut Hovland, Janis, dan Kelly didefinisikan sebagai cara yang ditempuh oleh komunikator untuk menyampaikan stimulus guna mengubah tingkah laku orang lain (komunikasikan)<sup>48</sup>. Di samping itu, komunikasi berguna sebagai sarana solusi konflik yang kegunaannya untuk mempengaruhi (*to influence*) pihak yang terlibat dalam konflik agar mau berdamai dan memperbaiki hubungan. Adapun fungsi lain dari komunikasi ialah pemberian fakta dan informasi yang sebenarnya terjadi (*to inform*), mendidik (*to educate*) para pihak yang berselisih supaya saling menghargai dan saling memberi dukungan<sup>49</sup>. Sedangkan istilah strategis dalam komunikasi strategis sering dikaitkan dengan praktek dan taktik yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi.

Dalam konsep komunikasi strategis, dijelaskan bahwa terdapat serangkaian sistematis kegiatan berkelanjutan dan terarah, dilakukan pada tingkat strategis, operasional, dan taktis. Hal ini menyebabkan adanya pemahaman terkait sasaran serta mengidentifikasi saluran penyampaian yang efektif untuk mempromosikan dan mempertahankan jenis perilaku tertentu<sup>50</sup>. Sedangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menjelaskan definisi dari komunikasi strategis yaitu:

*“Strategic communication is the alignment of multiple lines of operation (e.g., policy implementation, public affairs, force movement, information operations, etc.) that together generate effects to support national objectives. Strategic communication essentially means sharing meaning (i.e., communicating) in support of national objectives (i.e., strategically). This involves*

---

<sup>47</sup> Marianne Dainton and Elaine D. Zelle, *Applying Communication Theory for Professional Life: a Practical Introduction* (Canada: Sage Publication, Inc, 2014) hlm.2.

<sup>48</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm.2.

<sup>49</sup> Reza Mahendra Hadipranoto, Peranan Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik pada Hubungan Persahabatan Siswa SMA Sedes Sapientiae, Skripsi Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2012, hlm. 35-37.

<sup>50</sup> Paul Cornish, Julian Lindley-French and Claire Yorke, “Strategic Communications and National Strategy”, a Catham House Report, September 2011, hlm. 4.

*listening as much as transmitting, and applies not only to information, but also [to] physical communication – action that conveys meaning.<sup>51</sup>*

Di samping penjelasan di atas, komunikasi strategis juga berusaha untuk memastikan informasi yang ditransfer dari atasan ke bawahan mendapatkan suatu kepatuhan dan dapat membangun jaringan. Hal ini untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki kekuatan dalam hubungan publik. Sedangkan konsep strategisnya tergabung dalam komunikasi untuk mendesain pesan, pendekatan terhadap sistem dan penekanan pada pengembangan keterampilan. Dengan demikian, komunikasi strategis juga termasuk bagaimana suatu organisasi menampilkan dirinya dalam masyarakat sebagai aktor sosial dalam pembahasan isu-isu publik maupun penciptaan budaya masyarakat<sup>52</sup>.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan tersebut maka komunikasi strategis memiliki perbedaan dengan komunikasi. Komunikasi hanya sebatas pada penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan tujuan agar mereka dapat dipengaruhi. Sedangkan komunikasi strategis memiliki proses yang berkelanjutan dan membentuk komunikasi antar lembaga dengan tujuan menjalankan kebijakan organisasi tersebut, sehingga dapat mengimplementasikan kepada sasarannya.

Secara sederhana dalam membedakan komunikasi dengan komunikasi strategis ialah adanya poin-poin prinsip yang menjelaskan pemahaman dari komunikasi strategis. Menurut Deputy Asisten Menteri Pertahanan AS poin prinsip tersebut dapat membantu dialog serta mengarahkan komunikasi strategis<sup>53</sup>. Prinsip tersebut terbagi menjadi

---

<sup>51</sup> US Department of Defense, *Strategic Communication: Joint Integrating Concept* (Washington, DC: Department of Defense, 7 October 2009), hlm. ii.

<sup>52</sup> Kirk Hallahan, Derina Holtzhausen, Betteke van Ruler, Dejan Verčič, and Krishnamurthy Sriramesh, "Defining Strategic Communication", *International Journal of Strategic Communication*, 2007, hlm.3-35.

<sup>53</sup> "Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy" version 3.0 US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center, 24 June 2010, p. (A-1) – (A-3).

sembilan prinsip. Adapun penjelasan prinsip-prinsip tersebut dalam membangun komunikasi strategis adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

**Pertama** ialah Kepemimpinan (*Leadership-Driven*). Kepemimpinan ini berada pada posisi paling atas dan menjelaskan bahwa pemimpin harus secara tegas terlibat dan mendorong proses dari komunikasi strategis. Penempatan pemimpin pada posisi tersebut untuk memastikan integrasi komunikasi menjadi inti dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan kesuksesan dari komunikasi strategis berdasarkan dari mengintegrasikan tindakan, kata-kata, dan gambar dapat dimulai dengan bimbingan dari suatu kepemimpinan yang jelas.<sup>55</sup>

**Kedua** ialah Kredibilitas dan konsistensi merupakan dasar dari komunikasi yang efektif. Kedua hal tersebut membangun tindakan, gambar, dan kata-kata yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan secara internal maupun eksternal. Sedangkan kredibilitas juga diperlukan dalam berkomunikasi dengan orang lain, hal ini supaya dapat membangun suatu keadaan yang dapat dipercaya.<sup>56</sup>

**Ketiga** ialah dituntut untuk memahami dari sikap, budaya, identitas, perilaku, sejarah, perspektif dan sistem sosial. Pada poin ini dikatakan "*what we say, do, or show, may not be what others hear or see*", hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan akan membentuk persepsi dan penilaian oleh mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Kita harus memahami bahwa konsep nilai moral tidak mutlak, tetapi relatif terhadap rencana sosial dan budaya individu. Audiens atau para pendengar akan menentukan arti dengan menginterpretasi komunikasi kita dengan mereka. Sehingga apa yang kita katakan, lakukan, atau yang ditunjukkan kepada mereka, mungkin tidak seperti apa yang mereka dengar atau lihat.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Bertindak tanpa memahami pemirsa dapat menyebabkan kesalahpahaman kritis dengan konsekuensi serius.<sup>57</sup>

**Keempat** ialah membangun dialog dalam beraneka segi untuk menyesuaikan pemahaman dan hubungan. Komunikasi yang efektif memerlukan dialog antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini diupayakan agar adanya respon secara aktif bagi yang mendengarkan, yang terlibat dan mengejar saling pengertian yang mengarah pada pembangunan kepercayaan. Oleh sebab itu, pemimpin harus mengambil keuntungan dari hubungan ini untuk menempatkan kebijakan dan tindakan dalam konteks sebelum terjadinya suatu peristiwa.<sup>58</sup>

**Kelima** ialah meresapi (*pervasive*) setiap tindakan, gambar dan kata yang mengirimkan sebuah pesan. Dalam hal ini komunikasi tidak lagi terdapat batas ruang dan waktu, sehingga semua aktor adalah komunikator secara sadar atau tidak. Pada prinsip ini, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin bahwa semua komunikasi yang dibangun memiliki dampak strategis. Walaupun dalam komunikasi tersebut nantinya akan ada audiens yang tidak diinginkan yang tidak dapat dihindari dalam lingkungan informasi global. Oleh karena itu, meresapi ini menjadi hal yang perlu dicermati dan berpikir akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan memperhatikan urutan hasil tindakan komunikasi mereka.<sup>59</sup>

**Keenam** ialah kesatuan usaha (*Unity of Effort*), merupakan keterpaduan dan terkoordinasi secara vertikal dan horizontal. Komunikasi Strategis adalah konsisten, proses kolaboratif yang harus terintegrasi secara vertikal dari strategis melalui tingkat taktis, dan horizontal di pemangku kepentingan. Pemimpin mengkoordinasikan dan menyinkronkan kemampuan beserta instrumen kekuasaan dalam bidang tanggung jawab, wilayah pengaruh, dan bidang yang diminati untuk

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disadari karena badan ataupun organisasi tidak akan bertindak sendiri, sehingga semua partisipan mungkin memiliki dampak dan harus menjadi bagian dari integrasi komunikasi.<sup>60</sup>

**Ketujuh** ialah hasil (*result*), merupakan tindakan berbasis untuk mencapai hasil tertentu dalam mengejar keadaan akhir yang diartikulasikan dengan baik. Komunikasi strategis harus difokuskan pada pencapaian hasil tertentu yang diinginkan dalam mengejar keadaan akhir yang jelas.<sup>61</sup>

**Kedelapan** ialah tanggap (*responsive*) terhadap audiens yang tepat, memberikan pesan yang tepat, waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Respon yang cepat dan tepat waktu dengan kondisi yang berkembang memungkinkan memiliki efek strategis. Dengan ketanggapan yang dimiliki pemimpin, maka ia mampu menyelaraskan tindakan, gambar, dan kata-kata untuk mendukung kebijakan, tujuan strategis yang menyeluruh dan gambaran besar jangka panjang. Oleh karena itu, komunikasi harus menjangkau audiens yang dimaksud melalui pesan yang disesuaikan dan relevan dengan khalayak tersebut.<sup>62</sup>

**Kesembilan** ialah berkelanjutan (*continuous*), merupakan prinsip komunikasi strategis yang melakukan suatu proses penelitian dan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang berkesinambungan. Prinsip ini memperlihatkan suksesnya proses komunikasi dengan analisis yang rajin dan terus-menerus hingga memberi masukan terhadap penilaian, serta kembali lagi ke dalam perencanaan dan tindakan. Hal ini juga mendukung tujuan organisasi dengan mengadaptasi sesuai kebutuhan dan perubahan rencana.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis komunikasi strategis yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada nelayan di Pantura Jakarta digunakan teori dari Patterson dan Radtke. Teori komunikasi strategis yang dijelaskan oleh mereka merupakan langkah-langkah suatu strategi yang diimplementasikan untuk membantu lembaga mencapai tujuan program yang telah direncanakan. Adapun langkah tersebut, yakni sebagai berikut:

**Langkah pertama** ialah terkait dengan persiapan rencana. Menurut Patterson dan Radtke langkah ini sebagai "*Essential Building Blocks*". Maksud dari pernyataan tersebut ialah sebuah organisasi harus terlebih dahulu untuk membangun dan ditetapkannya misi utama melalui suatu pernyataan yang disampaikan melalui kata-kata, serta tujuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Pada langkah pertama ini, suatu organisasi harus fokus terhadap misi apa yang benar-benar ingin dilakukan. Kemudian Patterson dan Radtke menyatakan bahwa rencana strategis harus digerakan dengan nilai-nilai dasar dan tujuan yang mendefinisikan organisasi. Di samping itu, pada tahap ini perlu juga ditetapkan peran dan tanggung jawab dari anggota organisasi, antara lain seperti dewan, pejabat eksekutif yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pihak luar yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi proses perencanaan. Hal ini dilakukan agar rencana menjadi sesuai dengan misi dan tidak terhambat.<sup>64</sup>

**Langkah kedua** ialah menganalisis situasi sebagai fondasi dari rencana. Analisa terhadap lingkungan sekitar organisasi yang berada di dalam maupun di luar merupakan hal yang penting. Tujuan dari langkah ini supaya membantu aktor utama dalam organisasi menjelaskan bagaimana area di lapangan, serta mendapatkan informasi mengenai kekuatan yang akan mempengaruhi rencana dari komunikasi yang akan dibangun. Kekuatan tersebut dapat berasal dari lingkungan internal dan

---

<sup>64</sup> Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, *Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful Plan* (Wiley: New Jersey, 2009) p. 2, 26.

eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal terfokus pada kajian operasi organisasi dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri; sedangkan lingkungan eksternal menganalisis tekanan dari luar yang mempengaruhi semua tindakan organisasi, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman langsung terhadapnya. Adapun Patterson dan Radtke menjelaskan bahwa tekanan tersebut dipengaruhi oleh lima hal, yakni demografi, ekonomi, politik, teknologi dan sosial di mana kelima hal ini dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap organisasi.<sup>65</sup>

**Langkah ketiga** ialah menentukan audiens sebagai sasaran dari fokus rencana. Patterson dan Radtke memberikan petunjuk untuk menargetkan audiens kunci, yakni<sup>66</sup>:

- a) Perhatikan dan pertimbangkan tiap-tiap bagian sasaran yang paling terhubung ke misi dan nilai-nilai organisasi;
- b) Menetapkan prioritas di antara audiens yang didasarkan pada penelitian dan mendefinisikan setiap audiens yang ditargetkan sebagai sasaran utama secara terpisah;
- c) Kelompok audiens menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan nilai-nilai mereka, koneksi ke organisasi dan tindakan apa yang diinginkan serta diperlukan dari mereka; dan
- d) Pastikan bahwa terdapat banyak organisasi yang bersaing hanya untuk mendapatkan perhatian audiens.

Berdasarkan petunjuk yang diberikan, jika pemimpin dari organisasi memahami sasaran utamanya dan mengetahui apa yang penting bagi mereka, maka organisasi dapat mempertahankan hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi mengerti alasan kenapa audiens dapat peduli atau tidak dengan misi, isu dan program yang mereka buat.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.43-48.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.73.

**Langkah keempat** ialah membina dukungan audiens sebagai tujuan dari komunikasi. Patterson dan Radtke mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai upaya mendapatkan informasi mengenai apa yang diharapkan dari masing-masing sasaran audiens dan melontarkan pertanyaan “*What do we want them to do?*”. Di samping itu, menurut Wippersberg, pada langkah ini terdapat pula target komunikasi yang mengindikasikan apa yang menjadi harapan dapat diraih melalui perilaku tertentu<sup>67</sup>. Hubungan target dan tujuan komunikasi ialah tujuan memiliki ketepatan dan hasilnya terukur sehingga memberikan kontribusi pada pencapaian target. Oleh sebab itu, Patterson dan Radtke menampilkan lima hal yang menunjang keberhasilan dari langkah ini, yaitu:

- a) Spesifik (*specific*), tujuan komunikasi ialah membantu sebuah organisasi dalam penargetan apa yang dibutuhkan audiens yang ingin dicapai. Selain itu, terdapat juga tujuan daftar keluar dengan rinci terhadap bagaimana orang-orang yang hendak dicapai dan dalam kerangka waktu yang bagaimana mereka tercapai oleh kita<sup>68</sup>.
- b) Terukur (*measurable*), yakni membantu organisasi mengevaluasi efektivitas upaya mereka dan menganalisis seberapa baik dari pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini memungkinkan organisasi juga untuk mengetahui apakah tujuan yang diinginkan layak dan pengukuran akan memantau jika tujuannya terpenuhi<sup>69</sup>. Oleh sebab itu, Patterson dan Radtke mengatakan bahwa masing-masing tujuan yang terukur harus memiliki target waktu yang realistis<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Julia Wippersberg, “Change in Progress: On the Relationship of Goals and Measurement of Public Relations, Public Affairs and Advertising and Its Influence on Characteristic of Quality”, Romanian Journal of Journalism and Communication/Revista Romana De Jurnalism Si Comunicare (RRJC) 4.4, 2009, p. 64, in Christina Hoogendam, “Strategic Communications Planning for Non-Profit Organization: a Data-Based Application of Seven Step Model”, A Senior Project presented to the Faculty of the Communication Studies Departement of California Polytechnic State University, San Luis Obispo and to the San Luis Obispo Farm Bureau, San Luis Obispo, 2011, p.16.

<sup>68</sup> Christina Hoogendam, “Strategic Communications Planning for Non-Profit Organization: a Data-Based Application of Seven Step Model”, A Senior Project presented to the Faculty of the Communication Studies Departement of California Polytechnic State University, San Luis Obispo and to the San Luis Obispo Farm Bureau, San Luis Obispo, 2011, p.16.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm. 17.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.78.

- c) Pencapaian (*achievable*), tujuan yang telah dibuat tersebut harus dapat dicapai dengan memperhitungkan semua parameter maupun seluruh sarana yang menunjang.
- d) Nyata (*realistic*), tujuan yang akan dicapai haruslah mampu dikerjakan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol namun diketahui oleh kita.
- e) Keterikatan Waktu (*time-bound*), merupakan hal terakhir yang penting bagi organisasi karena memberikan tolok ukur waktu untuk mencapai dan mengukur keberhasilan. Di samping itu, kerangka waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan, seperti mengembangkan bahan, menyebarkan materi, merekrut peserta dan sebagainya<sup>71</sup>.

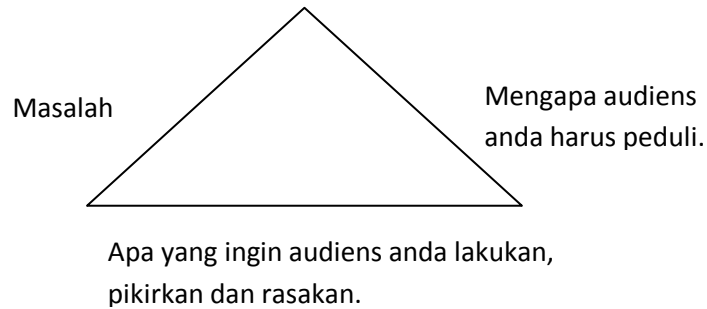
**Langkah kelima** ialah membingkai isu dan pengembangan pesan. Pengembangan pesan merupakan proses transformasi yang terdapat bagian dari suara, kata-kata, dan frase kalimat yang efektif serta mengekspresikan pemikiran. Pengembangan ini melibatkan dan juga menemui banyak elemen yang berbeda, seperti gambar, pernyataan misi, deskripsi, pesan, platform pesan, slogan maupun bingkai pesan atau isu. Dalam membingkai isu, prosesnya mengacu kepada isu-isu publik, nilai-nilai serta asumsi yang memperkuat pandangan. Pembingkaiannya ini juga mempelajari cita-cita, nilai sebelumnya dan emosi yang mungkin dapat mengasosiasikan dengan masalah<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.81.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm. 87-88.

Oleh sebab itu, Patterson dan Radtke menggambarkan pengembangan bingkai pesan menggunakan segitiga pesan yang dapat membantu membuat pesan secara persuasif untuk menarik perhatian audiens. Segitiga pesan tersebut, ialah<sup>73</sup>:



**Gambar 2.1 Segitiga Pesan**

Patterson dan Radtke menjelaskan bahwa kita dapat memulai dari kaki segitiga yang mana saja. Misalnya, dimulai dengan meminta seseorang untuk datang ke sebuah pertemuan dan kemudian menjelaskan maksud dari pertemuan ini, serta menerangkan mengapa anda berpikir orang yang datang akan mendapat manfaat dari menghadiri pertemuan. Selanjutnya mereka juga menjelaskan bahwa kaki yang berisi masalah atau isu menghubungkan antara organisasi dan audiens yang ditargetkan. Kaki berikutnya, harus mengandung informasi yang menyatakan hal ini menjadi penting bagi audiens, sehingga mereka dituntut untuk peduli. Kaki terakhir menjelaskan bahwa audiens diharapkan membuat komitmen khusus untuk masalah yang terjadi atau berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu dengan suatu kegiatan. Oleh sebab itu, pada kaki ini juga penting untuk memperhatikan perasaan, kepentingan, dan/ atau semangat yang harus diciptakan dalam tiap sasaran audiens<sup>74</sup>.

**Langkah keenam** ialah sarana dan penyebarluasan strategi sebagai usaha memajukan rencana. Setiap strategi komunikasi yang

<sup>73</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.102.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm.102-103.

digunakan oleh sebuah organisasi memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens tertentu pada waktu tertentu. Sarana penyebaran komunikasi, seperti email, *e-newsletter*, majalah, *website*, iklan, media sosial dan sebagainya akan memfasilitasi strategi penyebaran informasi. Pada langkah ini, organisasi juga perlu bertanya pada diri sendiri mengenai respon audiens, seperti “Sarana komunikasi seperti apa yang mereka mungkin dapat ditemui?” Dan juga pertanyaan seperti, “hal apa yang mempengaruhi mereka?” Kemudian, organisasi juga harus berpikir kritis tentang dua hal, yaitu kepada siapa pesan akan diarahkan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam menyebarkan komunikasi kepada sasaran yang tidak diminta maka akan diabaikan karena tidak ada hubungannya<sup>75</sup>.

**Langkah ketujuh** ialah memastikan pengukuran dan evaluasi berjalan dengan baik dan berhasil. Langkah terakhir ini mencermati langkah sebelumnya yang telah mendorong proses perencanaan komunikasi strategis dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik kepada organisasi. Tindakan yang dibangun dari langkah awal jika terukur dengan tepat, maka dapat dipastikan apa yang bekerja, apa yang perlu diubah, dan apa yang secara aman dapat diabaikan<sup>76</sup>.

Dalam mengamati keberhasilan dari komunikasi strategis, Patterson dan Radtke menjelaskan bahwa peneliti harus menentukan struktur dan pendekatan evaluasi melalui pertanyaan yang diajukan ke subjek penelitian. Contoh yang ditampilkan oleh Patterson dan Radtke, yakni peneliti dapat menjelaskan mekanisme, pekerjaan apa saja yang dilakukan selama komunikasi berlangsung, serta pemantauan di tempat manakah sekarang yang untuk dievaluasi dampaknya. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa keberhasilan dapat dilihat dari dampak komunikasi yang dilakukan, bukan hanya dari aktivitas dari komunikasi<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm. 114.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, Hlm. 2.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Sally J. Patterson and Janel M. Radtke, hlm. 151-152.

Ketujuh langkah ini yang peneliti gunakan untuk menganalisis komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta kepada nelayan sebagai audiens, untuk mencegah terjadinya konflik lahan wilayah pesisir pantura Jakarta. Selain itu, untuk mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta berhasil atau tidak, dapat dilihat melalui dampak dari komunikasi yang dilakukan.

### 2.1.3. Nelayan

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan<sup>78</sup>. Sedangkan nelayan kecil menurut UU tersebut, yakni orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *grosston* (GT)<sup>79</sup>. Selain itu, Badan Riset Kelautan dan Perikanan membuat ciri-ciri umum sebagai konsep dari nelayan yang terdiri dari nelayan perairan laut dan dalam.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa ciri umum masyarakat nelayan perairan laut ditunjukkan sebagai berikut<sup>80</sup>:

- a) Sistem dan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) masih dinilai bebas bagi siapapun untuk mengakses dan memanfaatkan.
- b) Sistem pengelolaan dan pemanfaatan juga tidak ada hak kepemilikan maupun penetapan batas wilayah dan atau wilayah penangkapan.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 diakses dari [http://www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/UU%20NO.%2045%20Tahun%202009%20ttg%20Perikanan%20\(1\).pdf](http://www.djpb.kkp.go.id/benih/peraturan/UU%20NO.%2045%20Tahun%202009%20ttg%20Perikanan%20(1).pdf) pada tanggal 7 Desember 2014.

<sup>79</sup> *ibid.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>80</sup> Zahri Nasution, Sastrawidjaja, Tjahjo Tri Hartono, Mursidin, Fatriyandi Nur Priyatna, Sosial Budaya Masyarakat Nelayan: Konsep dan Indikator Pemberdayaan (Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007) hlm.137-139.

- c) Tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya berorientasi pada pasar, namun besar dan laju investasi dalam kegiatan produksi kecil serta lamban.
- d) Pembagian peran dalam kegiatan produksi terbatas dan mayoritas tidak ada keterampilan fungsional, namun hal ini dapat dilihat pada kelompok pengolah ikan.

Kemudian terdapat pula beberapa ciri umum masyarakat nelayan perairan dalam yang terbagi menjadi dua bagian, yakni sungai-rawa dan waduk. Adapun ciri-ciri umum nelayan sungai-rawa, yaitu<sup>81</sup>:

- a) Sistem dan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan SDKP tidak secara bebas untuk diakses setiap orang. Hal ini dikarenakan perairan di daerah ini dipengaruhi oleh ekosistem dan teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu, pemegang wewenang dan pendistribusian hak berada ditangan pemerintah daerah, sehingga ada *regulated fisheries*.
- b) Adanya upaya konservasi sumberdaya perikanan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- c) Terdapat penegakan hukum mengenai sanksi yang diselesaikan secara musyawarah dengan hukum normatif, namun belum efektif untuk seluruh wilayah perairan sungai-rawa.
- d) Adanya pembagian peran dalam kegiatan produksi serta perbedaan keterampilan fungsional berdasarkan jenisnya, seperti nelayan, pembuat alat tangkap, petani dan sebagainya.
- e) Tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya berorientasi pada pasar dan investasi kecil, serta lamban.

Sedangkan ciri-ciri umum nelayan perairan dalam di waduk ialah sebagai berikut<sup>82</sup>:

- a) Sistem dan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di daerah ini bebas bagi siapapun untuk mengakses dan memanfaatkan.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

- b) Hak kepemilikan berada ditangan pemerintah melalui badan atau institusi atau otorita pengelola waduk.
- c) Adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan penangkapan ikan yang telah ditetapkan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat pemerintah.
- d) Tidak adanya pembagian peran dalam kegiatan produksi maupun keterampilan fungsional.
- e) Tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya juga berorientasi pada pasar.

Ciri-ciri umum ini merupakan unsur yang terletak pada proses pengambilan keputusan dalam menghadapi perkembangan maupun perubahan lingkungan ekologis dan sosial masyarakat nelayan. Adapun penjelasan tentang nelayan dalam bab ini untuk memberikan pengetahuan akan profesi dan pengertian dari orang yang menangkap ikan.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam menunjang penelitian, maka peneliti meninjau beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya dan terkait dengan yang penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang dilakukan (*review of related literature*). Tujuan dari penelitian tinjauan pustaka adalah meninjau kembali pustaka atau laporan penelitian yang berupa jurnal atau penelitian yang dipublikasi, serta yang tidak dipublikasikan. Penelitian tersebut berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang tidak selalu harus identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi<sup>83</sup>. Peneliti menemukan penelitian yang terdapat hubungannya dengan permasalahan wilayah pesisir Pantura Jakarta dan dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun

---

<sup>83</sup>Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) hlm.201.

perbandingan dengan proses penelitian peneliti. Selain itu, peneliti juga menemukan penelitian terkait komunikasi strategis.

#### **2.1.4.1. Rudianto (2004) dengan Judul Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Pantai Utara Jakarta)**

Penelitian ini dilakukan oleh Rudianto sebagai disertasi yang fokus terhadap pemanfaatan lahan wilayah pesisir. Rudianto menjelaskan mengenai negara-negara berkembang yang banyak terdapat kelompok masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Kelompok masyarakat tersebut disebut juga sebagai *squatter*. Kelompok ini menurut Rudianto mendapatkan tekanan psikologi seperti intimidasi, teror, kekerasan, penculikan, pengusuran dan jarang terjadi penyelesaian terbaik dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Permasalahan yang menjadi topik utama Rudianto ialah fenomena konflik yang terjadi akibat dari pemanfaatan lahan wilayah pesisir. Adapun area lahan wilayah pesisir yang diamati oleh Rudianto adalah Pantai Utara Jakarta. Rudianto dalam penelitiannya mengatakan bahwa hasilnya baik *Squatter* maupun pemilik lahan tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Selain itu dikatakan pula bahwa mereka juga mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk memaksakan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini menurut Rudianto dapat menurunkan produktivitas ekonominya dan implikasinya adalah kinerja ekonomi kawasan pesisir menurun<sup>84</sup>.

Rudianto menemukan beberapa alasan mengapa *Squatter* tertarik bertempat tinggal di -kawasan pesisir Jakarta Utara, selain karena harga sebidang lahan yang murah dan mudah mendapatkan mata pencaharian sebagai nelayan atau petani tambak. Adapun alasan lainnya ialah (1) lokasi dekat dengan sumber daya perikanan; (2) kebutuhan tinggi terhadap tenaga buruh kasar; (3) jarak yang dekat antara rumah dan tempat pekerjaan; (4) sangat rendah biaya transportasi; (5) kebanggaan tinggal di Jakarta sebagai ibukota negara. Di samping itu, Rudianto juga mengatakan bahwa kawasan pesisir Jakarta Utara memiliki daya tarik

---

<sup>84</sup> Rudianto, Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Pantai Utara Jakarta), Disertasi Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm. i.

tersendiri. Adapun alasan dari daya tarik tersebut, yakni (1) hak milik lahan tidak jelas batas-batasnya; (2) banyak lahan tidak bersertifikat; (3) pemindahan kepemilikan antar *Squatter*; (4) banyak lahan belum digarap; (5) perubahan kepemilikan lahan dari kepemilikan umum ke pemilikan pribadi<sup>85</sup>.

Rudianto dalam penelitiannya juga membahas penyelesaian konflik lahan melalui pendekatan ekonomi dengan asumsi bahwa konflik adalah sebuah konsep. Dalam penelitiannya, Rudianto mengatakan bahwa konsep konflik dapat diukur dengan menggunakan variabel ekonomi yaitu manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*). Kedua hal ini harus turut memperhatikan penilaian sumber daya alam, seperti nilai yang mempunyai manfaat langsung (*use value*) dan nilai yang tidak secara langsung bermanfaat (*non use value*). Kemudian, Rudianto juga mengatakan bahwa semua nilai tersebut dihitung sebagai *Total Economic Value* (TEV) dan menjumlahkan *use value* dan *non use value*. GAMS (*General Algebraic Modeling System*) digunakan menghitung nilai rente lahan. Dengan perhitungan nilai tersebut, hasilnya ada lahan perlu dipertahankan, perlu diperluas, dan perlu ditambah *Squatter*nya. Di samping itu, dalam penelitian ini dikatakan juga bahwa kawasan yang perlu mengeluarkan sebagian *squatter* nya meliputi Kapuk Muara, Penjanngan, Pluit I, Ancol, Tanjung Priok dan Tugu Selatan. Berdasarkan analisis yang digunakan oleh GAMS, persamaan regresi dan *game theory* diperoleh program resolusi konflik yaitu: (1) program pulang kampung; (2) program pemberdayaan *squatter*; (3) program konsolidasi lahan; (4) program pembangunan rumah susun. Program resolusi tersebut akan memberikan manfaat kepada *squatter* untuk mencapai rasa aman, bahagia, dan meningkatkan pendapatannya<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Rudianto, hlm. i.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Rudianto, hlm. i.

#### **2.1.4.2. Lestario Widodo dkk (2004) dengan Judul Kajian Aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta**

Penelitian ini membahas mengenai penataan kawasan Pantai Utara Jakarta dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan pembahasan *workshop* yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2004. Penelitian yang dilakukan oleh Lestario Widodo, Mukaryati, Herman C.B. Edyanto, Sri Handoyo Suprpto menjelaskan rencana pemda DKI melaksanakan kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang telah menimbulkan polemik berkepanjangan. Polemik yang ditampilkan dalam penelitian adalah adanya penolakan rencana tersebut karena dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap banjir, kerusakan ekosistem pantai, keberlanjutan kehidupan nelayan serta masih lemahnya rencana detail reklamasi dan revitalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah<sup>87</sup>:

- a. Keterkaitan tata ruang kawasan Pantura dalam konteks ekosistem dan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta tinjauan regional;
- b. Keterkaitan pembangunan sistem transportasi kawasan Pantura Jakarta dalam konteks regional;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan reklamasi dan laut serta pentahapannya; dan
- d. Pendekatan partisipasi masyarakat dalam merencanakan program dan kegiatan.

Adapun metodologi yang digunakan oleh para peneliti ialah mengacu kepada aspek tata ruang, aspek sosial ekonomi dan sosial budaya. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>87</sup> Lestario Widodo dkk, "Kajian Aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta", Prosiding Workshop Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta Dengan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: BPPT, 2004, hlm.109.

(RTRW) Provinsi DKI 2010, Rencana Tata Ruang Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur), Dokumen AMDAL Regional Reklamasi, dan Revitalisasi Pantura Jakarta dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan analisis, menggunakan pendekatan ekosistem dan keterpaduan. Dijelaskan bahwa melalui pendekatan ekosistem kawasan pantura dilihat kedudukannya dalam konteks makro yaitu sebagai bagian dari ekosistem pesisir Teluk Jakarta dan bagian hilir dari ekosistem DAS 13 sungai yang berhulu di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi<sup>88</sup>. Berdasarkan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian tersebut dapat menjelaskan pertimbangan lebih lanjut terhadap pembangunan dengan pendekatan DAS dan peran serta masyarakat khususnya nelayan Pantura Jakarta.

#### **2.1.4.3. Lee E. Bokma (2010) dengan Judul *Strategic Communication for Tactical Leaders***

Penelitian ini menunjukkan adanya analisis mengenai komunikasi strategis yang dilakukan oleh Lee E. Bokma sebagai tesis di Universitas Tulane, New Orleans, Louisiana. Tesis ini mengkaji konsep komunikasi strategis sebagai suatu cara menentukan peran potensial bagi para pemimpin taktis. Selanjutnya, dalam tesis ini juga dikaji karakteristik lingkungan informasi di mana komunikasi strategis dilakukan dan memiliki potensi untuk membatasi peran pemimpin taktis berdasarkan karakter mereka. Pada kajian yang terakhir dalam tesis ini, menganalisis apa yang menjadi sumber dalam komunikasi strategis. Adapun salah satu sumber yang dimaksud berasal dari pelaksanaan pelatihan, di mana para pemimpin di tingkat taktis bersedia untuk menggabungkan komunikasi strategis ke dalam satuan operasi mereka<sup>89</sup>.

Pertanyaan penelitian utama yang diajukan Bokma, yakni “*What role do tactical-level leaders have in strategic communication?*”. Selain itu, terdapat juga tiga pertanyaan sekunder, yakni “*What is this relatively new*

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Lestario Widodo dkk, hlm.114.

<sup>89</sup> Lee E. Bokma, *Strategic Communication for Tactical Leaders*, Thesis, Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College, Tulane University, 2010, p.ii.

*and continuously developing concept known as strategic communication?*”, “*What are the characteristics of the information environment tactical-level leaders must operate within to conduct strategic communication?*”, dan “*What resources do tactical-level leaders have toward incorporating strategic communication into their operations?*”. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, Bokma menggunakan kata kunci, yaitu tingkat taktis. Tingkat taktis ini digunakan Bokma dalam rangka memahami tingkat dari kepemimpinan<sup>90</sup>. Penelitian ini tertuju pada kepemimpinan dalam lingkungan militer AS. Selain kata kunci tersebut, Bokma juga menggunakan istilah sosial media. Istilah tersebut digunakan karena menjadi penentu bagi karakteristik lingkungan informasi bagi para pemimpin di tingkat taktis dapat melakukan komunikasi strategis. Sosial media yang dijelaskan oleh Bokma, yakni berupa blog, jejaring sosial, kolaborasi, dan berbagai media lainnya<sup>91</sup>.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh Bokma terbagi menjadi empat bagian. Pada tiga bagian proses pertama, Bokma melakukan analisis dan menjawab pertanyaan penelitian sekunder melalui studi literatur. Kemudian pada bagian terakhir, ia akan menjawab pertanyaan penelitian utama melalui dua metode, yakni literatur dan sintesis dari kesimpulan tiga bagian proses pertama<sup>92</sup>. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ditemukan dua peran tertentu dalam pemimpin di tingkat taktis yang memiliki komunikasi strategis. Peran pertama adalah terlibatnya pemimpin kunci dalam wilayah operasi yang dilaksanakan untuk mendukung komunikasi strategis. Sedangkan peran kedua adalah melakukan penilaian dari upayan komunikasi strategis dalam wilayah operasi dan memberikan umpan balik kepada perencana<sup>93</sup>.

Kesimpulan yang diperoleh oleh Bokma ialah pemimpin di tingkat taktis perlu mengintegrasikan komunikasi strategis dalam proses

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, Lee E. Bokma, hlm 8.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Lee E. Bokma, hlm. 9.

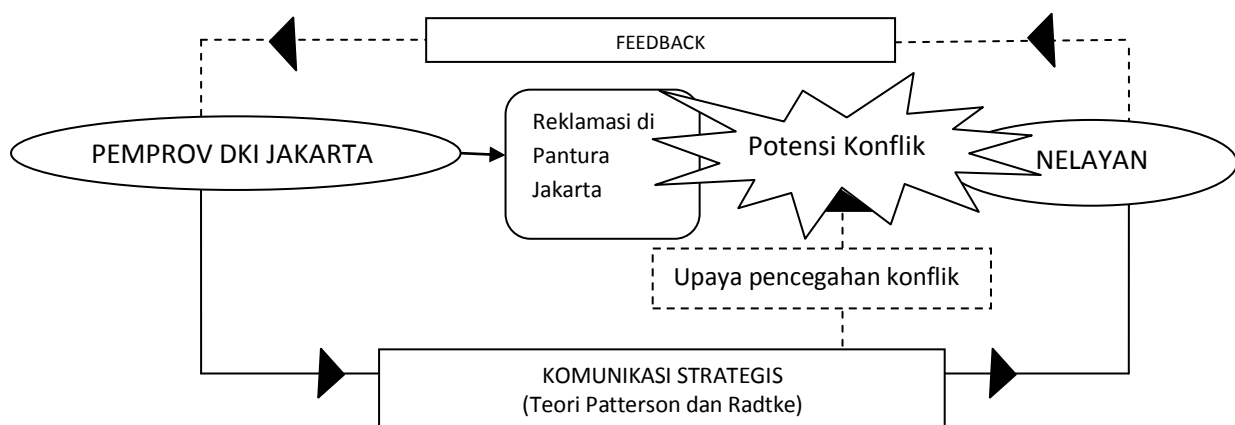
<sup>92</sup> *Ibid.*, Lee E. Bokma, hlm. 23.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Lee E. Bokma, hlm. 73.

perencanaan. Hal ini dilakukan untuk mengkoordinasikan tindakan dengan kata-kata, kemudian melibatkan sisi dari pemimpin, memberi penilaian informasi yang diterima, mengembangkan hubungan keterlibatan dengan bawahan. Selain itu, dengan pengembangan komunikasi strategis, Bokma mengatakan bahwa tentara dapat meningkatkan efektivitas peran mereka dengan cepat, responsif, lincah, jujur dan menyadari potensi dari efek perintah ketika beroperasi di wilayah komunikasi<sup>94</sup>.

## 2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti jelaskan pada bab maupun subbab sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Pada bagan di atas dijelaskan bahwa peneliti ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan kepada nelayan sebagai guna pencegahan konflik lahan di wilayah pesisir Pantura Jakarta. Fenomena yang timbul ketika itu ialah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh para nelayan yang merupakan aksi penolakan terhadap kebijakan reklamasi serta pelaksanaannya yang akan berjalan pada tahun 2015, seperti yang telah dibahas dalam latar belakang. Demonstrasi tersebut juga dikarenakan permasalahan lahan wilayah pesisir Pantura Jakarta yang biasa digunakan oleh nelayan untuk aktivitas perikanan, kini tidak bisa lagi mereka gunakan.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Lee E. Bokma, hlm. 75.

Akibat dari permasalahan tersebut, menyebabkan nelayan tidak bisa berlayar, hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan, dan tidak adanya tempat bagi mereka untuk menaruh bagan ikan. Selain permasalahan ini, hal pokok yang tidak terlihat adalah komunikasi pemerintah dalam menjelaskan reklamasi bagi nelayan di Pantura Jakarta. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah komunikasi strategis untuk mengatasi perubahan-perubahan sosial di lingkungan wilayah pesisir Pantura Jakarta. Komunikasi strategis yang digunakan oleh peneliti ialah teori Patterson dan Radtke. Namun demikian, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana dampak dari komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta terhadap para nelayan sebagai upaya pencegahan konflik.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. SUMBER DATA/SUBJEK/OBJEK PENELITIAN**

##### **3.1.1. Sumber Data**

Sumber data menurut Arikunto merupakan subjek yang berasal dari data yang diperoleh untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber-sumber data. Arikunto juga menyatakan bahwa peneliti setidaknya memperhatikan tiga unsur sumber data, yaitu orang (*person*), kertas (*paper*), dan tempat (*place*). Sumber data yang berasal dari orang menjelaskan data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan mengenai variabel yang diteliti. Selanjutnya kertas merupakan sumber berupa arsip, gambar maupun dokumen penting. Kemudian tempat ialah suatu area yang terdapat kegiatan di dalamnya yang berhubungan dengan penelitian<sup>95</sup>. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara khusus untuk mendukung data penelitian. Menurut A Sindhu bahwa data primer memiliki keuntungan bagi penelitian, diantaranya ialah memiliki tingkat akurasi data yang sangat tinggi; keandalan data sangat tinggi karena dikumpulkan dari pihak yang bersangkutan dan dapat diandalkan; dan memberikan pandangan yang realistis bagi peneliti mengenai topik yang diteliti. Di samping itu, Sindhu juga mengatakan bahwa data primer memiliki kelemahan berupa banyaknya waktu dan upaya yang diperlukan untuk pengumpulan data; pertanyaan yang dibuat

---

<sup>95</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

harus sederhana dan mudah dipahami; terkadang beberapa responden tidak memberikan respon yang tepat waktu dan sebagainya<sup>96</sup>.

Dengan demikian, peneliti telah mendata asal sumber yang akan diwawancara untuk mempermudah penelitian dan menghindari kelemahan yang dijelaskan oleh Sindhu. Adapun sumber yang akan peneliti peroleh keterangannya yaitu Pemprov DKI Jakarta berikut perangkat daerah yang ikut andil dalam pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta, antara lain Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas KPKP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Walikota Jakarta Utara melalui Suku Dinas KPKP, Kecamatan maupun nelayan yang bersangkutan. Di samping itu, peneliti juga akan mewawancarai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengamati persoalan reklamasi Pantura Jakarta. Selanjutnya untuk menganalisis dari dampak komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap nelayan, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada nelayan.

Data sekunder menurut Hox dan Boije ialah data yang terdapat dalam arsip data resmi yang mudah diperolehnya. Data tersebut bisa berupa file yang diperoleh melalui internet, maupun file data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain, seperti data statistik resmi, catatan administratif, atau dokumen lainnya yang disimpan oleh suatu organisasi<sup>97</sup>. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari informannya, namun telah berbentuk hasil penelitian yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Pencarian data sekunder ini dibutuhkan untuk memperkaya data informasi.

### **3.1.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta, yakni Badan Perencanaan Pembangunan

---

<sup>96</sup> A. Sindhu, "Chapter 2: Research Methodology" diakses dari [http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3704/12/12\\_chapter%202.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3704/12/12_chapter%202.pdf) pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>97</sup> Joop J. Hox dan Hennie R. Boeije, "Data Collection Primary vs. Secondary" in *Encyclopedia of Social Measurement*, Volume 1, 2005, p.596.

Daerah Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup (Bappeda PSKLH) dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas KPKP), Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Sudin KPKP), Kepala Seksi Camat (Kasicam) KPKP serta nelayan di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dikarenakan, subjek tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi maupun kondisi dari latar penelitian. Bogdan dan Biklen dalam Moleong mengatakan bahwa fungsi dari seorang informan juga untuk bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya<sup>98</sup>. Adapun Wibisono menambahkan bahwa terkait subjek dalam penelitian kualitatif, jumlah dari subjek bukanlah hal utama sehingga pemilihan informan lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan<sup>99</sup>.

### 3.1.3. Objek Penelitian

Raco menjelaskan bahwa objek penelitian adalah fokus perhatian dari suatu penelitian yang datanya didapat di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi<sup>100</sup>. Dengan demikian, objek penelitian peneliti ialah keterangan yang didapat dari subjek penelitian yang berkaitan dengan komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta kepada nelayan yang menjadi penerima pesan dari komunikasi tersebut. Komunikasi strategis ini sebagai usaha pencegahan konflik sosial dalam masyarakat di Indonesia dengan fokus penelitian konflik lahan di wilayah pesisir Pantura Jakarta sebagai bahan analisa serta ditarik kesimpulannya.

## 3.2 DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, Moleong, hlm. 132.

<sup>99</sup> Wibisono Poespito Hadi, *Sinergitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kodim 0618/BS dengan Pemda Kota Bandung*, Tesis Jurusan Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Jakarta, 2014, hlm. 33.

<sup>100</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 44.

yang ada, mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian yang diantaranya persepsi, tindakan dan perilaku dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>101</sup>. Selain itu, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang tidak bergantung pada pengukuran numerik namun melakukan dengan berbagai pendekatan, serta fokus pada satu atau jumlah kecil suatu kasus yang menggunakan wawancara intensif atau analisis mendalam dari berbagai dokumen, hingga menjadi perhatian secara penuh<sup>102</sup>.

### **3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu melalui studi literatur (kepuustakaan), wawancara dan observasi.

#### **3.3.1. Studi Literatur (Kepustakaan)**

Studi literatur dilakukan peneliti dengan membaca buku referensi terkait buku teks, jurnal, makalah, majalah berupa media elektronik dan cetak, dan studi hasil penelitian seperti tesis.

#### **3.3.2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang mengetahui masalah yang menjadi topik penelitian ini. Wawancara pun dapat memberikan kita informasi yang tidak tercatat dalam dokumen. Stedward menjelaskan bahwa wawancara merupakan metode untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif, serta tidak banyak bahan penelitian terdahulu yang membahasnya<sup>103</sup>. Selanjutnya dalam melakukan wawancara, Anne dan Anna menjelaskan bahwa dibutuhkannya waktu

---

<sup>101</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.6.

<sup>102</sup> Gary King et.al, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research* (UK: Princeton University Press, 1995), hlm.4.

<sup>103</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.104.

yang cermat. Hal ini dikarenakan dalam bagian pengumpulan data ini memiliki komponen, khususnya struktur wawancara, gaya, pengaturan jadwal, dan merekam data<sup>104</sup>.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini memang sengaja dilakukan dengan maksud tertentu. Metode wawancara juga bersifat terbuka, sehingga subjek yang diwawancarai mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut<sup>105</sup>. Selain itu, wawancara yang dilakukan tentunya harus menjawab dari pertanyaan penelitian yang diuraikan dalam Bab 1. Informan yang peneliti wawancara dengan cara *purposive sampling*. Cara tersebut adalah bagaimana peneliti menyeleksi informan dengan pilihan yang disengaja karena kualitas yang dimiliki oleh informan. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak perlu menentukan informan melalui teori yang mendasari penelitian ataupun menentukan jumlah informan<sup>106</sup>. Secara sederhana, peneliti dapat memutuskan apa yang perlu diketahui dari informan hingga menetapkan untuk memperoleh informan yang bisa dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) untuk mendapatkan jawaban yang detail dari informan.

Adapun wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan maksud mengumpulkan data dari para informan mengenai komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan konflik lahan pada nelayan di wilayah pesisir Pantura Jakarta, sebagai berikut:

- a. Bappeda PSKLH sebagai unsur utama dalam proyek reklamasi berguna dalam wawancara untuk mengetahui secara mendalam

---

<sup>104</sup> Anne Adams and Anna L. Cox, "Questionnaires, in-depth interviews and focus groups", in Paul Cairns and Anna L. Cox eds. *Research Methods for Human Computer interaction* (UK: Cambridge University Press, 2008) p.21.

<sup>105</sup> Moleong, hlm.189.

<sup>106</sup> H.R. Bernard, *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods*, 3rd edition (California: Altamira Press, 2002), in Ma. Dolores C. Tongco, "Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection", in *A Journal of Plants, People, and Applied Research: Ethnobotany Research and Applications*, p.147.

mengenai bagaimana langkah pertama dari komunikasi strategis yang dilakukan serta arahan yang diberikan kepada perangkat daerah lainnya yang berhubungan dengan proyek reklamasi.

- b. Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta dengan pertanyaan wawancara mengenai komunikasi yang disampaikan oleh Bappeda PSKLH dan bagaimana sosialisasi yang dilakukan Dinas KPKP kepada nelayan.
- c. Sudin KPKP Walikota Jakarta dengan pertanyaan wawancara bagaimana komunikasi yang diterima dari Bappeda hingga ke tahap Walikota Jakarta Utara, serta sarana yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi kepada nelayan.
- d. Kecamatan melalui Kasicam dengan wawancara untuk menganalisis penyampaian komunikasi yang diarahkan pusat terkait reklamasi dan pengembangan pesan yang dilakukan kepada nelayan dari tingkat kecamatan.
- e. Nelayan dilakukan wawancara mendalam oleh peneliti untuk menganalisa bagaimana komunikasi yang dilakukan dari pemerintah pusat hingga ke tahap mereka sebagai pelaku utama di wilayah Pantura Jakarta.

Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara<sup>107</sup> yang dibuat oleh peneliti dengan maksud supaya memiliki arah pertanyaan yang jelas dan pasti.

### **3.3.3. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi di sekitar pesisir Pantura Jakarta di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Penjaringan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari lahan para nelayan yang terkena dampak reklamasi. Selain itu, peneliti juga mengamati proses komunikasi yang dilakukan dengan para nelayan.

---

<sup>107</sup> Lihat Lampiran 3 Pedoman Wawancara

### 3.4. TEKNIK ANALISA DATA

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui cara kerja dengan data, mengorganisasikan data, mengelompokkan data sesuai dengan satuannya, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan poin penting dan perlu dipelajari, serta memutuskan pemilihan data yang ingin ditampilkan kepada khalayak<sup>108</sup>. Adapun proses analisis data yang akan dilakukan peneliti, yakni sebagai berikut:

- a. Mencatat dan membuat transkrip hasil wawancara dengan para informan di lapangan.
- b. Mengelompokkan dan mengklasifikasikan data yang didapat dari hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Mencari dan menemukan pola dari hubungan data yang dimiliki dengan objek penelitian.
- d. Menemukan poin pentingnya dan menganalisisnya hingga mendapatkan makna dari temuan yang didapat.
- e. Memutuskan data yang akan diinterpretasikan ke dalam penelitian.

### 3.5. PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di DKI Jakarta dengan fokus di Jakarta Utara selama 5 bulan dimulai bulan Januari sampai dengan Mei 2015, meliputi Kantor Bappeda PSKLH Pemprov DKI Jakarta, Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta, Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing dan nelayan di kedua kecamatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam prosedur penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Dalam mendapatkan data dari narasumber, maka peneliti menggunakan alat bantu rekaman untuk mewawancarai narasumber;

---

<sup>108</sup> Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hlm.248.

- b. Data primer yang peneliti peroleh dengan cara mendatangi kantor narasumber yang bersangkutan dan menyerahkan surat izin melakukan audiensi dengan narasumber yang bersangkutan, sedangkan untuk melakukan wawancara dengan nelayan di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan maka peneliti memberikan surat izin kepada pihak kecamatan dan Kasicam KPKP. Selanjutnya Kasicam KPKP akan mengarahkan peneliti kepada nelayan yang bersangkutan;
- c. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini berkaitan dengan reklamasi Pantura Jakarta, nelayan Pantura Jakarta dan juga mengenai komunikasi pemerintah kepada nelayan. Data ini diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, majalah dan berita dalam internet;
- d. dan untuk pengujian data ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam desain penelitian, serta menggunakan teori sehingga data tersebut dapat diuji.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. GAMBARAN SEBARAN DATA PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti menguraikan gambaran umum dari penyebaran data yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data primer diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Penjaringan, serta nelayan di dua kecamatan tersebut. Di samping itu, peneliti juga akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian yang berada di beberapa titik area di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan, Jakarta Utara.

##### 4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian di Wilayah Jakarta Utara



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Jakarta Utara**

Sumber: <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/07/Jakarta-Utara>

Wilayah kotamadya Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini terdiri dari luas lautan 6.979,4 Km<sup>2</sup> dan luas daratan 154,11 Km<sup>2</sup>. Jakarta Utara memiliki daratan yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 sampai dengan 10 km, serta terdapat kurang lebih 110 pulau yang ada di

Kepulauan Seribu. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 20 meter. Di samping itu, terdapat pula area tertentu yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa atau empang air payau. Kondisi wilayah Jakarta Utara merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 banjir kanal. Hal ini menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik kiriman maupun banjir karena air pasang laut<sup>109</sup>.

Wilayah Jakarta Utara juga berbatasan dengan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu di sebelah utaranya. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Jakarta Pusat dan Kota Administratif Jakarta Timur. Sebelah barat wilayah Jakarta Utara pun berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Sedangkan sebelah timurnya berbatasan dengan Kota Administratif Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Bekasi Provinsi Jawa Barat<sup>110</sup>.

Jakarta Utara merupakan bagian dari pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Pada bulan Agustus 1966, Jakarta Utara menjadi wilayah dari kota Administratif di DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Kedudukan kota Adminitrasi suatu wilayah merupakan alat pelaksana dari Gubernur Kepala Daerah yang diwujudkan dalam proses penyempurnaan administrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran suatu roda pemerintahan<sup>111</sup>.

#### **4.1.1.1. Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakarta Utara)**

Pemkot Jakarta Utara memiliki visi untuk mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir Modern. Sebuah kota yang tertata rapi, maju, nyaman dan sejahtera. Di samping itu, visi tersebut juga mengharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya dan

---

<sup>109</sup> "Jakarta Utara" diakses pada 12 April 2015 dari <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/07/Jakarta-Utara#.VVfy3I7tmko>.

<sup>110</sup> "Buku Saku Tahun 2013". Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara, hlm. 2.

<sup>111</sup> "Sejarah Jakarta Utara" diakses pada 12 April 2015 dari <http://utara.jakarta.go.id/srv3/profile/sejarah-jakarta-utara.html>.

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik<sup>112</sup>. Adapun misi yang dilakukan, yaitu pembenahan dan penataan infrastruktur; peningkatan daya saing usaha kecil menengah; pembangunan kota menuju kota “*Smart City*”; dan pengembangan kawasan pelabuhan<sup>113</sup>. Dalam menjalankan visi dan misinya maka Pemkot Jakarta Utara juga memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang Walikota dan seorang wakil walikota. Walikota adalah kepala pemerintahan kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur<sup>114</sup>.

Walikota diperbantukan juga oleh Sekretaris Kota yang dalam struktur organisasi berada dibawahnya dan memiliki asisten. Di samping itu, dalam mendukung struktur organisasinya maka terdapat suku dinas yang merupakan pelaksana untuk melaporkan aktivitasnya ke Walikota melalui Sekretaris Kota. Selanjutnya pada tingkat kota administrasi terdapat kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil camat, serta sekretaris kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat<sup>115</sup>. Camat turut bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris kota. Selain itu, kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah bertanggung jawab kepada walikota melalui camat<sup>116</sup>. Wilayah Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan dengan 31 kelurahan (lihat lampiran 1. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara).

Dalam struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat Suku Dinas yang bertanggungjawab atas bidang Kelautan dan Perikanan. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Sudin KPKP)

---

<sup>112</sup> Data Saku Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013, Jakarta Utara: Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara, 2013, hlm.25.

<sup>113</sup> “Visi dan Misi Kota Jakarta Utara” diakses pada 12 April 2015 dari <http://utara.jakarta.go.id/srv3/profile/visi-misi.html>.

<sup>114</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 10 diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2007.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat 1, 4 dan 8.

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat 1 dan 4.

merupakan unit kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas KPKP) pada Kota Administrasi Jakarta Utara. Sudin KPKP secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas KPKP, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas fungsi dari Sudin KPKP ialah pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan fasilitasi kegiatan dan usaha peternakan, perikanan dan kelautan. Selain itu, fungsi dari Sudin KPKP ialah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan usaha peternakan, perikanan dan kelautan pada lingkup kota administrasi.<sup>117</sup>

Sudin KPKP juga melakukan pengembangan peran serta masyarakat dalam peternakan, perikanan dan kelautan. Di samping itu, dalam pelaksanaan pada tingkat kecamatan dilakukan oleh seksi kecamatan kelautan, perikanan dan ketahanan pangan (KPKP).<sup>118</sup> Sudin KPKP juga berkoordinasi dengan seksi kecamatan untuk membina dan mendayagunakan pesisir dan pantai. Pada setiap 6 kecamatan, terdapat seksi kecamatan KPKP. Terkait dengan penelitian ini, kecamatan yang menjadi wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Cilincing dan Penjaringan. Kedua kecamatan yang peneliti rujuk untuk diperoleh datanya terkait nelayan merupakan wilayah yang menjadi pusat pelabuhan perikanan dan juga mempunyai Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing letaknya berada di tepi Laut Jawa.

Pertama, peneliti menjelaskan profil dari Kecamatan Penjaringan. Kecamatan ini memiliki kondisi tanah yang banyak berpengaruh oleh air laut sehingga keadaan tanah tidak stabil. Oleh karena itu, masih terdapat banyak tanah sawah, empang-empang (rawa) dan hutan lindung. Kecamatan Penjaringan memiliki batas wilayah yang di sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut Jawa. Kemudian di sebelah Selatan

---

<sup>117</sup> Provinsi DKI Jakarta, Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian 2013-2017, hlm.14.

<sup>118</sup> *Ibid.*

berbatasan dengan Jalan Tubagus Angke, Kapuk Kamal dan Irigasi Rawa Bebek. Pada sebelah Timur berbatasan dengan Kali Opak sepanjang Pelabuhan Sunda Kelapa dan Rel Kereta Api Jurusan Kota atau Tangerang. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Berok, Pintu Air Kayu Besar dan batas Kelurahan Dadap Kabupaten Tangerang Banten.



**Gambar 4.2 Wilayah Kecamatan Penjaringan**

Sumber : <http://abnonutara.org/profil-jakarta-utara-kecamatan-penjaringan/>

Kecamatan Penjaringan juga memiliki potensi yang mendukung kemajuan Kota Administrasi Jakarta Utara, yakni memiliki hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, wisata alam dan marga satwa; sebagai objek wisata, karena terdapat Museum Bahari dan Masjid Kramat Luar Bahari dan Batang yang merupakan salah satu tempat yang bernilai histori tinggi; dan area kecamatan yang memiliki pengolahan dan industri perikanan, sentra jasa dan perdagangan di lokasi permukiman eksklusif. Disamping itu, kecamatan ini juga memiliki dua area yang fokus terhadap nelayan, yakni Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Muara Angke. Pada kedua kelurahan tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan atau yang biasa disebut TPI.

Tempat ini ialah pasar yang terletak di dalam pelabuhan ataupun pangkalan pendaratan ikan. Pada tempat tersebut dapat juga dilakukan transaksi penjualan ikan maupun hasil laut baik secara lelang maupun tidak. TPI dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah<sup>119</sup>. Pada TPI tersebut pihak dari Kecamatan Penjaringan melalui pengawasan Kepala Seksi Camat Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (Kasicam KPKP) yang melakukan kontrol terhadap TPI.

Data kependudukan di Kecamatan Penjaringan di tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 293.466 jiwa yang tinggal di daerah tersebut. Mata pencaharian penduduk di wilayah ini bermacam-macam, yaitu tani, pedagang, buruh, PNS, TNI/Polri, pensiunan, nelayan, wiraswasta, dan juga karyawan<sup>120</sup>. Jumlah nelayan pada kawasan Kecamatan Penjaringan kurang lebih terdapat 5.428 jiwa di tahun 2014<sup>121</sup>. Dalam Kecamatan Penjaringan terdapat 30 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar dalam tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Penjaringan, Pluit dan Kamal. Di setiap KUB terdapat lagi kelompok-kelompok kecil nelayan yang berjumlah kurang lebih 393 yang dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan kapal. Selain itu, Kecamatan Penjaringan juga memiliki paguyuban yang mewadahi aktifitas para nelayan dengan sebutan Paguyuban Jaring Kait. Paguyuban ini merupakan tempat bertemu para nelayan untuk rapat maupun membicarakan permasalahan yang ada pada tiap-tiap KUB, serta sebagai tempat disalurkan informasi dari pemerintah kepada nelayan.

---

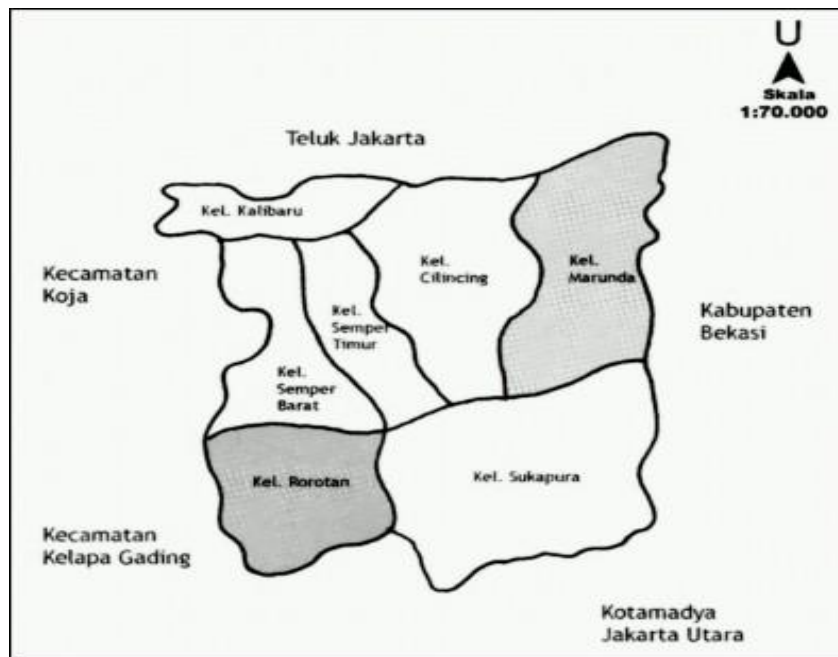
<sup>119</sup> "Tempat Pelelangan Ikan", Kamus Bisnis dan Bank, diakses pada 12 April 2015 dari [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tempat\\_pelelangan\\_ikan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tempat_pelelangan_ikan.aspx)

<sup>120</sup> "Data Kependudukan", Profil Kecamatan Penjaringan, diakses pada 12 April 2015 dari <http://www.kecamatanpenjaringan.com/about.php?id=13>.

<sup>121</sup> Dalam "Laporan Wilayah Kecamatan Penjaringan: Kota Administrasi Jakarta Utara", Oktober 2014, Jakarta: Kecamatan Penjaringan, hlm.10.

Kedua, Kecamatan Cilincing memiliki wilayah seluas 11,34 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut<sup>122</sup>:

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koja.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur.



**Gambar 4.3 Wilayah Kecamatan Cilincing**

Sumber: <http://abnonutara.org/profil-jakarta-utara-kecamatan-cilincing/>

Kecamatan Cilincing memiliki potensi dibidang pariwisata dengan adanya Rumah Tua si Pitung berlokasi di Marunda. Lokasi tersebut merupakan kawasan pesisir atau pantai yang berpotensi untuk pengembangan kawasan pariwisata rakyat. Di samping itu, ruang terbuka di daerah ini masih luas khususnya di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Rorotan. Pada kedua kelurahan tersebut akan dibangun berbagai sarana dan prasarana umum seperti rumah sakit, terminal, rumah susun, dan

<sup>122</sup> "Profil Wilayah: Keadaan Wilayah Kecamatan Cilincing", diakses dari <http://kecamatan-cilincing.blogspot.com/search/label/Profil%20Wilayah>

pusat perbelanjaan. Di wilayah ini juga terdapat Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Industrial Estate dan PT Bogasari. Selanjutnya potensi utama yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari wilayah ini adalah ikan. Daerah Kelurahan Kalibaru dan Cilincing merupakan pusat suplai ikan yang bersih dan juga terdapat pembudidayaan kerang hijau. Disana juga terdapat TPI yang dikontrol oleh Kasicam KPKP Cilincing<sup>123</sup>.

Kecamatan Cilincing juga terdapat paguyuban nelayan yang bernama Paguyuban KCM (Kalibaru, Cilincing dan Marunda). Paguyuban ini tiap bulannya mengadakan arisan yang menjadi wadah bagi para nelayan bertemu dan mendiskusikan berbagai persoalan yang terjadi dalam aktivitas nelayan. Pada kecamatan ini terdapat 54 KUB yang tersebar dalam tiga kelurahan, yakni Kelurahan Kalibaru, Cilincing dan Marunda yang di mana ketua tiap KUB bertemu sebulan sekali dalam arisan tersebut<sup>124</sup>.

#### **4.1.1.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang sering disebut dengan Bappeda merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Bappeda bertugas untuk menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pengelolaan statistik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut<sup>125</sup>:

- a. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;

---

<sup>123</sup> Data Saku Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013, Jakarta Utara: Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara, 2013, hlm. 23.

<sup>124</sup> Data KUB diperoleh dari Kasicam KPKP Cilincing

<sup>125</sup> Pergub 70 Tahun 2009 Tentang OTK BAPPEDA

- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- g. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan; pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- h. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- i. Penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- j. Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah;
- k. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda;
- l. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- m. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
- n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Bappeda; dan
- o. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam permasalahan reklamasi hingga perkembangannya mengarah ke NCICD di Pantura, Jakarta Utara, Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup (PSKLH) dirujuk oleh Bappeda untuk dimintai keterangannya. Bidang PSKLH merupakan Unit Kerja lini Bappeda dalam perencanaan pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dalam Bidang PSKLH. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang PSKLH mempunyai fungsi sebagai berikut<sup>126</sup>:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, kebersihan, pertamanan, pemakaman, lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah serta pertanahan;
- d. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RKA SKPD;
- e. Pengoordinasian pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RKA SKPD;
- f. Pembinaan teknis substantif penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RKA SKPD;
- g. Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bidang prasarana sarana kota, kebersihan, pertamanan, pemakaman, dan lingkungan hidup serta penentuan peringkat SKPD;
- h. Pengoordinasian perhitungan rencana alokasi anggaran SKPO;
- i. Pengoordinasian penyusunan masukan RPJPO, RPJMO dan RKPO;

---

<sup>126</sup> Pergun 70 Tahun 2009 Tentang BAPPEDA

- j. Pengoordinasian penyusunan masukan penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kota/Kabupaten Administrasi, kerja sama penataan ruang kawasan Jabodetabekjur, regional dan nasional;
- k. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- l. Penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup.

#### **4.1.1.2 Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas KPKP) Pemprov DKI Jakarta**

Dalam mendukung kemajuan Jakarta, Dinas KPKP memiliki visi untuk terwujudnya ketahanan pangan, lingkungan hijau, laut biru menuju Jakarta baru, kota modern yang berorientasi pelayanan publik. Adapun misi yang ingin dicapai oleh Dinas KPKP ialah<sup>127</sup>:

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dalam bidang perikanan, kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan dan hortikultura, dan kehutanan.
- b. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan yang berasal dari ikan, tanaman, hewan dan olahannya.
- c. Meningkatkan pengelolaan, pembangunan, dan penataan sumber daya perikanan, kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan dan hortikultura, dan kehutanan.
- d. Meningkatkan teknologi perikanan, kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan dan hortikultura, dan kehutanan.

---

<sup>127</sup> Profil Dinas, DKPKP DKI Jakarta diakses dari [http://dkpjakarta.web.id/profil\\_dinas](http://dkpjakarta.web.id/profil_dinas) pada tanggal 8 Mei 2015

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya perikanan, kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan dan hortikultura, dan kehutanan.
- f. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil perikanan, hasil tanaman pangan dan hortikultura, produk hewan, dan hasil hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
- g. Meningkatkan konservasi keanekaragaman flora dan fauna.
- h. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit ikan, penyakit hewan/ternak, serta zoonosis.
- i. Meningkatkan pengelolaan ekosistem laut, ruang terbuka hijau, hasil hutan, serta mutu dan keamanan pangan.

Dinas KPKP mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan. Di samping itu, dinas ini juga memiliki fungsi sebagai berikut<sup>128</sup>:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- d. Pembangunan kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- e. Pengembangan kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- f. Pembinaan kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- g. Pengendalian kesehatan hewan dan perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

---

<sup>128</sup> Profil Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, DKPKP DKI Jakarta, diakses dari [http://dkpjakarta.web.id/profil\\_dinas/tupoksi](http://dkpjakarta.web.id/profil_dinas/tupoksi) pada tanggal 8 Mei 2015.

- h. Pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- i. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman, dan ikan;
- j. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan, kecukupan dan keamanan bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- k. Pengelolaan sistem informasi rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, peternakan dan ketahanan pangan;
- l. Pasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan;
- m. Pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- n. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
- o. Penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- p. Konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil, hutan kota, dan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- q. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- r. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- s. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- t. Pengawasan dan pengendalian ijin di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

- u. Pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- v. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- w. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- x. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- y. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- z. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dinas KPKP sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 menangani dua urusan wajib yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan ketahanan pangan dan tiga urusan pilihan yaitu urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, dan urusan kehutanan.

## **4.2. HASIL PENELITIAN**

### **4.2.1 Hasil Observasi Lapangan Terkait Reklamasi**

Reklamasi di sekitar Pantai Utara Jakarta dengan luas total 5.153 hektare (Ha) akan membuat 17 pulau baru yang dalam perencanaannya akan dihuni 750 ribu jiwa<sup>129</sup>. Pulau-pulau tersebut akan dikembangkan dengan berbagai fungsi yang berbeda, serta diberi nama sesuai abjad dari A hingga Q (lihat gambar 4.4).

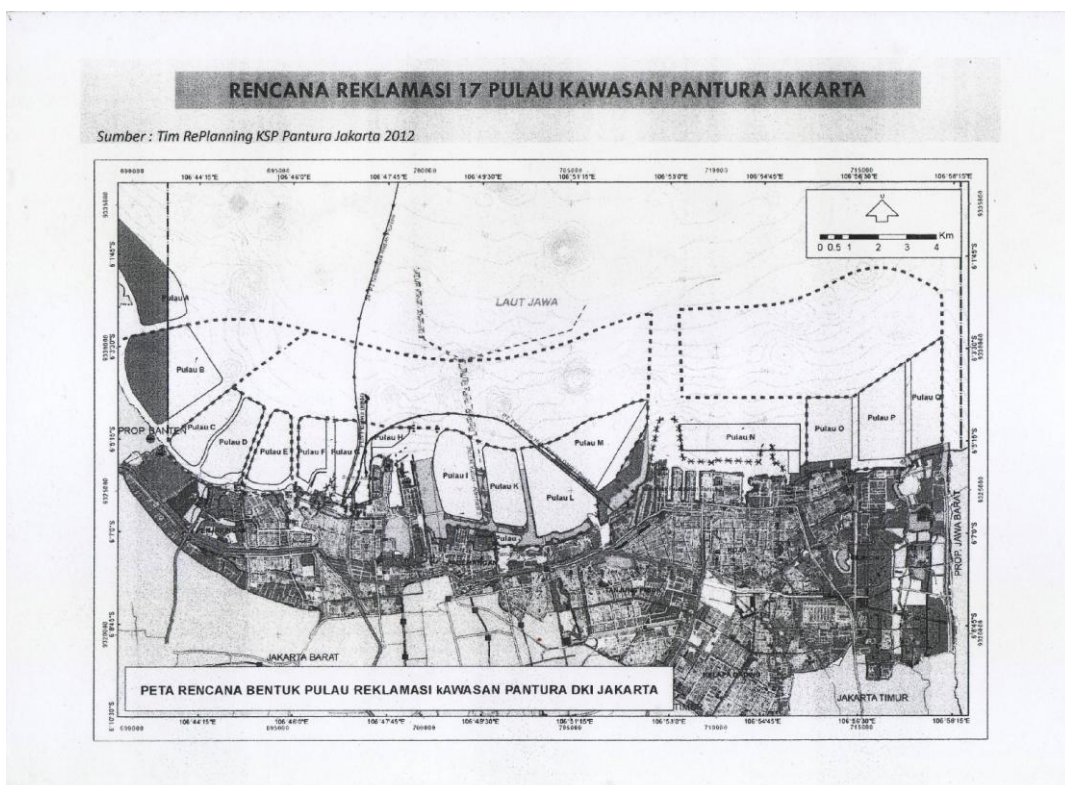
Adapun pengembang yang membangun tiap-tiap pulau tersebut, yakni sebagai berikut<sup>130</sup>:

---

<sup>129</sup> "Laporan Utama: Pulau Baru di Teluk Jakarta", Majalah Tempo Edisi 1-7 Juni 2015, hlm. 38-39.

<sup>130</sup> *Ibid.*

- a) Pulau A (luas 79Ha) dengan pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah.
- b) Pulau B (luas 380Ha) dengan pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah.
- c) Pulau C (luas 276Ha) dengan pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah.
- d) Pulau D (luas 312Ha) dengan pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah.
- e) Pulau E (luas 284Ha) dengan pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah.
- f) Pulau F (luas 190Ha) dengan pengembang yaitu PT Jakarta Propertindo (Pemerintah Jakarta).



**Gambar 4.4 Peta Rencana Reklamasi 17 Pulau Kawasan Pantura Jakarta**  
 Sumber: Tim RePlanning KSP Pantura Jakarta 2012

- g) Pulau G (luas 161Ha) dengan pengembang yaitu PT Muara Wisesa Samudra.
- h) Pulau H (luas 63Ha) dengan pengembang yaitu PT Intiland.

- i) Pulau I (luas 405Ha) dengan pengembang yaitu PT Jaladri Kartika Ekapaksi dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
- j) Pulau J (luas 316Ha) dengan pengembang yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol.
- k) Pulau K (luas 32Ha) dengan pengembang PT Pembangunan Jaya Ancol.
- l) Pulau L (luas 481Ha) dengan pengembang PT Manggala Krida Yudha dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
- m) Pulau M (luas 587Ha) dengan pengembang PT Manggala Krida Yudha.
- n) Pulau N (luas 411Ha) dengan pengembang PT Pelindo II.
- o) Pulau O (luas 344Ha) dengan pengembang PT Kawasan Berikat Nasional (Pemerintah Jakarta).
- p) Pulau P (luas 463Ha) dengan pengembang PT Kawasan Berikat Nasional (Pemerintah Jakarta).
- q) Pulau Q (luas 369Ha) dengan pengembang PT Kawasan Berikat Nasional (Pemerintah Jakarta).

Pulau-pulau yang akan dibangun tersebut, ada beberapa diantaranya telah di uruk dan hampir menjadi pulau. Hal ini menyebabkan terganggunya aktifitas dari nelayan di sekitar Kecamatan Penjaringan dan Cilincing. Tepat pada pesisir pantai di sekitar area muara di Kamal, Kecamatan Penjaringan telah ada pengerjaan proyek pulau dari PT Kapuk Naga Indah (KNI). Pada gambar 4.5 area yang diberi lingkaran merah adalah pulau buatan PT KNI yang mulai terbentuk. PT KNI yang merupakan anak usaha dari Agung Sedayu Group kini sedang membuat Pulau D. Pembuatan pulau D tersebut dengan cara pengurukan sehingga menyebabkan pendangkalan air di area sandar kapal nelayan di Kamal, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah merah.



**Gambar 4.5 Pendangkalan di Area Kamal**



**Gambar 4.6 Foto Keadaan dari Pinggir Pantai di Wilayah Kamal**

Selanjutnya, peneliti mengambil gambar 4.6 ini dari tempat sandar kapal nelayan di Kamal. Gambar ini memperlihatkan adanya endapan pasir akibat reklamasi sehingga pembentukan sedimentasi di area ini memang cepat terjadi. Menurut Widjo Kongko bahwa laju sedimen akan

meningkat bila sirkulasi arus laut berkurang, serta penambahan sedimen dasar laut akan terjadi di daerah muara sungai<sup>131</sup>.

Sedimentasi yang meningkat, pada akhirnya membuat kapal nelayan terperangkap di pasir. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan gambar 4.7 dan 4.8 dibawah ini. Pendangkalan tersebut menyebabkan juga kapal nelayan rusak dan kapal telat merapat akibat menunggu air pasang untuk dapat masuk ke area TPI<sup>132</sup>. Kapal yang terperangkap oleh sedimen, menyebabkan para nelayan harus meminta bantuan untuk menarik kapalnya atau mereka akan meninggalkan kapal yang terperangkap itu.



**Gambar 4.7 Kapal Bagan Nelayan Terperangkap Sedimen**

---

<sup>131</sup> Untung Widyanto dan Hussein Abri Yusuf, "Laporan Utama: Comberan Raksasa di Utara Jakarta", Majalah Tempo Edisi 1-7 Juni 2015, hlm 41.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



**Gambar 4.8 Kapal-Kapal Nelayan di Kamal**

Rusaknya kapal nelayan terjadi dikarenakan adanya pasir yang masuk ke mesin kapal. Selain itu, jangkar nelayan juga turut tertimbun endapan sehingga tidak dapat ditarik kembali. Menurut Agus seorang nelayan di Kamal, kapal tersebut dapat beroperasi ketika air pasang cukup tinggi, tetapi kemungkinan dapat digunakan kecil karena biasanya mesin sudah tertutup lumpur<sup>133</sup>.



**Gambar 4.9 Alat Pengeruk Sedimen**

<sup>133</sup> Wawancara peneliti dengan nelayan Agus di Kamal pada tanggal 10 April 2015.

Menurut Abdul Kadir Lamba, seorang tokoh nelayan di daerah Kamal mengatakan bahwa sejak awal 2015 telah banyak nelayan yang menaruh kapalnya di bengkel. Di samping itu, menurut Lamba kedalaman laut di pelabuhan tinggal satu meter dari tiga meter pada akhir 2014. Oleh karena itu, para nelayan melakukan protes ke PT KNI perihal pendangkalan yang terjadi<sup>134</sup>. PT KNI akhirnya melakukan pengerukan untuk mengurangi sedimen di sekitar kamal, seperti yang ada pada gambar 4.9 di mana adanya alat khusus untuk mengeruknya yang dilingkari warna merah dan disebelahnya terdapat pulau buatanya yang ditandai panah merah.

Lain halnya dengan di daerah Kecamatan Cilincing, memang belum ada pengerukan atau pembuatan pulau baru. Akan tetapi, sudah ada batas yang menghalangi nelayan untuk menangkap ikan, seperti pada gambar 4.10 yang peneliti lingkari (gambar ini diambil oleh peneliti dari TPI Cilincing).



**Gambar 4.10 Keadaan di Sekitar Pinggiran Pantai di Cilincing**

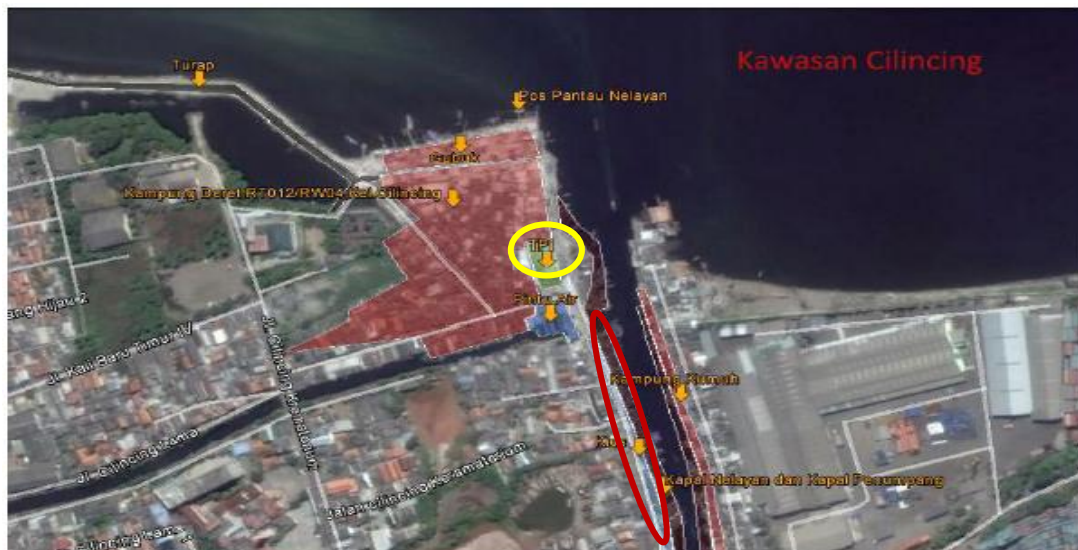
---

<sup>134</sup> Untung Widyanto dan Hussein Abri Yusuf, "Laporan Utama: Comberan Raksasa di Utara Jakarta", Majalah Tempo Edisi 1-7 Juni 2015, hlm. 40.



**Gambar 4.11 Area Sandar Kapal Nelayan di Kawasan Cilincing**

Berdasarkan hasil observasi peneliti di daerah Cilincing, pendangkalan air di Cilincing tidak seperti di Kamal. Pada daerah ini nelayan masih dapat keluar dan masuk kapan saja, hanya banyak terdapat tumpukan sampah. Kedua kecamatan ini, didominasi oleh nelayan dengan ukuran kapal kecil dibawah 5 *gross tonage* (GT).



**Gambar 4.12 Tampak Kawasan Cilincing dari Google Map**

Sumber: Kajian Sosial Budaya Pengembangan Arah Urban Development Kawasan Pesisir Utara Ibukota Negara

Pada kawasan Cilincing terdapat juga perkampungan nelayan yang terletak di Muara Kali Landak. Perkampungan ini dinamakan Kampung Deret yang rumah-rumahnya bentuknya seragam. Kampung Deret ini

merupakan bantuan dari Pemda DKI supaya menjadi rumah layak huni. Masyarakat di sekitar Kali Landak pada umumnya adalah nelayan<sup>135</sup>. Seperti yang ada pada gambar 4.12 terlihat area Kampung Deret dengan yang diberi warna merah bata. Area perkampungan tersebut dekat dengan TPI Cilincing yang diberi lingkaran kuning oleh peneliti. Di kawasan ini juga terdapat kios-kios untuk nelayan menurunkan hasil tangkapan ikannya yang ditunjukkan dengan lingkaran merah. Selain di Cilincing, kawasan Kalibaru juga akan terkena imbas dari reklamasi dan juga menjadi lokasi perluasan pelabuhan Tanjung Priok. Kalibaru merupakan area sentra ikan asin yang memiliki kualitas tinggi dan diekspor ke beberapa negara, seperti Korea, Jepang, Hongkong dan Malaysia.

#### **4.2.2. Hasil Penelitian Tentang Komunikasi Strategis yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hingga pada Tahap Nelayan Terkait Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta.**

##### **4.2.2.1. Komunikasi Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas KPKP Provinsi Jakarta dan Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara.**

Kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi. Kegiatan pengembangan ini dilakukan pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan. Selain pemanfaatan lahan, reklamasi juga ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi<sup>136</sup>. Bappeda bagian PSKLH, yang diwakilkan oleh Anni menjelaskan bahwa reklamasi 17 pulau sudah ada sejak tahun 1995. Peraturan Daerah untuk 17 pulau sudah ada melalui Perda Nomor 8 Tahun 1995 dan karena adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru tahun 2030, menyebabkan adanya revisi pada

---

<sup>135</sup> Laporan Akhir: Kajian Sosial Budaya, Arahan Urban Development Kawasan Pesisir Utara Ibukota Negara, hlm. 5-14.

<sup>136</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin ke-9, ditetapkan di Jakarta.

proyek Pantura ini<sup>137</sup>. Berdasarkan RTRW Tahun 2030 yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 menetapkan kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan strategis provinsi<sup>138</sup>.

Reklamasi 17 pulau yang diperuntukkan sebagai solusi perluasan lahan daratan diperlukan suatu komunikasi strategis antar pimpinan dan perangkat daerahnya. Menurut Anni dalam komunikasi ini, Gubernur pertama kali melakukan komunikasi dengan Bappeda mengenai rencana tata ruangnya. Kemudian Bappeda menyiapkan bahannya dan selanjutnya didiskusikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMD dan pemerintah terkait untuk diminta masukannya. Termasuk Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP)<sup>139</sup>.

Selanjutnya Anni juga menambahkan bahwa sosialisasi dilakukan juga ke konsultan publik terkait reklamasi 17 pulau dan akan dilakukan pada tahun 2015 ini. Sedangkan sosialisasi dengan SKPD, stakeholder pemerintah, serta pemerintah pusat yang memiliki aset di Pantura Jakarta sudah dilaksanakan berkali-kali. Selain itu, Anni juga mengatakan bahwa dialog dengan masyarakat khususnya nelayan seharusnya dilakukan oleh dinas (yang dimaksud ialah Dinas KPKP)<sup>140</sup>.

Pada tahap komunikasi selanjutnya di Dinas KPKP terbagi menjadi dua bidang, yakni bidang kelautan dan perikanan. Dinas KPKP bidang kelautan yang diwakili oleh Eny terlebih dahulu menjelaskan tentang permasalahan reklamasi. Menurut Eny saat ini perkembangan yang akan dihadapi oleh bidang kelautan maupun perikanan di Pantura Jakarta tidak hanya reklamasi 17 pulau saja, tetapi telah berkembang dengan adanya tanggul laut yang dikenal dengan *Giant Sea Wall*. Menurut Eny saat ini reklamasi 17 pulau sudah pada tahap *action*, kemudian berkembang lagi

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Anni, Staf Bappeda Bidang PSKLH pada tanggal 30 Maret 2015 di kantor Bappeda PSKLH, Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

<sup>138</sup> Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012, bagian menimbang poin b.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Anni, Staf Bappeda Bidang PSKLH pada tanggal 30 Maret 2015 di kantor Bappeda PSKLH, Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

<sup>140</sup> *Ibid.*

ada *Giant Sea Wall* yang mau dikerjakan karena ada rob dan banjir. Selanjutnya Eny juga menambahkan bahwa konsultan Belanda juga mau buat pulau-pulau yang seperti garuda<sup>141</sup>.

Dalam perkembangannya, reklamasi 17 pulau yang sedang berlangsung pembuatannya seringkali dikaitkan dengan program pemerintah, yaitu NCICD. Menurut Eny bahwa dalam komunikasi terkait perkembangan keseluruhan ini (dalam arti reklamasi 17 pulau, *Giant Sea Wall* maupun NCICD) Bappeda telah mengundang Dinas KPKP bidang kelautan dalam sosialisasinya. Pihak Dinas KPKP bidang kelautan merupakan SKPD yang disosialisasikan mengenai reklamasi 17 pulau beserta *Giant Sea Wall*. Namun demikian, sosialisasi tersebut hanya sebagai pemberitahuan kepada Dinas KPKP bidang kelautan. Akan tetapi tidak semua hal mengenai reklamasi diketahui oleh Dinas KPKP bidang kelautan dari Bappeda. Sebagaimana yang dijawab Eny dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut<sup>142</sup>:

*“Kita hanya ikut serta, hanya sebagai undangan dan untuk mengetahui. Jadi ketika mengetahui adanya pembangunan ini, kemudian ada lagi yang lain, saya dari dinas bidang kelautan mencari tahu. Semua ini kita mencari tahu sendiri hingga melakukan searching di internet. “*

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas KPKP bidang kelautan, adanya keseganan dari mereka untuk memberitahukan kepada masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan mereka merasa komunikasi yang dilakukan tidak mengarahkan bidang kelautan untuk menyampaikan proyek reklamasi kepada masyarakat. Padahal daerah Pantura Jakarta yang dianggap sebagai kawasan strategis ini perlu dilakukan komunikasi strategis ke setiap SKPD, terutama Dinas KPKP yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat nelayan. Selanjutnya Eny menjelaskan bahwa bidang kelautan dalam pertemuan sosialisasi

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Eny, Staf Dinas KPKP Bidang Kelautan pada tanggal 23 Maret 2015 di kantor Dinas KPKP bidang Kelautan.

<sup>142</sup> *Ibid.*

berusaha untuk menyampaikan aturan-aturan yang ada di bidang kelautan. Adapun maksud dari Eny ialah bidang ini berusaha menyampaikan peraturan terkait dengan reklamasi dari Kementerian Kelautan, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut<sup>143</sup>:

*“Kalau kita SKPD bidang kelautan berusaha untuk menyampaikan aturan-aturan yang ada di bidang kelautan artinya yang ada di Kementerian Kelautan yang terkait dengan reklamasi. Jadi mungkin saja ada aturan-aturan yang belum diterapkan oleh Pemprov kita berusaha untuk mengenalkan dan mensosialisasikan ke Pemprov. Kalau Pemprov kan tidak semuanya tahu. Makanya aturan-aturan terkait reklamasi maupun aturan-aturan yang terkait dengan pembangunan-pembangunan di laut kita sampaikan. Baik itu Undang-Undangnya atau Perpresnya. Supaya tidak bertentangan.”*

Dinas KPKP bidang kelautan juga mengingatkan Pemprov DKI terkait dengan keberadaan masyarakat nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penghitungan kerugian yang dilakukan oleh dinas tersebut. Di samping itu, Eny juga menjelaskan pentingnya dari fungsi Dinas KPKP bidang kelautan dan perikanan, yaitu<sup>144</sup>:

*“... kalau inti dari perikanan sebenarnya produksi. Ada tiga produksi, yaitu produksi budidaya, produksi perikanan tangkap yaitu nelayan, dan produksi pengolahan. Kalau kelautan itu koor nya itu ada tiga juga dan langsung pada pengembangan masyarakatnya, yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan, kemudian tentang lingkungannya maksudnya konservasi laut dan pengawasan. Jadi, di kelautan lebih ke lingkungan sedangkan perikanan lebih ke produksi.”*

Walaupun demikian, Dinas KPKP bidang kelautan tetap saja tidak berani untuk membicarakan atau menginformasikan kepada nelayan mengenai reklamasi. Padahal sudah ada nelayan yang mengeluh ke Dinas KPKP karena alat tangkapnya sudah tertutup lumpur atau malah sudah terangkat oleh mesin penyedot. Ketidakinginan untuk memberitahukan ke nelayan secara formal disebabkan adanya tiga hal, yakni *pertama*, karena

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

belum adanya arahan untuk menginfokan ke nelayan, sehingga menunggu arahan dari kepala supaya sinergis dan tidak bertentangan; *kedua*, Dinas KPKP bidang kelautan masih bingung dengan konsep yang ada; dan *ketiga*, adanya kekhawatiran jika bidang kelautan yang menginfokan akan ada persepsi ataupun anggapan bahwa proyek reklamasi ini merupakan bagian dari proyek Dinas KPKP bidang kelautan<sup>145</sup>.

Lain halnya dengan Dinas KPKP bidang perikanan yang diwakili oleh Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP, menyatakan bahwa akibat dari reklamasi ini dapat dikatakan perikanan di Pantura Jakarta nantinya kemungkinan diabaikan<sup>146</sup>. Saat ini bidang perikanan juga sedang menghitung beberapa aset yang terkena imbas dari reklamasi, seperti *breakwater*, dermaga timur, saluran, jalan, pergudangan, gedung bengkel *Workshop*, gedung *basic safety training*, gedung pelayanan *docking*, *slipway docking* dan sebagainya<sup>147</sup>.

Pihak Dinas KPKP bagian Perikanan pun mengatakan pada awal perencanaan merasa tidak dilibatkan dalam komunikasi, hanya saja mengetahuinya ketika menjelang mau dibangun. Di samping itu, pihak pengembang melakukan komunikasi ke bagian perikanan ketika mendekati aktivitas pelaksanaan proyek. Dinas KPKP bagian Perikanan menyesali sikap pengembang yang sebelumnya tidak pernah mengajak untuk membahas proyek reklamasi ini. Apalagi pihak pengembang berkunjung ke Dinas KPKP bagian Perikanan dengan kondisi yang mendesak, karena telah mendapatkan izin pembangunan dan harus segera dilaksanakan. Apabila proyek itu tidak dimulai maka dapat mengulang kembali pembuatan izinnya.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Wawancara peneliti dengan Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP pada tanggal 23 Maret 2015 di Dinas KPKP bidang Perikanan.

<sup>147</sup> Daftar Aset Eks BTPI, Dinas KPKP Bidang Perikanan.

<sup>148</sup> Wawancara peneliti dengan Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP pada tanggal 23 Maret 2015 di Dinas KPKP bidang Perikanan.

Pihak pengembang menurut Pak Agus tidak memberikan suatu solusi kepada bagian perikanan agar pelaksanaan kegiatan perikanan tidak terganggu dengan proyek reklamasi yang akan berjalan. Berikut ini penjelasan Pak Agus mengenai pihak pengembang yang berusaha supaya programnya dapat berjalan<sup>149</sup>.

*“... mereka mengejar bagaimana aset ini bisa dibongkar dulu. Dibongkar karena akan mulai pengurusan di daerah sini. Tetapi kita belum tahu bagaimana kalau ini sudah dibongkar, tapi aktivitas di sini jangan terganggu. Jadi masalahnya yang krusial itu. Ketika ini dibongkarin kemudian ini jadi masalah, nelayan disini tidak bisa melaut tidak bisa apa. Mau persiapan pun jadi sulit. Persiapan mau mengisi bahan bakar terganggu karena disini mungkin ombaknya sudah semakin besar, akibat di sini sudah dibuka sudah dibongkar. Kemudian yang kedua masalahnya, sarana ini boleh dibongkar kalau sudah ada SK Gubernur mengenai penghapusan aset. Tetapi sampai sekarang belum diproses. Kita tidak berani juga menghapus aset, kalau sekarang belum ada SKnya.”*

Adanya kekhawatiran dari Pak Agus bahwa nantinya kemungkinan perikanan akan terabaikan karena penghasilan kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah. Hal ini diakibatkan lemahnya daya saing dengan pulau yang terbangun nantinya. Pulau tersebut akan memberikan kesempatan orang-orang untuk berinvestasi dengan membangun tempat wisata, tempat kumpul kegiatan pabrik-pabrik dan juga pergudangan hingga resort. Pak Agus juga menambahkan bahwa pihak dinas pun juga tidak bisa menghambat pembangunan proyek ini. Akan tetapi dinas tetap menghimbau pengembang supaya lebih terbuka. Pihak pengembang menurut Pak Agus masih tertutup mengenai program perencanaannya<sup>150</sup>.

Terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Agus menilai bahwa informasi memang telah diberikan akan tetapi dinilai olehnya terlambat karena tidak memberikan waktu untuk

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

mengantisipasi segala dampak dari proyek tersebut. Komunikasi yang dilakukan masih terlihat sembunyi-sembunyi, walaupun berbagai institusi terlibat namun banyak juga yang terabaikan. Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan merasa tidak dilibatkan. Pada akhirnya, bagian perikanan berusaha untuk mencari solusi dan alternatif untuk nelayan. Dinas KPKP bagian Perikanan melakukan usaha untuk mendorong nelayan menangkap di laut lepas, supaya mendapat hasil tangkapan<sup>151</sup>.

Selanjutnya komunikasi strategis yang dijalankan pada tahap Walikota yang diwakilkan oleh Kepala Suku Dinas KPKP (Kasudin KPKP) juga memberikan suatu gambaran bahwa terdapat beberapa langkah dari komunikasi strategis yang berjalan. Pada pertemuan pertama dengan Kasudin KPKP menjelaskan dengan adanya pembangunan yang sedang dilakukan di Pantura Jakarta diharapkan tidak menimbulkan kemiskinan baru. Kasudin KPKP juga menambahkan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama pembangunan yang dilakukan sebaiknya dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian kedua pembangunan tersebut dapat tetap mempertahankan usaha para nelayan<sup>152</sup>.

Dalam menjalankan komunikasi kepada nelayan dalam menjelaskan perkembangan reklamasi, Kasudin KPKP dapat menyampaikannya melalui kelompok-kelompok nelayan Pantura Jakarta yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUB). Komunikasi melalui kelompok dinilai lebih efektif karena ada ketua dan juga sekretaris. Selain itu, terdapat juga pertemuan rutin yang dilakukan oleh semua kelompok tersebut secara bersama-sama. Hal ini memudahkan Kasudin KPKP agar komunikasi tidak dilakukan satu per satu<sup>153</sup>.

Namun demikian, Kasudin KPKP juga menjelaskan adanya permasalahan antar pengembang dengan Sudin serta nelayan terkait pengerjaan proyek reklamasi. Kasudin KPKP mengatakan bahwa untuk

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Una, Kasudin KPKP pada tanggal 27 Januari 2015

<sup>153</sup> *Ibid.*

daerah Kamal di Kecamatan Penjaringan sudah terdapat proyek reklamasi yang kini telah dimulai. Akibat dari proyek tersebut menyebabkan kawasan pelabuhan sudah mulai tertutup lumpur, sehingga alur sungai menjadi dangkal dan aliran air mengalir pelan. Hal ini juga mengakibatkan nelayan harus mencari jalan keluar untuk ke laut dengan mengambil jalur yang lebih jauh. Kasudin KPKP telah membicarakan hal tersebut ke Pak Walikota dan akan dirapatkan dengan Pak Walikota. Saat ini nelayan hanya dapat mengadukan permasalahannya ke Sudin KPKP<sup>154</sup>.

Menurut Kasudin KPKP, pihak pengembang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat nelayan dalam mengkomunikasikan terkait proyek tersebut. Namun demikian, dalam komunikasi tersebut tidak membahas akibat dari dampak pembangunan. Hal ini menyebabkan pihak Sudin dan nelayan tidak mengetahui hal apa saja yang nantinya menghambat kegiatan perikanan. Di samping itu, Kasudin KPKP juga tidak pernah mengetahui teknis proses pembangunan reklamasi salah satu pulau di Kamal<sup>155</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dari pihak pengembang tidak menjelaskan secara detail dari perencanaan pembangunan, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pak Agus.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa Sudin KPKP juga memberikan laporan kepada Dinas KPKP terkait dampak reklamasi tersebut. Kasudin KPKP menjelaskan bahwa tugasnya hanya sebatas pada tingkat operasional, sedangkan Dinas KPKP yang dapat mengkomunikasikan di tingkat Provinsi. Pada permasalahan ini, Kasudin KPKP telah memanggil dan memberikan surat teguran kepada pihak pengembang dan hal ini direspon dengan baik oleh mereka. Sedangkan hubungan Sudin KPKP ke nelayan dalam menghadapi persoalan ini, menugaskan Kasicam Penjaringan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Una, Kasudin KPKP pada tanggal 19 Mei 2015.

<sup>156</sup> *Ibid.*

#### 4.2.2.2. Hasil Penelitian Komunikasi Strategis di Tahap Nelayan

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa nelayan di dua Kecamatan untuk mengetahui pencapaian komunikasi strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk mengamati jalannya proses arisan sebagai wadah tempat berkumpulnya nelayan pada kecamatan tersebut dan Sudin KPKP.

Menurut Pak Kubil, nelayan asal Marunda, Kecamatan Cilincing yang juga merupakan ketua dari Paguyuban Nelayan KCM (Kalibaru, Cilincing dan Marunda) mengatakan bahwa nelayan di Kecamatan Cilincing telah mendapatkan informasi dari Sudin bagian perikanan di Walikota Jakarta Utara. Informasi yang didapat oleh para nelayan ialah penjelasan bahwa nantinya akan ada pembangunan di laut. Di samping itu, Pak Kubil juga menambahkan bahwa nantinya akan ada pulau-pulau dan nelayan juga akan dibuatkan pulau untuk nelayan. Pak Kubil juga menegaskan bahwa informasi hanya didapat dari Sudin KPKP, tidak pernah ada informasi yang diberikan dari perusahaan. Ia menambahkan bahwa perusahaan yang ada di pesisir juga tidak pernah mengadakan pertemuan dengan nelayan<sup>157</sup>.

Para nelayan di wilayah Kecamatan Cilincing dalam membangun komunikasi yang baik dengan Dinas KPKP, Sudin KPKP maupun Kasicam KPKP memanfaatkan pertemuan rutin yang disebut arisan Paguyuban KCM. Arisan tersebut mengundang para ketua-ketua KUB untuk berkumpul dan membicarakan permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan nelayan. Fungsi utama dari arisan ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari Kasudin mengenai segala macam perkembangan perikanan di wilayah Teluk Jakarta. Pada pertemuan arisan Paguyuban KCM yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015, Pak Kubil

---

<sup>157</sup> Wawancara peneliti dengan Kubil, Nelayan Marunda pada tanggal 25 Maret 2015.

telah mengagendakan pertemuan nelayan dengan Sudin KPKP, Kasicam dan juga pihak perusahaan Pelindo.



**Gambar 4.13 Arisan Paguyuban KCM di TPI Cilincing**

Paguyuban KCM mengundang Pelindo karena saat ini persoalan pembangunan di laut pada wilayah Cilincing sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Menurut Sarji, salah satu nelayan di wilayah ini mengatakan bahwa mereka tidak ada masalah jika Pelindo mendirikan bangunan di area laut, namun nelayan seharusnya juga diberikan area penangkapan. Ia juga menambahkan bahwa Pelindo membangun di area penangkapan ikan nelayan dan juga dilarang untuk menangkap pada area tersebut<sup>158</sup>. Saat ini menurut Pak Kubil dipinggir laut juga sudah banyak jembatan maupun dermaga yang pada akhirnya membendung alur keluar masuk nelayan ke laut<sup>159</sup>. Namun, pihak Pelindo yang diundang oleh Paguyuban KCM tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.

Perusahaan Pelindo juga termasuk ke dalam salah satu perusahaan yang nantinya akan membangun Pulau N dengan luas 411 hektare. Menurut Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, perusahaan

<sup>158</sup> Wawancara peneliti dengan Sarji, Nelayan Kali Baru pada tanggal 25 Maret 2015

<sup>159</sup> Wawancara peneliti dengan Kubil, Nelayan Marunda pada tanggal 25 Maret 2015.

Pelindo merupakan salah satu pengembang yang melakukan proyek reklamasi tetapi belum mendapat izin IMB dan reklamasi<sup>160</sup>.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan observasi ke wilayah Kecamatan Penjaringan terkait dengan komunikasi yang dilakukan kepada nelayan. Menurut Hendra, nelayan Kamal di Kecamatan Penjaringan terkait komunikasi mengenai reklamasi tidak memuaskan nelayan. Hal ini disebabkan, nelayan hanya mengetahui bahwa akan ada pembuatan pulau buatan dari seminar maupun rapat di perikanan. Namun, para nelayan tidak pernah disosialisasikan secara langsung oleh pihak pengembang. Menurut Agus yang juga nelayan Kamal di Kecamatan Penjaringan menegaskan bahwa pengembang hanya melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan orang tertentu saja, sedangkan nelayan tidak pernah diberikan sosialisasi reklamasi<sup>161</sup>.

Menurut Hendra, pihak pengembang lebih mengutamakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dibandingkan dengan nelayan sebagai pelaku utama yang melakukan kegiatan di Teluk Jakarta. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dinilai mampu membawa pengaruh besar dan dapat melakukan pergerakan kepada pihak pengembang. Adapun alasan lain, mengapa nelayan tidak disosialisasikan karena sudah pasti nelayan akan menolak pembangunan tersebut<sup>162</sup>.

Dalam perkembangan komunikasi reklamasi Pantura Jakarta antara pihak pengembang dan nelayan telah menimbulkan permasalahan yang menambah beban biaya operasional nelayan. Selama ini pihak pengembang tidak pernah menjelaskan kepada nelayan bagaimana proses dan teknis pengerjaan pulau tersebut. Nelayan hanya memperhatikan adanya penyemprotan pasir sehingga menyebabkan lumpur bergeser dan aliran menjadi dangkal. Selain itu, pihak PT KNI juga

---

<sup>160</sup> "Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama: Saya Senang jika Bisa Membatalkan Reklamasi", Majalah Tempo 1-7 Juni 2015, hlm. 42.

<sup>161</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Hendra dan Agus pada tanggal 10 April 2015 di Kamal, Kecamatan Penjaringan.

<sup>162</sup> *Ibid.*

tidak pernah menjelaskan AMDAL serta bermusyawarah kepada para nelayan<sup>163</sup>. Pada akhirnya, nelayan melakukan protes dan meminta pertanggungjawaban pihak pengembang, yakni PT KNI. Setelah mengajukan meminta pertanggungjawaban tersebut, pihak PT KNI menurunkan sekitar 5 ekskavator untuk menggali lumpur supaya alur keluar-masuk kapal nelayan tidak menjadi dangkal. Namun, hal ini tidak memberikan solusi yang baik kepada para nelayan karena alur kembali menjadi dangkal.

Pada Kecamatan Penjaringan, menurut Hendra juga terdapat arisan bulanan yang merupakan wadah komunikasi bagi nelayan untuk membahas permasalahan nelayan. Perkumpulan ini dinamakan Paguyuban Jaring Kait. Dalam arisan yang dilakukan pada tanggal 16 April 2015, dibahas persoalan alur nelayan yang tertutup lumpur atau sedimen, serta bagaimana mempertahankan keberadaan masyarakat nelayan akibat proyek tersebut.



**Gambar 4.14 Arisan Paguyuban Jaring Kait di TPI Kamal**

Arisan yang dilaksanakan Paguyuban Jaring Kait ini dihadiri oleh Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara, Kelurahan Kamal Muara dan Kasicam KPKP Penjaringan, serta perwakilan nelayan dari tiap-tiap KUB. Agenda utama yang menjadi topik pembicaraan arisan ini adalah membahas pendangkalan alur nelayan akibat proyek reklamasi yang

---

<sup>163</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

sedang dilakukan oleh PT KNI. Dalam pertemuan ini, Kasudin KPKP memberitahukan bahwa Sudin telah mengirimkan surat kepada pengembang berupa teguran serta peringatan agar nelayan dapat masuk ke pelabuhan dengan lancar dan tidak dangkal. Selain itu, akibat belum adanya pengkajian terhadap dampak dari reklamasi tersebut, Kasudin KPKP juga mengingatkan kepada nelayan supaya bersiap-siap jika sewaktu-waktu pintu masuk akan bergeser lebih jauh lagi dan semakin sulit untuk masuk ke dalam pelabuhan di Kamal<sup>164</sup>.

Dalam pertemuan ini, Kasudin KPKP mengharapkan pihak PT KNI jika memiliki maksud lainnya dalam pembangunan proyek diharapkan melakukan komunikasi dengan masyarakat nelayan. Hal ini untuk mencegah masalah yang timbul akibat proses reklamasi. Kasudin KPKP juga telah melakukan komunikasi dengan PT KNI dengan mengatakan bahwa dihadapan proyek tersebut terdapat masyarakat nelayan, sehingga diharapkan adanya simbiosis mutualisme diantara keduanya. Maksudnya adalah antara pengembang dan nelayan dapat saling mendukung satu sama lain dan tidak menimbulkan kemiskinan baru. Kasudin KPKP juga menekankan kepada masyarakat nelayan, Lurah maupun Camat harus dapat bekerjasama dalam menangani permasalahan dalam lingkungan masyarakat nelayan<sup>165</sup>.

#### **4.2.2.3. Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Komunikasi Strategis terhadap Proyek Reklamasi Pantura Jakarta**

Adapun pihak yang tidak menyetujui adanya reklamasi yang dilaksanakan adalah LSM lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan (KIARA). WALHI tidak pernah menyetujui adanya pembangunan reklamasi tersebut, karena menurut Dewan Daerah WALHI Jakarta, Alan mengatakan bahwa dalam

---

<sup>164</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

<sup>165</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

proyek reklamasi hal yang utama harus dibicarakan adalah mengenai AMDAL. Alan menjelaskan komunikasi yang dilakukan terkait dengan AMDAL ketika di Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik. Kemudian Alan juga menjelaskan bahwa sebenarnya tiap kali ada proyek, AMDAL tersebut tidak pernah terlihat transparan. Alan mengemukakan mengapa AMDAL tidak terlihat transparan dikarenakan yang pertama kali dilakukan oleh pengembang ialah membuat gambar dahulu dan proposal. Selanjutnya jika sudah selesai gambar dan proposal tersebut diberikan kepada Bank, apabila diterima oleh Bank maka proyek dapat dilaksanakan. Sebelum bunga Bank tersebut berjalan, pihak pengembang harus segera melakukan pembangunan dan berusaha mencari cara supaya ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah ketimbang AMDAL<sup>166</sup>.

Selain itu, KIARA yang diwakilkan oleh Abdul Halim mengatakan proyek reklamasi yang dilakukan akan menimbulkan ancaman banjir bagi warga Jakarta khususnya bagian utara<sup>167</sup>. Pada kesempatan lainnya, KIARA melalui koordinatornya, Ahmad Marthin menyatakan bahwa proyek reklamasi Pantura Jakarta hanya untuk kepentingan pengembang properti. Menurut Ahmad rencana ini tidak memperlihatkan adanya asas manfaat bagi warga Jakarta, terutama masyarakat pesisir tidak akan lagi bisa mencari ikan karena terganggu dengan proyek tersebut<sup>168</sup>.

### 4.3. PEMBAHASAN

Pada subbab ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab 4.2 akan ditelaah lebih lanjut dengan dihadapkan pada teori konflik, teori komunikasi strategis. Dalam teori komunikasi strategis

---

<sup>166</sup> Hasil Wawancara dengan Alan, Dewan Daerah WALHI Jakarta pada tanggal 22 April 2015 di Tanah Abang.

<sup>167</sup> "Pluit City: Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tak Rugikan Masyarakat Nelayan dan Lingkungan" diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/210275-pluit-city-reklamasi-pantai-utara-jakarta-tak-rugikan-masyarakat-nelayan-dan-lingkungan/> pada tanggal 2 Juli 2015.

<sup>168</sup> "KIARA: Reklamasi Teluk Jakarta Hanya untu Kepentingan Pengembang Properti" diakses dari <http://www.rmoljakarta.com/read/2015/06/09/7082/KIARA:-Reklamasi-Teluk-Jakarta-Hanya-untuk-Kepentingan-Pengembang-Properti-> pada tanggal 2 Juli 2015.

diuraikan bagaimana kesesuaian hasil penelitian yang dilakukan mengenai langkah pemerintah dalam memformulasikan informasi terkait rencana reklamasi di Pantura Jakarta dalam komunikasi strategis sebagai upaya pencegahan konflik dengan nelayan sebagai pelaku utama kegiatan perikanan.

#### **4.3.1. Komunikasi Strategis yang Dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Nelayan sebagai Upaya Pencegahan Konflik Lahan di Wilayah Pesisir Pantura Jakarta**

Pada penelitian ini, fase konflik yang ada dalam lingkungan nelayan Pantura Jakarta berada pada tahap paling rendah dalam suatu konflik. Hal ini dibuktikan dalam bagian hasil penelitian, bahwa yang terjadi hanya berupa protes dari nelayan kepada Kasudin KPKP. Diketahui bahwa tidak terdapat kekerasan terhadap protes reklamasi. Oleh sebab itu, sebelum adanya peningkatan fase konflik maka dilakukan usaha pencegahan melalui komunikasi strategis.

Komunikasi strategis menurut Guerrero-Castro merupakan strategi yang memfokuskan serta mengartikulasikan suatu cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dan berurusan dengan ancaman yang mengarah pada konflik. Namun, komunikasi strategis juga harus memenuhi dalam pemilihan peran, adanya pembimbingan, melakukan integrasi dan koordinasi untuk mendukung tujuan nasional<sup>169</sup>. Dengan demikian, untuk menganalisis pencapaian tujuan dari komunikasi strategis yang dilakukan maka peneliti menganalisa dengan menggunakan teori dari Patterson dan Radtke. Dalam teori Patterson dan Radtke terdapat tujuh langkah dan langkah ketujuh merupakan pengamatan dari evaluasi keenam langkah yang telah dilakukan. Adapun langkah-langkah teori komunikasi strategis ini telah peneliti bahas pada bab 2.

Pada langkah **pertama** dalam komunikasi strategis berdasarkan teori Patterson dan Radtke yang perlu dilakukan ialah *persiapan rencana*.

---

<sup>169</sup> Cristian E. Guerrero-Castro, "Strategic Communication for Security and National Defense: Proposal for an Interdisciplinary Approach", The Quarterly Journal, Spring 2013, p.30-32.

Persiapan yang dilakukan dalam komunikasi strategis tentunya berada pada area lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI Jakarta merupakan institusi paling tinggi yang dapat mengarahkan serta membangun komunikasi. Seperti yang dikatakan pada prinsip dari komunikasi strategis, penempatan pemimpin dalam proses komunikasi strategis sebagai upaya mendorong proses komunikasi untuk memastikan adanya integrasi komunikasi sehingga menjadi inti dari segala sesuatu yang mereka lakukan<sup>170</sup>.

Di samping itu, dalam langkah pertama ini juga seharusnya telah ditetapkan peran dan tanggung jawab dari anggota perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan reklamasi 17 Pulau di Pantura Jakarta yang dilakukan oleh beberapa pengembang. Akan tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dikatakan dalam teori. Tahap persiapan perencanaan ini tidak dilakukan dengan baik, terlihat bahwa Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta bidang Kelautan tidak menyampaikan atau melakukan sosialisasi kepada nelayan mengenai reklamasi Pantura Jakarta<sup>171</sup>. Hal ini dikarenakan Dinas KPKP bagian Kelautan dan Perikanan tidak ada tanggung jawab maupun arahan dari pimpinannya kepada mereka untuk melakukannya. Padahal dalam reklamasi tersebut bagian Kelautan dan Perikanan dalam Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian yang nantinya terkena dampak langsung dari pembangunan reklamasi.

Selain itu, pada Bappeda PSKLH yang merupakan bagian perencanaan pembangunan reklamasi menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dengan SKPD maupun Stakeholder. Namun di lain pihak, untuk pengerjaan proyek tersebut Dinas KPKP bagian Perikanan baru mengetahui akan dilakukan ketika adanya pihak pengembang yang ingin melaksanakan proyek tersebut. Persiapan rencana ini terlihat tidak

---

<sup>170</sup> "Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy" version 3.0 US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center, 24 June 2010, p(A-1) – (A-3).

<sup>171</sup> Wawancara dengan Eny, Staf Dinas KPKP Bidang Kelautan pada tanggal 23 Maret 2015 di kantor Dinas KPKP bidang Kelautan.

berjalan dengan baik, karena adanya bagian yang tidak mendapatkan informasi dari pihak Bappeda. Hal lain yang menunjukkan kurangnya persiapan rencana ialah ketika terdapat beberapa proyek pulau yang sudah terlaksana sebelum tahun 2015 maupun yang akan dilaksanakan, pihak Bappeda baru akan melakukan konsultasi publik dengan pihak LSM, Asosiasi serta Perguruan Tinggi yang memahami reklamasi yang direncanakan pada tahun 2015<sup>172</sup>.

Persiapan rencana yang merupakan langkah pertama yang penting dengan maksud mengintegrasikan komunikasi dengan pihak-pihak SKPD yang berkaitan dengan reklamasi. Walaupun dikatakan oleh pihak Bappeda PSKLH bahwa mereka telah melakukan sosialisasi namun tidak dapat menetapkan peran dan tanggung jawab kepada Dinas KPKP bagian Perikanan dalam proses perencanaan. Akibatnya, Dinas KPKP bagian Perikanan merasa tidak memiliki tanggung jawab apapun serta tidak mengetahui secara pasti kapan proyek akan dilaksanakan.

Selanjutnya pada langkah **kedua** ialah melakukan analisis situasi sebagai fondasi rencana. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap lingkungan disekitar area di Pantura Jakarta yang akan mempengaruhi rencana dari komunikasi yang akan dibangun. Dengan mengumpulkan informasi terkait pengaruh tersebut, peneliti membagi kedalam dua, yakni pengaruh internal dan eksternal. Dalam pengaruh internal memperlihatkan adanya kelemahan dalam fondasi Pemprov DKI Jakarta dalam menginstruksikan SKPDnya agar dapat terlibat dalam proyek reklamasi ini. Hal ini dijelaskan oleh Pak Agus yang merupakan Kepala bagian Perikanan, Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta, bahwa komunikasi yang dilakukan masih sembunyi-sembunyi dan banyak institusi yang terlibat namun terabaikan<sup>173</sup>. Sedangkan pengaruh eksternal dapat dilihat bahwa komunikasi yang dilakukan mendapat tekanan dari luar yang mempengaruhi tindakan dari Pemprov DKI Jakarta. Tekanan dari luar

---

<sup>172</sup> Wawancara peneliti dengan Anni staff Bappeda bidang PSKLH pada tanggal 30 Maret 2015.

<sup>173</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Agus sebagai Kepala bagian Perikanan, Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015.

tersebut ialah berupa lingkungan sosial yang menolak adanya pembangunan reklamasi Pantura Jakarta yang dilakukan oleh WALHI dan KIARA. Selain itu, tekanan dari luar yang berasal dari sisi ekonomi adalah pengaruh pihak pengembang dan masyarakat nelayan di sekitar Pantura Jakarta.

Tekanan dari luar merupakan pengaruh yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi hubungan komunikasi strategis yang dilakukan. WALHI dan KIARA merupakan dua LSM yang mengkampanyekan bahwa reklamasi hanya akan merusak lingkungan hidup di daerah pesisir Pantura Jakarta. Dengan adanya kampanye ini, maka akan terdapat penentangan dari berbagai pihak luar terhadap proyek reklamasi Pantura Jakarta. Sedangkan tekanan yang dilakukan pengembang ialah bagaimana caranya agar proyek mereka dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan<sup>174</sup>. Namun demikian, pihak pengembang mendapat benturan dari masyarakat nelayan karena area tangkap ikan mereka telah diambil oleh pengembang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perekonomian nelayan.

Langkah yang **ketiga** dalam komunikasi strategis ialah menentukan audiens sebagai sasaran dari fokus rencana. Pada langkah ini, pemimpin dari suatu organisasi memahami sasaran utamanya dan mengetahui apa yang penting bagi mereka, sehingga organisasi dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan audiensnya. Dalam hal ini, terdapat sasaran utama audiens yaitu nelayan.

Nelayan merupakan sasaran dari fokus rencana yang harus dipertahankan keberadaannya. Adapun alasannya ialah nelayan merupakan pelaku utama dalam aktivitas perikanan di sekitar Pantura Jakarta; nelayan memiliki hubungan yang dekat dengan Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara maupun Kasicam pada tiap kecamatan; dan

---

<sup>174</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Agus sebagai Kepala bagian Perikanan, Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015.

nelayan sudah hidup turun-temurun di lingkungan Pantura Jakarta<sup>175</sup>. Keberadaan nelayan perlu dipertahankan karena jika dilihat dari segi profesi mereka merupakan pekerja yang sulit untuk berubah alih profesi<sup>176</sup>. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan serta pendidikan yang dimiliki oleh para nelayan, sebagaimana yang informasi yang didapatkan dari nelayan maupun Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara.

Pemprov DKI Jakarta perlu memperhatikan kelompok-kelompok nelayan di sekitar Pantura Jakarta, karena dari kelompok tersebutlah reklamasi yang sedang dilakukan dapat dinilai apakah menjadi suatu program yang penting bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar pesisir Pantura Jakarta atau tidak. Akan tetapi, nelayan yang merupakan audiens utama yang bersinggungan langsung dengan reklamasi tidak masuk ke dalam forum sosialisasi oleh pihak Bappeda PSKLH karena dianggap mereka berada dibawah Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian langkah yang *keempat* ialah membina dukungan audiens sebagai tujuan dari komunikasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang diharapkan dari audiens, serta melakukan pembinaan untuk mendapatkan dukungan mereka. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam membina dukungan nelayan, Kasicam di dua kecamatan bertugas untuk mendekati diri kepada masyarakat nelayan supaya mengetahui apa yang diinginkan serta diperlukan dari mereka.

Nelayan di lingkungan Pantura Jakarta menginginkan lahan area penangkapan ikan mereka tidak terganggu dan juga tidak adanya pengendapan di alur yang mereka lalui untuk ke laut. Nelayan semenjak adanya proyek reklamasi ini tidak dapat mencapai target mereka dalam menangkap ikan. Hasil tangkap nelayan semakin berkurang dan mereka menanggung beban biaya bahan bakar yang lebih akibat area

---

<sup>175</sup> Catatan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa nelayan, yakni nelayan serok, nelayan ikan kembung, nelayan bubu, nelayan jaring tangkap.

<sup>176</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Kubil pada tanggal 25 Maret 2015 di Marunda, Kecamatan Cilincing.

penangkapan ikan semakin jauh. Apa yang terjadi pada nelayan ini tentunya menjadi bahan target dari pembinaan yang dilakukan oleh Kasicam maupun Sudin KPKP Pemprov DKI Jakarta, dengan memberikan sarana bagi kapal yang menunjang mereka untuk melaut ke tempat yang lebih jauh lagi. Akan tetapi, pada langkah ini keefektifan pencapaian tidak dapat diukur karena tidak ada kesiapan dari SKPD untuk mengatur strategi dalam mempertahankan kondisi dari nelayan.

Langkah yang **kelima** ialah membingkai isu dan pengembangan pesan. Pada tahap ini, peneliti mengamati adanya pertemuan yang dilakukan sebulan sekali yang berfungsi sebagai wadah untuk menjelaskan permasalahan selama reklamasi berlangsung. Pada tahap kelima ini terdapat tiga analisa pendukung yang harus dihubungkan dalam membangun komunikasi strategis ke nelayan. Adapun analisa tersebut ialah menjelaskan masalah yang terjadi selama proyek reklamasi; menjelaskan bagaimana audiens untuk ikut peduli dengan pembangunan yang sedang dilakukan; dan memahami apa yang ingin audiens lakukan, pikirkan dan rasakan.

Pada saat menjelaskan masalah yang terjadi selama proyek reklamasi, nelayan dikumpulkan dalam pertemuan arisan bulanan di TPI Kamal. Kasudin KPKP Jakarta Utara, menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini ialah tertutupnya alur untuk keluar-masuknya kapal nelayan akibat reklamasi. Akan tetapi, di sisi lain nelayan mengatakan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya di alur tetapi mereka juga kesulitan untuk menangkap ikan di sekitar pesisir.

Selanjutnya dalam menjelaskan agar audiens peduli dengan proyek tersebut, Kasudin KPKP hanya menekankan bahwa dirinya juga tidak menginginkan pembangunan tersebut menjadi suatu tempat yang bagus sedangkan wilayah nelayan menjadi kotor akibat sedimen yang menumpuk<sup>177</sup>. Oleh sebab itu. Kasudin KPKP menginginkan adanya

---

<sup>177</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

kerjasamanya antar pengembang dalam menjaga lingkungan dan melakukan komunikasi tiap kali akan melakukan kegiatan di pulau yang sedang di bangun.

Kemudian dalam memahami audiens maka Kasudin KPKP dalam mengembangkan pesan tetap melihat pada perasaan, kepentingan maupun komitmen dari nelayan. Nelayan memiliki kepentingan di laut untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Posisi nelayan dalam proyek reklamasi ini menjadi susah karena sebelumnya nelayan merasa tidak ada komunikasi maupun koordinasi yang dilakukan oleh pihak pengembang kepada mereka. Namun, dengan mengumpulkan nelayan dalam arisan ini dapat menjaga komitmen para nelayan untuk tidak melakukan aksi demo yang tidak wajar<sup>178</sup>.

Dalam membingkai isu dan pengembangan pesan kepada nelayan sebagai audiens yang dilakukan oleh Kasudin KPKP Jakarta Utara berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan lancarnya kegiatan sesi tanya-jawab terkait permasalahan reklamasi di daerah Kamal di saat arisan bulanan Paguyuban Jaring Kait. Dalam arisan ini juga nelayan sebagai pelaku utama yang merasakan dampak langsung reklamasi, dapat mengutarakan keinginan mereka agar dapat pergi melaut dengan lancar. Kasudin KPKP pun juga merespon apa yang dirasakan oleh nelayan dan berencana akan mengirimkan surat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak pengembang.

Pada langkah yang **keenam** mengenai sarana dan penyebarluasan strategi sebagai usaha memajukan rencana dilakukan melalui arisan bulanan paguyuban. Sarana penyebaran komunikasi yang dapat digunakan dalam lingkungan nelayan adalah melalui pertemuan rutin tersebut. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan nelayan jika disebarluaskan melalui media internet. Kasudin KPKP merupakan aktor yang berfungsi dengan baik dalam merespon nelayan di Kecamatan

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

Cilincing maupun Penjaringan. Strategi yang dilakukan untuk bagaimana mempengaruhi tingkah laku mereka ialah dengan pembinaan dan arahan dari Kasudin KPKP atau Kasicam KPKP agar segala sesuatunya dapat dimusyawarahkan dengan baik<sup>179</sup>.

Selanjutnya pada langkah *ketujuh*, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses perencanaan komunikasi strategis yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan tiap-tiap SKPDnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti pada langkah sebelumnya terlihat adanya bagian yang tidak mendapat informasi dengan baik. Dalam mekanisme komunikasi antar SKPD tidak semua informasi terkait reklamasi tersampaikan dengan baik. Seperti Dinas KPKP bagian Kelautan yang harus mencari informasi sendiri terkait pembangunan dan tidak dapat mengatakan kepada nelayan mengenai proyek tersebut.

Selain itu, pada saat komunikasi berlangsung, pekerjaan proyek reklamasi juga sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan Dinas KPKP bagian Perikanan yang berkaitan dengan aktivitas perikanan tidak dapat menyiasati dampak pembangunan tersebut. Di samping itu, surat keterangan AMDAL yang menjadi acuan bagi pengembang juga dinilai sederhana sehingga tidak dapat dijadikan referensi bagi perikanan<sup>180</sup>. Kemudian antar pengembang dan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta serta Sudin Walikota Jakarta Utara tidak mengetahui teknis pelaksanaan pembangunannya, hanya mengetahui bahwa proyek tersebut telah berjalan.

Namun, dalam meringkai isu reklamasi hingga membina nelayan sebagai audiens utama pada komunikasi strategis berjalan dengan baik. Kasudin KPKP dapat menyampaikan pesan kepada nelayan melalui arisan bulanan dan dapat mencegah keinginan dari nelayan untuk tidak terjadi konflik akibat dari reklamasi. Sebagaimana terlihat dalam hasil

---

<sup>179</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

<sup>180</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta.

penelitian yang telah peneliti bahas pada subbab 4.2 dan langkah ketiga hingga keenam. Dengan demikian, dalam hasil observasi peneliti terkait evaluasi komunikasi strategis saat ini belum berjalan maksimal dikarenakan ketidakteraturan proses komunikasi yang dijalankan. Walaupun demikian, keseluruhan langkah dalam teori ini sudah dilakukan dan memperlihatkan tidak adanya konflik yang melebihi fase pertama konflik.

#### **4.3.2. Dampak Komunikasi Strategis yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap para Nelayan.**

Komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui para SKPDnya kepada para nelayan telah menimbulkan beberapa dampak. Adapun dampak tersebut dapat dicermati dari langkah-langkah yang telah dianalisa oleh peneliti. Dampak utama dari komunikasi strategis ini ialah berhasilnya pencegahan konflik di lingkungan nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya peningkatan fase konflik pada permasalahan reklamasi di Pantura Jakarta. Hanya saja protes-protes yang diajukan oleh nelayan ketika arisan bulanan di Cilincing dan Penjaringan. Di samping itu, dengan berjalannya langkah kelima dengan baik maka Kasudin KPKP dapat memahami persoalan nelayan.

Dampak lainnya ialah komunikasi antar pengembang dan nelayan yang buruk, karena dijalankannya komunikasi strategis dengan baik maka Kasudin KPKP mengetahui adanya permasalahan antar mereka. Oleh karena itu, Kasudin KPKP akan mempertemukan nelayan dengan pihak pengembang. Sebenarnya Bappeda PSKLH telah mengatakan bahwa pengembang yang akan melakukan proyek reklamasi seharusnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat di sekitar area proyek sebagai berikut<sup>181</sup>:

*“ ... tiap perusahaan yang mau melakukan reklamasi harus ada AMDAL, nah mereka harus dapat rekomendasi AMDAL.*

---

<sup>181</sup> Wawancara peneliti dengan Anni Staff di Bappeda bidang PSKLH pada tanggal 30 Maret 2015 di Kantor Bappeda bidang PSKLH.

*Kemudian kalau pembuatan AMDAL itu perusahaan harus undang masyarakat. Dialognya disitu.”*

Di samping itu, pengembang juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah cair dan padat, mengeruk sedimentasi sungai di sekitar pulau reklamasi, memantau sedimentasi di mulut sungai, kanal antara pulau reklamasi dan daratan pantai, serta anak kanal antarpulau reklamasi<sup>182</sup>. Akan tetapi, hal ini baru dilakukan ketika ada teguran dari nelayan sekitar ketika endapan sedimen sudah mulai meningkat. Di samping itu, nelayan mengatakan pihak pengembang sejak pertama membuat pulau juga tidak berpamitan kepada nelayan. Para nelayan juga tidak diberikan solusi maupun alternatif bagi wilayah tangkap yang kini telah menjadi tempat reklamasi.

Berdasarkan pernyataan nelayan tersebut, maka Kasudin KPKP berusaha untuk menjembatani antara nelayan dan pengembang sebagaimana yang dikatakan ketika arisan bulanan Paguyuban Jaring Kait<sup>183</sup>.

Selanjutnya ide dari Pak Musyawarah yang saat ini menjabat sebagai Kasicam KPKP Penjaringan, pada tahun 2014 pertama kali mendirikan paguyuban di Cilincing, serta membuat arisan pada perkumpulan nelayan. Sehingga hal ini memudahkan hubungan sosial antar masyarakat nelayan. Fungsi dari arisan ini untuk menjaga kesatuan dalam lingkungan nelayan<sup>184</sup>. Walaupun demikian, dalam permasalahan reklamasi tetap saja para nelayan mengajukan protes seperti yang terjadi di wilayah Kamal maupun Cilincing, namun tidak mengetahui kepada siapa mereka harus protes. Akhirnya, seperti yang terjadi di Kamal ada beberapa nelayan yang melakukan secara pribadi-pribadi maupun meminta bantuan tokoh masyarakat untuk diketemukan dengan pihak pengembang. Namun, hanya menguntungkan pihak pribadi tidak untuk

<sup>182</sup> “Pulau Baru di Teluk Jakarta”, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015, hlm. 39.

<sup>183</sup> Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

<sup>184</sup> Catatan penelitian wawancara tanpa rekaman dengan Pak Musyawarah, Kasicam KPKP Penjaringan pada tanggal 10 April 2015.

nelayan keseluruhan, sebagaimana hasil wawancara dengan Sutrahman nelayan di Kecamatan Penjaringan<sup>185</sup>.

Sedangkan di Kecamatan Cilincing, dalam menjaga hubungan antar masyarakat nelayan maka Kubil yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban KCM, berusaha untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu jika terdapat masalah dengan pihak pengembang. Hal ini dikarenakan untuk mencegah masuknya kelompok luar yang bukan bagian dari masyarakat nelayan yang tidak suka dengan pengembang. Adapun langkah yang dilakukan oleh Kubil jika terjadi masalah adalah melaporkan terlebih dahulu ke Kasicam KPKP Cilincing kemudian diteruskan ke Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara<sup>186</sup>.

Paguyuban tersebut memudahkan bagi Kasudin KPKP untuk menanyakan apa yang menjadi kemauan masyarakat nelayan. Selanjutnya dengan adanya paguyuban terjalinlah komunikasi yang komprehensif dengan pihak nelayan. Seperti yang dikatakan oleh Hesti bahwa dalam pengendalian dampak negatif dari proyek reklamasi di Pantura Jakarta maka diperlukan suatu komunikasi yang komprehensif<sup>187</sup>. Hal ini dikarenakan reklamasi tersebut dibangun di wilayah yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian masyarakat Jakarta maupun pemerintahan. Wilayah tersebut juga terdapat aset-aset pemerintah dalam membangun kemajuan perikanan di DKI Jakarta, sehingga komunikasi strategis berguna untuk memberikan arahan dengan cara persuasif untuk mencapai tujuan bersama.

Selain dampak di atas, ada juga dampak dari kurang keteraturannya dari komunikasi strategis yang dijalankan, seperti yang telah dibahas dalam subbab 4.3.1. ketidakaturannya menyebabkan

---

<sup>185</sup> Catatan penelitian wawancara tanpa rekaman dengan Sutrahman, nelayan di Kamal pada tanggal 16 April 2015.

<sup>186</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Kubil pada tanggal 25 Maret 2015 di Marunda, Kecamatan Cilincing.

<sup>187</sup> Septian Deny, "Masyarakat Tak Perlu Takut dengan Reklamasi", diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2213845/masyarakat-tak-perlu-takut-dengan-reklamasi> pada tanggal 15 April 2015.

adanya perasaan dari Dinas KPKP bidang Perikanan bahwa komunikasi yang dilakukan secara parsial, sehingga menimbulkan dampak pada kegiatan nelayan. Adapun dampak terkait kegiatan perikanan nelayan, yakni nelayan kesusahan untuk pergi ke laut akibat endapan sedimen dari proyek reklamasi yang menutupi jalur mereka. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dikatakan bahwa reklamasi 17 pulau di Pantura Jakarta akan menyebabkan tertahannya laju air dan sedimen 13 sungai Jakarta<sup>188</sup>. Sungai-sungai tersebut ialah Kali Kamal, Kali Tunjungan, Cengkareng Drain, Kali Muara Angke, Kali Duri Ledeng, Kali Opak, Kali Anak Ciliwung I, Kali Ciliwung, Kali Ancol, Kali Lagoa, Kali Sunter, Cakung Drain, dan Kali Blencong<sup>189</sup>. Akibat tertahannya laju air, menyebabkan lumpur dan sampah yang dibawa oleh sungai-sungai tersebut terjebak di selat yang memisahkan pulau baru dengan daratan Jakarta<sup>190</sup>.

Selain itu, kegiatan perikanan lainnya yang terganggu ialah nelayan yang tadinya dapat menangkap ikan disekitar pesisir pantai kini tidak dapat melakukannya karena adanya lumpur. Hal ini menyebabkan nelayan yang tadinya tidak membutuhkan modal yang besar untuk berlayar kini harus pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendra nelayan dari Kamal, yakni<sup>191</sup>:

*“Kalau dulu hasil ikan masih melimpah karena habitat alamian ikan masih alami, kalau sekarang semenjak ada reklamasi habitat alaminya saja sudah terganggu. Hal ini dikarenakan lokasi mereka untuk beranak-pinak sudah tidak ada, sudah jadi fondasikan. Jadi area penangkapan kita semakin keluar. Hanya sekarang ini dengan jarak semakin keluar, tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti kapal, yang ada saat ini kan kapal-kapal kecil. Dampak reklamasi itu banyak, pertama yang tadinya kita menangkap ikan tidak jauh, sekarang semakin jauh. Kenapa? Karena tempat biasa untuk menangkap itu airnya*

---

<sup>188</sup> “Ancaman Bencana di Teluk Jakarta”, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015, hlm. 27.

<sup>189</sup> Ary Sudijanto, “Reklamasi dan Dampaknya terhadap Ekosistem Perairan”, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

<sup>190</sup> “Ancaman Bencana di Teluk Jakarta”, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015, hlm. 27.

<sup>191</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Hendra dan Agus pada tanggal 10 April 2015 di Kamal, Kecamatan Penjaringan.

*sudah keruh diakibatkan adanya penyemprotan pasir dampak kemana-mana.”*

Selanjutnya Agus juga menambahkan, bahwa<sup>192</sup>:

*“Jadi, karang-karang habis tertutup pasir dan lumpur. Kedua, jarak yang tadinya cuma 5-10mil sekarang sekarang jadi 20mil.”*

Kemudian, selain adanya lumpur, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengatakan limbah industri yang dibawa oleh aliran sungai akan menambah kerusakan lingkungan<sup>193</sup>. Kubil seorang nelayan di Marunda menjelaskan juga bahwa limbah kini telah mengumpul di pesisir. Akibatnya dirinya yang tadinya dapat rajungan mencapai 7kg tetapi karena adanya limbah hanya mendapat 20 sampai 30 rajungan dan besoknya kosong tidak ada apa-apa. Di samping permasalahan lumpur dan limbah, Kubil juga menjelaskan<sup>194</sup>:

*“Kemudian sekarang dipinggir laut sudah banyak jembatan, dermaga dan segala macam ini dibendung begitu kalau bahasa saya, artinya yang tadinya saya jalan lurus habis solar satu liter, tetapi karena sekarang saya putar jalan itu, hanya untuk putarnya saja bisa dua liter. Artinya pengeluaran nelayan akibat adanya pembangunan dipinggir-pinggir laut itu kayak Pelindo atau apa, membuat pengeluaran nelayan bertambah.”*

Berdasarkan hasil penelitian ini, kegiatan perikanan nelayan menjadi terganggu. Mereka juga mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit, namun biaya operasionalnya makin tinggi. Dalam penelitian ini memang tidak ada yang mengetahui dampak secara langsung yang terjadi akibat reklamasi, seperti halnya yang disampaikan oleh Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dari pembangunan reklamasi tersebut sebagai berikut<sup>195</sup>:

*“Dampak selama proses pembangunan itu tidak tahu, saya pun juga tidak tahu. Saya pikir secara teknis mau dipasang cerucuk*

---

<sup>192</sup> *Ibid.*,

<sup>193</sup> “Ancaman Bencana di Teluk Jakarta”, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015, hlm. 27.

<sup>194</sup> Wawancara peneliti dengan Nelayan Kubil pada tanggal 25 Maret 2015 di Marunda, Kecamatan Cilincing.

<sup>195</sup> Wawancara peneliti dengan H. Una, Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara pada tanggal 19 Mei 2015 di Kantor Suku Dinas KPKP Walikota Jakarta Utara.

*dulu, baru diuruk. Ternyata tidak. Itu kan teknis yah, teknis pembangunan. Ternyata oh begini.. kirain dipasang cerucuk baru.”*

Kemudian dampak lainnya adalah terkait dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Dinas KPKP bagian Perikanan maupun Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara telah mengetahui kesulitan dari nelayan yang terkena dampak dari reklamasi. Kesulitan tersebut berupa menurunnya hasil tangkap dari nelayan karena lahan tangkap yang sudah jarang ikannya, sulitnya akses keluar-masuk kapal untuk melaut dan meningkatnya biaya operasional nelayan.

Dalam penelitian ini hubungan tingkat kesejahteraan nelayan terhadap komunikasi strategis ialah akibat tidak adanya arahan komunikasi yang dijalankan dari Pemprov DKI Jakarta kepada SKPDnya, menjadikan Dinas KPKP bagian Kelautan maupun bagian Perikanan tidak dapat mengambil keputusan apa-apa serta belum dapat membuat suatu solusi bagi nelayan di Pantura Jakarta. Namun demikian, Dinas KPKP bagian Perikanan telah mencanangkan berbagai program sebagai usaha untuk membantu nelayan di Pantura Jakarta dengan bantuan kapal supaya dapat menangkap ikan ke tengah laut. Di samping itu, Dinas KPKP bagian Perikanan juga mengatakan bahwa perlu adanya kompensasi yang diberikan kepada nelayan<sup>196</sup>. Hal ini dilakukan agar mereka tidak resah dengan adanya pembangunan reklamasi yang mengganggu kegiatan perikananannya. Bila tidak adanya solusi ataupun bantuan kepada nelayan, Kasudin KPKP Walikota Jakarta Utara mengkhawatirkan timbulnya kemiskinan baru pada masyarakat nelayan di sekitar Pantura Jakarta. Hal ini dikarenakan daya saing yang tidak seimbang antara pengembang dan masyarakat nelayan yang mayoritas masih bersifat tradisional.

---

<sup>196</sup> Wawancara peneliti dengan Pak Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. SIMPULAN**

Hasil komunikasi strategis yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada nelayan sebagai upaya pencegahan konflik lahan di wilayah Pantura Jakarta akibat reklamasi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Selain itu, dari hasil komunikasi strategis juga dapat disimpulkan dampak yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pantura Jakarta. Adapun kedua kesimpulan tersebut, yaitu:

**Pertama**, yaitu komunikasi strategis yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya pencegahan konflik lahan pada nelayan di wilayah pesisir Pantura Jakarta tidak berjalan secara maksimal dikarenakan ketidakteraturan proses penyampaian komunikasi. Walaupun demikian, keseluruhan langkah dalam komunikasi strategis telah dilakukan. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada langkah pertama, persiapan rencana dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengintegrasikan komunikasi dengan pihak-pihak SKPD yang berkaitan dengan reklamasi belum terlaksana dengan baik, karena tidak terlihat adanya penetapan peran dan tanggung jawab kepada Dinas KPKP bagian Perikanan maupun Kelautan dalam proses perencanaan.

Begitu juga pada langkah kedua yang menganalisis situasi sebagai fondasi rencana dari komunikasi strategis terdapat kelemahan pada Pemprov DKI Jakarta untuk menginstruksikan dan melibatkan SKPDnya dalam proyek reklamasi. Sedangkan pengaruh tekanan dari luar yang menolak adanya pembangunan reklamasi Pantura Jakarta, seperti yang

dilakukan oleh WALHI dan KIARA dan juga nelayan mempengaruhi fondasi tersebut. Pada langkah ketiga hingga langkah keenam, komunikasi dilakukan oleh Kasudin KPKP dan Kasicam KPKP karena mereka merupakan bagian terdekat dengan nelayan. Pembinaan yang dilakukan juga berasal dari Kasudin KPKP dan Kasicam KPKP. Apa yang terjadi pada nelayan akibat dari reklamasi menjadi bahan target dari pembinaan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian mengenai sarana dan penyebarluasan strategi sebagai usaha memajukan rencana dapat dilakukan pada saat arisan bulanan nelayan. Hal ini disebabkan arisan bulanan merupakan media penyebarluasan informasi yang paling berjalan dan mudah dimengerti oleh para nelayan. Pada langkah ketujuh mengenai evaluasi proses dari perencanaan komunikasi strategis pada Pemprov DKI Jakarta menjadi tidak maksimal karena kurangnya arahan di langkah pertama dan kedua. Namun, usaha pencegahan konflik di lingkungan nelayan akibat reklamasi Pantura Jakarta dapat terlaksana.

**Kedua**, yaitu dampak yang terjadi dari komunikasi strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni berhasilnya pencegahan konflik di lingkungan nelayan. Penilaian keberhasilan ini ditunjukkan dengan tidak adanya peningkatan fase konflik pada permasalahan reklamasi di Pantura Jakarta. Penggunaan komunikasi strategis pada langkah kelima, dalam membingkai isu dan pengembangan pesan telah mampu menjelaskan masalah dan kemauan dari nelayan. Sehingga persoalan tersebut dapat dipahami. Selanjutnya dengan adanya komunikasi strategis dapat mengetahui adanya komunikasi yang tidak berjalan antara pengembang dan nelayan. Selain itu, hubungan sosial antar nelayan dapat dikontrol melalui paguyuban yang dibangun oleh Kasicam KPKP.

Selanjutnya akibat dari adanya ketidakteraturan komunikasi strategis yang dijalankan, menyebabkan kegiatan perikanan nelayan terganggu. Ketergangguan tersebut karena adanya penumpukan sedimen dari proyek reklamasi. Penumpukan ini dapat terjadi akibat tidak

dikomunikasikan dampak dari proses pengurusan reklamasi ke SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya, kesejahteraan nelayan juga menurun karena Dinas KPKP bagian Kelautan dan Perikanan tidak dapat mengambil keputusan maupun solusi bagi nelayan Pantura Jakarta yang terkena imbas dari reklamasi. Pada akhirnya, Dinas memberikan bantuan berupa kapal kepada nelayan untuk mengurangi keresahannya.

**Ketiga**, yaitu nelayan Pantura Jakarta memiliki saluran media komunikasi khusus dengan pejabat Pemkot Jakarta Utara maupun Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta melalui arisan bulanan paguyuban. Di samping itu, rutinitas dari kegiatan arisan Paguyuban ini menjadi suatu kearifan lokal bagi masyarakat nelayan Pantura Jakarta.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan konflik lahan pada nelayan di wilayah pesisir Pantai Utara Jakarta, maka saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Saran Teoritis**

Penelitian tentang komunikasi strategis sebagai suatu analisa terhadap pencegahan konflik lahan dalam lingkungan nelayan di Pantura Jakarta menjadi suatu hal yang dibutuhkan dalam kajian ilmu damai dan resolusi konflik. Hal ini dikarenakan teori komunikasi strategis memiliki suatu langkah-langkah sebagai upaya untuk menghindari tingkah laku yang mengarah pada konflik. Selain itu, komunikasi strategis dapat membantu untuk memfokuskan serta mengartikulasikan suatu cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dan berurusan dengan ancaman yang mengarah pada konflik.

### 5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai komunikasi strategis Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan konflik lahan pada nelayan di wilayah pesisir Pantura Jakarta, Pemprov DKI Jakarta agar dapat memperhatikan cara berkomunikasi terhadap suatu lingkungan strategis yang menjadi tujuan pembangunan. Dalam menyangkut suatu tujuan nasional yang bernilai strategis, seperti halnya Pantura Jakarta maka komunikasi yang dibutuhkan adalah komunikasi strategi untuk mensinergiskan penyampaian pesan dari pusat (yakni Pemprov DKI Jakarta) ke lapisan bawah pada struktur SKPD yang bersangkutan hingga ke lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mengendalikan informasi, mengartikulasikan pesan dan membangun strategi yang mengarah pada pencegahan konflik.

Adapun saran-saran praktis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini:

**Pertama**, yakni saran bagi pemerintah daerah, terutama Pemprov DKI Jakarta yang berada pada posisi paling atas dalam pemerintahan daerah di DKI Jakarta harus menggunakan kepemimpinannya untuk mendorong proses komunikasi strategis. Hal ini dikarenakan, Pemprov DKI Jakarta perlu adanya keseriusan dalam mengelola wilayah strategisnya yakni Pantura Jakarta yang didalamnya terdapat masyarakat nelayan. Adapun cara agar komunikasi tersebut sampai ke nelayan maka Pemprov DKI Jakarta harus dapat mengintegrasikan komunikasinya berdasarkan tindakan, kata-kata dan gambaran yang dikoordinasikan secara internal kepada SKPDnya, yakni Bappeda PSKLH dan Dinas KPKP bagian Kelautan dan Perikanan; dan eksternal kepada pengamat lingkungan, masyarakat nelayan pada khususnya dan juga pihak pengembang.

**Kedua**, yakni pada tingkat operasional dalam komunikasi strategis untuk perencanaan komunikasi di lapangan yang berhubungan langsung

dengan nelayan sebagai audiens utama, yakni dituntut untuk memahami dari sikap perilaku maupun identitas dari nelayan. Pada dasarnya apa yang dilakukan maupun yang ditunjukkan oleh pengembang maupun tim dari Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi, mungkin tidak seperti yang dilihat oleh para nelayan. Oleh sebab itu, membentuk persepsi maupun penilaian yang positif pada diri nelayan terhadap tindakan yang dilakukan oleh tim yang diberikan peran dan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta menjadi suatu hal yang penting.

**Ketiga**, yakni Sudin KPKP Walikota Jakarta Utara yang merupakan aktor terdekat dengan nelayan yang memiliki kepanjangan tangan melalui Kasicam KPKP di tiap kecamatan, harus dapat membangun dialog antara pihak pengembang dan nelayan. Kasudin KPKP maupun Kasicam KPKP harus dapat membangun kepercayaan serta respon dari nelayan agar tercipta saling pengertian diantara pemerintah, pengembang dan masyarakat nelayan.

**Keempat**, yakni Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur harus dapat menginstruksikan SKPDnya untuk mengubah cara sosialisasinya yang dilakukan adalah sebelum proyek reklamasi dilaksanakan. Gubernur sebagai pemimpin harus memperhatikan bahwa komunikasi yang dibangun antar tiap-tiap SKPDnya memiliki dampak strategis bagi proyek reklamasi. Semua SKPD yang berkaitan dengan proyek reklamasi, terutama Dinas KPKP bagian Kelautan dan Perikanan harus menjadi bagian dari integrasi komunikasi. Oleh sebab itu, Gubernur harus mampu mengarahkan SKPDnya agar dapat menjangkau nelayan melalui pesan yang disesuaikan dan relevan dengan mereka.

**Kelima**, yakni perlu adanya tim khusus yang dapat mengevaluasi pencapaian komunikasi strategis dengan suatu keadaan yang telah ditetapkan agar terhindar dari kesalahpahaman yang serius. Di samping itu, tim tersebut juga bertugas untuk menganalisis komunikasi strategis secara terus-menerus dan memberikan masukan terhadap penilaian. Setelah dilakukan penilaian maka akan kembali lagi ke dalam

perencanaan dan tindakan agar dapat mengadaptasikan kebutuhan baru yang termuat dari hasil analisa.

**Keenam**, yakni Pemprov DKI Jakarta perlu untuk mengarahkan pengembang agar dapat membangunkan pulau untuk nelayan terlebih dahulu dengan posisi terluar dibandingkan dengan mendahulukan pulau yang bersifat komersial.

**Ketujuh**, yakni Perlunya Pemprov DKI menganggarkan keuangan lebih untuk memfasilitasi pembinaan dan pendidikan pelayaran bagi nelayan, agar mereka mempunyai sertifikasi untuk menggunakan kapal besar.

**Kedelapan**, yakni peneliti juga memberikan saran kepada pengembang supaya melakukan penyuluhan dan pembinaan bagi nelayan, agar mereka dapat beralih profesi ke perusahaan pengembang jika ternyata proyek tersebut menurunkan kesejahteraan nelayan.

**Kesembilan**, yakni kajian ilmiah harus menjadi agenda utama bagi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Utara hingga ke tahap Kecamatan agar dapat melakukan pencegahan konflik dini di lingkungan masyarakat Pantura Jakarta. Hal ini dikarenakan adanya banyak pulau yang akan dibangun tentunya akan membawa dampak bagi nelayan Pantura Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- \_\_\_\_\_. "Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy" version 3.0 US Joint Forces Command. 2010. Joint Warfighting Center.
- \_\_\_\_\_. Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2008. Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017.
- \_\_\_\_\_. Buku Saku Tahun 2013. Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara.
- \_\_\_\_\_. Data Saku Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013. Jakarta Utara: Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- \_\_\_\_\_. Laporan Wilayah Kecamatan Penjaringan: Kota Administrasi Jakarta Utara. Oktober 2014. Jakarta: Kecamatan Penjaringan.
- Adams, Anne and Cox, Anna L. "Questionnaires, in-depth interviews and focus groups", in Paul Cairns and Anna L. Cox eds. *Research Methods for Human Computer interaction*. 2008. UK: Cambridge University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C. and Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. Dalam Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Castetter, W. B. and Heisler, R. S. *Developing and Defending A Dissertation Proposal*. 1984. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Dainton, Marianne and Zelley, Elaine D. *Applying Communication Theory for Professional Life: a Practical Introduction*. 2014. Canada: Sage Publication, Inc.
- Gary King et.al, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. 1995. UK: Princeton University Press.
- Hallahan, Kirk, Derina Holtzhausen, Betteke van Ruler, Dejan Verčič, and Sriramesh, Krishnamurthy. 2007. "Defining Strategic Communication", *International Journal of Strategic Communication*.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kodoatie, Robert J. dan Syarief, Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: C.V Andi OFFSET.
- Leedy, Paul D. 1997. *Practical Research: Planning and Design* 6<sup>th</sup> Edition. New Jersey: Prectice Hall.
- Malik, Ichsan. 2008. *Training Manual: Peace Building and Conflict Prevention*. Jakarta: SERAP.
- McKee, N. *Motivation to act: Effective communication*. 2000. In N. McKee, E. Manoncourt, S. Y. Chin, & R. Carnegie (Eds.), *Involving People, Evolving Behaviour*, pp. 108-109. New York and Penang: Southbound, UNICEF; and: McKee, N., Bertrand, J. T., & Becker-Benton, A. 2004. *Strategic communication in the HIV/AIDS epidemic*. New Delhi: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Oetzel, John G. and Ting-Toomey, Stella (ed.). 2006. *The SAGE Handbook of Conflict Communication: Integrating Theory, Research, and Practice*. California: Sage Publication, Inc.
- Patterson, Sally J. and Radtke, Janel M. 2009. *Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful Plan*. Wiley: New Jersey.
- Persaud, Ganga and Turner, Trevor. "Education and Conflict Resolution for Democratization, Economic Development and Governance in Guyana", in Cedric H. Grant and R. Mark Kirton. 2007. *Governance, Conflict Analysis and Conflict Resolution*. Jamaica: Ian Randle Publishers.
- Seer, Dudley. *The Meaning of Development* (1969), dalam Nain, Ahmad Shukri Md. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sibanda, Thabani Ka Sigogo. 2010. *Conflict Issues Across Disciplines, Conflict, Negotiation and Mediation: African Experiences*. UK: Xlibris Corporation.
- Sjamsudduha. 1999. *Konflik dan Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah: Sebuah Kajian Kontemplatif*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Swanström, Niklas L.P. and Weissmann, Mikael S. 2005. *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Sweden: Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program.
- US Department of Defense. *Strategic Communication: Joint Integrating Concept*. Washington, DC: Department of Defense, 7 October 2009.
- Widodo, Lestario dkk. 2004. "Kajian aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi Budaya Terhadap Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta", dalam Prosiding Workshop Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: BPPT.

**JURNAL:**

Bernard, H.R. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods*, 3rd edition. California: Altamira Press, 2002. In Ma. Dolores C. Tongco, "Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection", in *A Journal of Plants, People, and Applied Research: Ethnobotany Research and Applications*.

Cornish, Paul, Lindley-French, Julian and Yorke, Claire. "Strategic Communications and National Strategy", in a Catham House Report, September 2011.

Guerrero-Castro, Cristian E. 2013. "*Strategic Communication for Security and National Defense: Proposal for an Interdisciplinary Approach*". *The Quarterly Journal*, Spring 2013.

Hoogendam, Christina. "Strategic Communications Planning for Non-Profit Organization: a Data-Based Application of Seven Step Model". A Senior Project presented to the Faculty of the Communication Studies Departement of California Polytechnic State University, San Luis Obispo and to the San Luis Obispo Farm Bureau, San Luis Obispo, 2011.

Hox, Joop J. dan Boeije, Hennie R. "Data Collection Primary vs. Secondary", in *Encyclopedia of Social Measurment*, Volume 1, 2005.

Julia Wippersberg, "Change in Progress: On the Relationship of Goals and Measurement of Public Relations, Public Affairs and Advertising and Its Influence on Characteristic of Quality". *Romanian Journal of Journalism and Communication/Revista Romana De Jurnalism Si Comunicare (RRJC)* 4.4, 2009.

Marwanta, Bambang. "Dampak Bencana pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta" dalam *Jurnal Alami*, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2003.

**MAKALAH SEMINAR:**

"Policy Brief: Penanganan Konflik Sosial", *Diklatpim I Angkatan XXVIII* 2013 LAN RI.

Mulyono, Ignatius. "Pembangunan Perdamaian dan Arah Kebijakan Prolegnas Tahun 2010-2014", dalam Loka Karya "Mewujudkan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik", Arya Duta, Jakarta, 27 Juli 2010.

#### **SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI:**

Bokma, Lee E. 2010. *Strategic Communication for Tactical Leaders*. Thesis, Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College, Tulane University.

Hadipranoto, Reza Mahendra. 2012. *Peranan Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik pada Hubungan Persahabatan Siswa SMA Sedes Sapientiae*. Skripsi Fakultas Psikologi. Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.

Rudianto. 2004. *Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Pantai Utara Jakarta)*. Disertasi Fakultas Perikanan. Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Poespito Hadi, Wibisono. 2014. *Sinergitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kodim 0618/BS dengan Pemda Kota Bandung*. Tesis Jurusan Strategi Perang Semesta. Fakultas Strategi Pertahanan. Universitas Pertahanan: Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 6 Desember 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Gubernur 70 Tahun 2009 Tentang OTK BAPPEDA.

**WAWANCARA:**

Wawancara dengan Anni, Staf Bappeda Bidang PSKLH pada tanggal 30 Maret 2015.

Wawancara dengan Alan, Dewan Daerah WALHI Jakarta pada tanggal 22 April 2015.

Wawancara dengan Eny, Staf Bidang Kelautan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015.

Wawancara peneliti dengan Agus, Kepala Bidang Perikanan Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015.

Wawancara peneliti dengan Kubil, Nelayan Marunda pada tanggal 25 Maret 2015.

Wawancara peneliti dengan Pak Una, Kasudin KPKP pada tanggal 19 Mei 2015.

Wawancara peneliti dengan Pak Una, Kasudin KPKP pada tanggal 27 Januari 2015.

Wawancara peneliti dengan Sarji, Nelayan Kali Baru pada tanggal 25 Maret 2015.

Wawancara peneliti dengan Hendra dan Agus, Nelayan Kamal pada tanggal 10 April 2015.

**CATATAN DAN LEMBARAN DATA PENELITIAN:**

Catatan Arisan Paguyuban Jaring Kait tanggal 16 April 2015, di TPI Kamal, Kecamatan Penjaringan.

Catatan penelitian wawancara tanpa rekaman dengan Pak Musyawarah, Kasicam KPKP Penjaringan pada tanggal 10 April 2015.

Catatan penelitian wawancara tanpa rekaman dengan Sutrahman, nelayan di Kamal pada tanggal 16 April 2015.

Catatan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa nelayan, yakni nelayan serok, nelayan ikan kembung, nelayan bubu, nelayan jaring tangkap pada tanggal 10 April 2015.

Daftar Aset Eks BTPI, Dinas KPKP Bidang Perikanan.

#### **MAJALAH DAN SURAT KABAR:**

*"Ancaman Bencana di Teluk Jakarta"*, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015.

*"Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama: Saya Senang jika Bisa Membatalkan Reklamas"*, Majalah Tempo 1-7 Juni 2015

*"Pulau Baru di Teluk Jakarta"*, Majalah Tempo, 1-7 Juni 2015.

Supriatna, Yayat. *"Reklamsi Pantura Jakarta"* Kompas, 3 September 2002.

Widyanto, Untung dan Hussein Yusuf, Abri. *"Laporan Utama: Comberan Raksasa di Utara Jakarta"*, Majalah Tempo Edisi 1-7 Juni 2015.

#### **INTERNET:**

"Conflict Prevention", dalam website *European Peacebuilding Liaison Office* diakses dari <http://www.eplo.org/definitions.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.

"Data Kependudukan", Profil Kecamatan Penjaringan, diakses dari <http://www.kecamatanpenjaringan.com/about.php?id=13> pada 12 April 2015.

"KIARA: Reklamsi Teluk Jakarta Hanya untu Kepentingan Pengembang Properti" diakses dari <http://www.rmoljakarta.com/read/2015/06/09/7082/KIARA:-Reklamsi-Teluk-Jakarta-Hanya-untuk-Kepentingan-Pengembang-Properti-> pada tanggal 2 Juli 2015.

"Konflik Reklamsi Pantai Sario Tumpaan, DPRD Segera Tinjau Lapangan", dalam [ciputranews.com](http://www.ciputranews.com) diakses dari <http://www.ciputranews.com/external/www.mongabay.co.id/2013/1>

1/05/konflik-reklamasi-pantai-sario-tumpaan-dprd-segera-tinjau-lapangan/ pada tanggal 12 Oktober 2014.

“Penataan Pantai Utara Jakarta, Nasib Nelayan Terbaikan”, dalam Suara Pembaruan, 18 Desember 2008 diakses dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/31405-penataan-pantai-utara-jakarta-nasib-nelayan-terbaikan.html> pada tanggal 22 Oktober 2012.

“Penolakan “Giant Sea Wall” Menguat”, dalam Koran Jakarta diakses dari <http://koran-jakarta.com/?22165-penolakan%20%E2%80%9Cgiant%20sea%20wall%E2%80%9D%20menguat> pada tanggal 17 Oktober 2014.

“Pertanyaan-pertanyaan Seputar Persidangan Kasus Proyek Reklamasi Pantura Jakarta”, dalam website Kementerian Lingkungan Hidup diakses dari <http://www.menlh.go.id/pertanyaan-pertanyaan-seputar-persidangan-kasus-proyek-reklamasi-pantura-jakarta/> pada tanggal 12 Oktober 2014.

“Pesisir Utara Jakarta: Kisah Warga Pesisir yang Kian Tersisih”, Suara Pembaruan diakses dari <http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2008/12/18/files/assets/basic-html/page7.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.

“Pluit City: Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tak Rugikan Masyarakat Nelayan dan Lingkungan” diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/210275-pluit-city-reklamasi-pantai-utara-jakarta-tak-rugikan-masyarakat-nelayan-dan-lingkungan/> pada tanggal 2 Juli 2015.

“Profil Wilayah: Keadaan Wilayah Kecamatan Cilincing”, diakses dari <http://kecamatan-cilincing.blogspot.com/search/label/Profil%20Wilayah> pada tanggal 5 Maret 2015.

“Rencana Reklamasi Cemaskan Warga Marunda”, dalam TEMPO.CO di diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2003/11/05/05727957/rencana-reklamasi-cemaskan-warga-marunda> pada tanggal 12 Oktober 2014.

“Saat Ratusan Nelayan “Curhat” di Depan Kantor Jokowi”, dalam website antaranews.com diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/452651/saat-ratusan-nelayan-curhat-di-depan-kantor-jokowi> pada tanggal 12 Oktober 2014.

“Tempat Pelelangan Ikan”, Kamus Bisnis dan Bank, diakses dari [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tempat\\_pelelangan\\_ikan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tempat_pelelangan_ikan.aspx) pada 12 April 2015

“Visi dan Misi Kota Jakarta Utara” diakses dari <http://utara.jakarta.go.id/srv3/profile/visi-misi.html> pada 12 April 2015.

Armandhanu, Denny. “Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia: Wawancara dengan Connie Rahakundini Bakrie”, dalam website CNN Indonesia diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141022124012-112-7389/mewujudkan-mimpi-ri-jadi-poros-maritim-dunia/> pada tanggal 5 November 2014.

Deny, Septian. “Masyarakat Tak Perlu Takut dengan Reklamasi”, diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2213845/masyarakat-tak-perlu-takut-dengan-reklamasi> pada tanggal 15 April 2015.

Dwi W, Inggried (ed.). “Ratusan Nelayan Menuntut Penghentian Reklamasi Pantura Jakarta”, dalam News.Liputan6.com diakses dari <http://news.liputan6.com/read/119421/ratusan-nelayan-menuntut-penghentian-reklamasi-pantura-jakarta> pada tanggal 12 Oktober 2014.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Dalam Purwanti, Eny. “Dinamika Konflik Dalam Formulasi Kebijakan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 di Kabupaten Magetan”, website Pascasarjana UNS diakses dari <http://map.pasca.uns.ac.id/?p=42> pada tanggal 14 Oktober 2014.

More, Imanuel. “Reklamasi Cemaskan Nelayan Marunda” diakses dari <http://tekno.kompas.com/read/2011/10/27/14404432/reklamasi.cemaskan.nelayan.marunda> pada tanggal 12 Oktober 2014.

Pembangunan atas Nama Bencana”, dalam Organisasi Ruang Jakarta – RUJAK.ORG diakses dari <http://rujak.org/tag/nelayan/> pada tanggal 12 Oktober 2014.

Sekarningrum, Amba Dini. “Warga Pantura Demo Tolak Reklamasi Pantai Banten”, dalam [news.okezone.com](http://news.okezone.com) diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/03/05/501/587469/warga-pantura-demo-tolak-reklamasi-pantai-banten> pada tanggal 12 Oktober 2014.

Sindhu, A. “Chapter 2: Research Methodology” diakses dari [http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3704/12/12\\_chapter%202.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3704/12/12_chapter%202.pdf) pada tanggal 12 Oktober 2014.

Tambun, Lenny Tristia. “NCICD Tipe A untuk Atasi Banjir Rob di Utara Jakarta”, dalam [Beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) diakses dari <http://www.beritasatu.com/aktualitas/216108-ncicd-tipe-a-untuk-atasi-banjir-rob-di-utara-jakarta.html> pada tanggal 12 Oktober 2014.